



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Desain Besar

Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah





Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Desain Besar

Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah



PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH



Desain Besar

Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah

Tahun 2025-2029

Pengarah

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Dr. Nia Nurhasanah, S.Si., M.Pd., Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Penanggungjawab:

Untung Wismono, S.T., M.Sc., Dona Paramita, S.Psi., M.Pd.

Penyusun:

Prof. Suhendra, M.Ed., Ph.D (Universitas Pendidikan Indonesia), Prof. Vina Adriany, M.Ed., Ph.D (SEAMEO CECCEP / Universitas Pendidikan Indonesia), Nurman Siagian, M.A (INOVASI), Fanisa Dina Amalia Dewi Umbara, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia), Hanne Ayningtias Elsa, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia), Ryan Frizky, MBA.

Kontributor:

Untung Wismono, Dona Paramita, Nugrahaini, Agustinus Budi Pramono, Ade Saefudin, Deni Wijaya Utama

Pengolah Data:

A. M. Dzulfikar, Ryan Frizky, Dede Jumadi

Penelaah:

Perwakilan Kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional. **Perwakilan LPTK:** UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Terbuka. **Perwakilan UPT:** BPMP Jawa Barat, BPMP DKI Jakarta, BPMP Banten.

Perwakilan Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, **Perwakilan Mitra:** Pokja Bunda PAUD Kota Bekasi, Pokja Bunda PAUD Kota Bogor, Pokja Bunda PAUD Kota Tangerang Selatan, Pokja Bunda PAUD Kota Tangerang,

Tata Letak:

Mustopa Kamiludin, S.Ds., Arif Try Cahyadi, M.Ds., M Dimas Bayuningrat

Ilustrasi:

Muhammad Fadlan Yazid Husen, Danah Fitria, Arif Try Cahyadi, Rifyana Octria Afifah, Mustopa Kamiludin

Sekretariat:

Putry Rahyuni, Bambang L. Manik, Tri Nengah, Musriatun, Meitas, Renita Della A., M. Furqon Ashidiqy, Asya Syaida B., M. Firdaus.

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Kata Sambutan

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Setiap orang akan melewati fase usia dini yang kerap disebut sebagai usia emas karena melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam tumbuh kembang segenap potensinya. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan karena menjadi landasan utama bagi perkembangan seseorang pada jenjang pendidikan berikutnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Terkait dengan gagasan tersebut di atas, kami menyambut baik inisiasi dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mengembangkan Desain Besar 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'. Hal tersebut sebagai wujud komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan pada semua jenjang sebagai bagian integral dari kebijakan 'Wajib Belajar 13 Tahun'. Di samping itu, hal ini juga sebagai strategi dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk menyongsong visi 'Indonesia Emas 2045'.

Desain Besar 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' merupakan kerangka kerja bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD yang merata dan berkualitas di negeri ini. Hal tersebut diharapkan turut mempercepat perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan prasekolah di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Desain Besar 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah', sejak persiapan, penetapan, hingga peluncurannya. Dalam kesempatan ini pula, kami mengajak segenap pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama memberikan dukungan dalam mengimplementasikan kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' sebagai bagian dari implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 13 Tahun'.

Semoga Allah swt memberikan kemudahan dan kelancaran untuk semua harapan yang kita panjatkan.
Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.





1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak karena fase tersebut menjadi landasan yang kuat baginya untuk menjalani pendidikan pada jenjang-jenjang yang ia jalani sekaligus menjadi basis dalam rangka menyiapkan masa depannya. Oleh karena itu, pendidikan pada usia dini sangat krusial dalam membentuk sosok seorang anak, baik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor maupun pada aspek sosial, emosional, dan pembentukan karakternya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua orang dan pada semua jenjang, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak terkecuali. Untuk menguatkan komitmen Kemendikdasmen tersebut, para pemangku kepentingan perlu turut memberikan perhatian yang serius dan dukungan yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan PAUD sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena demikian strategisnya PAUD sebagai bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, maka kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' adalah sebuah keniscayaan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan sebuah kerangka kerja yang lazim disebut sebagai Desain Besar. Desain Besar kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' dikembangkan untuk digunakan sebagai pedoman yang memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara substansial, Desain Besar kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' ini memuat landasan konseptual, analisis situasi, strategi implementasi, serta pengorganisasian yang dirancang secara sistematis untuk menjamin keterlaksanaan kebijakan tersebut. Terkait dengan hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah di daerah 3T dapat menggunakan dokumen Desain Besar ini dalam merumuskan kebijakan turunan, merancang program, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan secara optimal.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat aktif dalam memfasilitasi penyusunan Desain Besar 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' ini agar dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi di daerah. Semoga Desain Besar kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 13 Tahun'. Hal tersebut pada gilirannya menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, Mei 2025

Direktur PAUD,

Dr. Nia Nurasanah, S.Si., M.Pd.

NIP. 197908292006042002



Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi Tumbuh Kembang Anak	2
1.2. Pentingnya PAUD bagi Pembangunan Global dan Negara	5
1.3. Mengapa 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'?	8
1.4. Dasar Hukum	12
1.5. Tujuan	13
1.6. Ruang Lingkup	13

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN 15

2.1. Akses dan Pemerataan	16
2.1.1. Daya Tampung	16
2.1.2. Partisipasi	22
2.2. Mutu	26
2.2.1. Status Akreditasi	26
2.2.2. Kualitas Pembelajaran	27
2.2.3. Kualifikasi PTK PAUD	29
2.2.4. Penyediaan Layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	30
2.3. Tata Kelola	32
2.3.1. Penataan Kelembagaan-Perizinan	32
2.3.2. Desentralisasi	34
2.3.3. Anggaran Satuan PAUD	38





BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI

41

3.1. Strategi Percepatan dan Peluasan	42
3.1.1. Strategi Peluasan Akses	43
3.1.2. Strategi Peningkatan Partisipasi	68
3.1.3. Strategi Peningkatan Mutu Layanan PAUD	70
3.1.4. Strategi Penguatan Tata Kelola	75
3.2. Strategi Advokasi dan Kampanye Pentingnya PAUD	77
3.2.1. Strategi Advokasi	77
3.2.2. Strategi Kampanye Pentingnya PAUD	80
3.3. Partisipasi Semesta	88
3.4. Pemanfaatan Teknologi	89

BAB IV PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

95

4.1. Kerangka Kerja Strategi Implementasi	96
4.1.1. Ekspansi Akses	96
4.1.2. Integrasi Layanan	99
4.1.3. Peningkatan Mutu	99
4.1.4. Reformasi Tata Kelola	99
4.2. Linimasa dan Luaran Strategi Implementasi	101
4.3. Pembagian Peran, Tugas, dan Fungsi Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	102
4.4. Pembimbingan dan Pendampingan	107
4.4.1 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Satuan Pendidikan	107
4.4.2 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan	108
4.4.3 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)	111

BAB V PENUTUP

115

PENUTUP

116

REFERENSI

117



Daftar Tabel

38	Tabel 2. 1. Anggaran PAUD pada 11 Kabupaten di Indonesia
44	Tabel 3. 1. Jumlah Populasi Anak Usia Dini Ditinjau dari Kondisi Desa
86	Tabel 3. 2. Strategi Diseminasi di Daerah
95	Tabel 4. 1. Perbandingan Skenario Agresif dan Moderat
95	Tabel 4. 2. Perbandingan Proyeksi Target Capaian untuk Skenario Agresif dan Moderat
96	Tabel 4. 3. Estimasi Biaya yang Dibutuhkan pada tahun 2025-2029
100	Tabel 4. 4. Linimasa dan Target Luaran

Daftar Gambar

3	Gambar 1. 1. Tahapan Perkembangan Otak Anak
4	Gambar 1. 2. Persentase Kompetensi Literasi Numerasi Anak
5	Gambar 1. 3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Global
6	Gambar 1. 4. Tingkat Pengembalian Investasi PAUD
7	Gambar 1. 5. Tingkat Rasio Ketergantungan Tahun 1971 - 2050
9	Gambar 1. 6. Skor Tes Kesiapan Anak Mengikuti Sekolah
16	Gambar 2. 1. Peta Sebaran Ketersediaan Desa Memiliki PAUD
18	Gambar 2. 2. Peta Sebaran Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun
20	Gambar 2. 3. Jumlah data yang memiliki PAUD di level provinsi
21	Gambar 2. 4. Data Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun
23	Gambar 2. 5. Peta Sebaran Anak Usia 5 - 6 Tahun Bersekolah di PAUD
24	Gambar 2. 6. Data Jumlah Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Usia 5 - 6 Tahun
27	Gambar 2. 7. Data Akreditasi PAUD di Indonesia
29	Gambar 2. 8. Data Status Ijazah Pendidik PAUD di Indonesia
29	Gambar 2. 9. Data Status Linear Pendidik PAUD di Indonesia
31	Gambar 2. 10. Persentase Masing-Masing Indikator Utama PAUD HI
32	Gambar 2. 11. Data kondisi mutu PAUD di Indonesia
33	Gambar 2. 12. Persentase Ketersediaan PAUD di Desa
33	Gambar 2. 13. Persentase PAUD Negeri dan Swasta di Indonesia
34	Gambar 2. 14. Persentase PAUD Formal dan Non-Formal di Indonesia
36	Gambar 2. 15. Sebaran desa berdasarkan status ketersediaan PAUD
48	Gambar 3. 1. Kriteria PAUD-SD Satu Atap
51	Gambar 3. 2. Kriteria Khusus Pembangunan PAUD-SD Satu Atap
55	Gambar 3. 3. Kategori Desa Berdasarkan Strategi Pemenuhan PAUD
55	Gambar 3. 4. Mekanisme Transisi PAUD-SD Satu Atap
58	Gambar 3. 5. Perbandingan Jumlah Peserta Didik PAUD dengan Penduduk Usia 5-6 Tahun



58	Gambar 3. 6. Sebaran Jumlah PAUD Non-Formal di Indonesia
62	Gambar 3. 7. Diagram Alur Peran Strategis RKB dalam Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah 6Tabel
63	Gambar 3.8. Pertimbangan dalam penentuan strategi implementasi Wajar 1 tahun pendidikan prasekolah
71	Gambar 3.9. Keterkaitan antar komponen untuk meningkatkan status akreditasi PAUD 71
78	Gambar 3.10. Target Sasaran Strategi Advokasi
79	Gambar 3.11. Strategi dalam penyusunan regulasi dan advokasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'
82	Gambar 3.12. Peran dan dukungan Pokja Bunda PAUD
83	Gambar 3.13. Peran Strategis Pokja Bunda PAUD
83	Gambar 3.14.Cakupan dan peran Pokja Bunda PAUD
84	Gambar 3.15. Peran strategis dari TP-PKK di tingkat pusat dan daerah
85	Gambar 3.16. Alur kolaborasi Pokja Bunda PAUD dan TP-PKK
88	Gambar 3.17. Strategi partisipasi semesta penyelenggaraan PAUD
91	Gambar 3.18. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
91	Gambar 3.19. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
92	Gambar 3.20. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran 103
93	Gambar 3.21 MARKAS dan ARKAS Gambar 3.20. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran 91
94	Gambar 3.22. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) 92
96	Gambar 4. 1. Diagram Proyeksi Target Capaian Berdasarkan Skenario
98	Gambar 4. 2. Kerangka Kerja Strategi Implementasi
99	Gambar 4. 3. Proyeksi Capaian Strategi Komitmen Daerah Tahun 2025-2029
104	Gambar 4. 4. Peran Kementerian/Lembaga dalam PAUD



BAB I

Pendahuluan





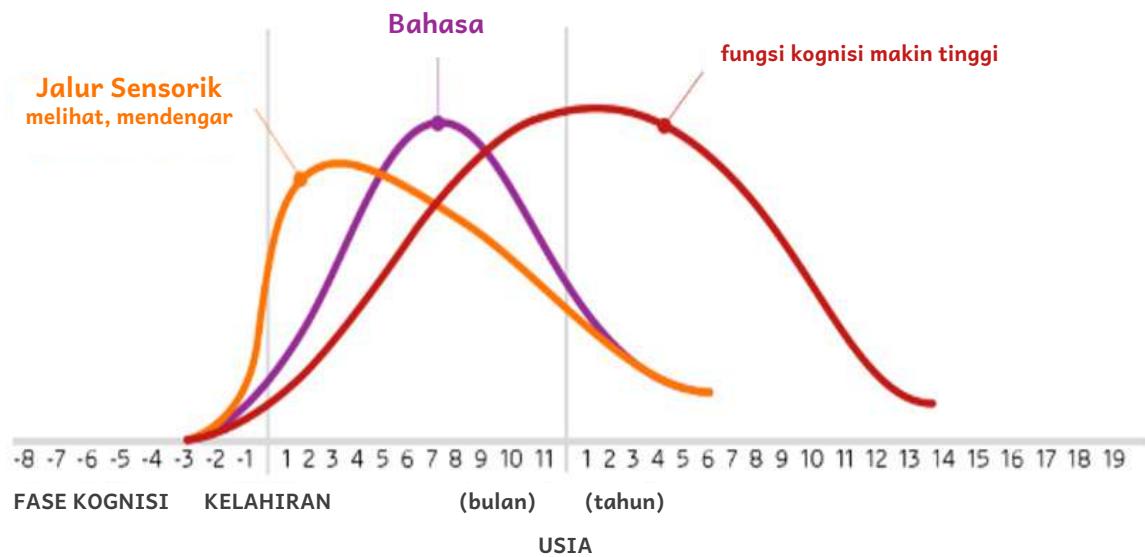
1.1 Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi Tumbuh Kembang Anak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan tercapainya pendidikan bermutu untuk semua. Visi pendidikan bermutu untuk semua telah dirumuskan berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dari mulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pendidikan Tinggi. Paling tidak terdapat dua elemen penting dari Pendidikan bermutu untuk semua. Pertama adalah memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan sebagai hak dasar mereka. Kedua adalah memastikan mutu pendidikan yang diterima masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PAUD merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan pula dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh BAPPENAS yang menyebutkan pentingnya PAUD sebagai landasan transformasi pendidikan dengan menekankan pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, serta pembentukan kompetensi dasar dan fondasi karakter anak sejak dini. Peta jalan ini selaras dengan visi jangka panjang pembangunan nasional untuk menciptakan generasi unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Dalam konteks ini, urgensi penyelenggaraan PAUD yang bermutu tidak dapat ditunda, karena usia dini merupakan fase yang penting untuk perkembangan otak dan kepribadian anak lebih lanjut.

Menurut berbagai kajian dalam ilmu Psikologi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 8 (delapan) tahun. Akan tetapi dalam konteks aturan negara, menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, PAUD adalah layanan yang diberikan kepada anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Fase usia dini, yang mencakup periode dari 0 hingga 6 tahun, dikenal sebagai *golden age* atau periode emas yang menentukan perkembangan seseorang pada fase-fase selanjutnya. Pada masa ini, otak seseorang berkembang dengan sangat pesat dan menjadi dasar bagi kemampuan kognitif, sosial, emosional, serta keterampilan hidup di masa depan (Shonkoff & Phillips, 2000). Budiharjo (2017) menambahkan bahwa pada periode ini, perkembangan otak anak mencapai 80%, sehingga stimulasi yang tepat melalui PAUD dapat mengoptimalkan potensi anak.

Perkembangan otak yang pesat pada tahun-tahun awal kehidupan atau periode emas menjadi faktor utama yang mendukung pentingnya pendidikan anak usia dini. Penelitian dalam bidang neuropsikologi menunjukkan bahwa perkembangan otak yang pesat terjadi pada tahun-tahun awal kehidupan, sehingga pengalaman awal menjadi sangat penting dalam membentuk arsitektur otak, karena koneksi antar-neuron terbentuk dengan cepat sebagai respons terhadap lingkungan sekitar (Center on the Developing Child, 2007). Tahapan perkembangan otak yang tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



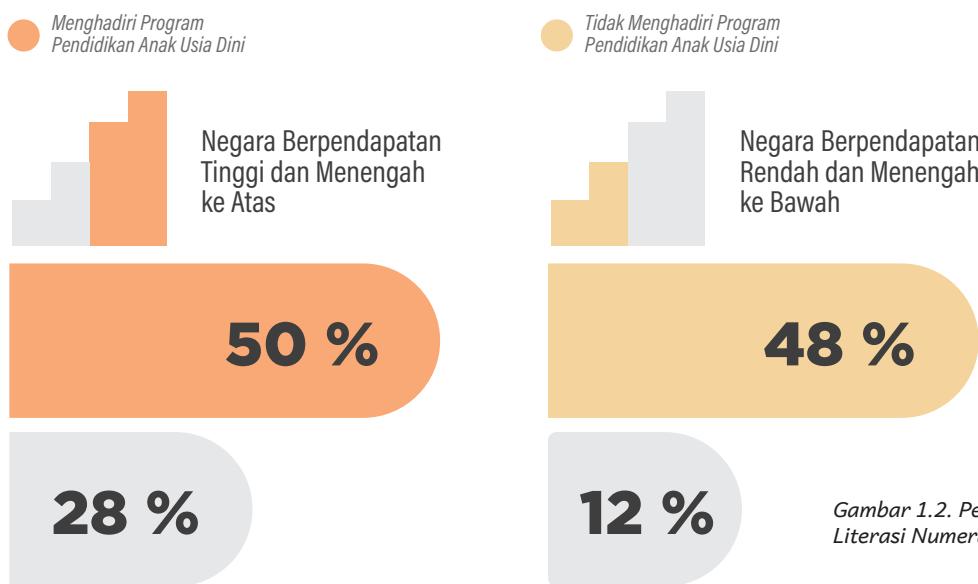
Gambar 1.1. Tahapan Perkembangan Otak Anak

Berbagai studi menunjukkan bahwa PAUD berkontribusi secara signifikan terhadap capaian akademik dan perkembangan anak. Hasil PISA mengungkapkan bahwa di negara-negara OECD, anak-anak yang sebelumnya mengikuti PAUD cenderung memperoleh skor akademik lebih tinggi pada usia 15 tahun dibandingkan dengan mereka yang sebelumnya tidak mengikuti PAUD atau hanya mengikutinya dalam waktu kurang dari satu tahun (OECD, 2020). Temuan lain, yaitu hasil penelitian longitudinal yang tertera pada Gambar 1.1. menunjukkan bahwa anak yang telah mengikuti pendidikan prasekolah sejak usia dini (di bawah 3 tahun) memiliki perkembangan yang lebih baik ketika awal mereka bersekolah, terutama dalam hal berbahasa, membaca, dan memahami angka serta kemandirian, konsentrasi, dan kemampuan bersosialisasi dibandingkan dengan anak yang sebelumnya tidak mengikuti prasekolah.

Merujuk diagram pada Gambar 1.2., berdasarkan penelitian yang melibatkan 48 negara, proporsi anak yang mengikuti PAUD memiliki kompetensi literasi numerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak mengikuti PAUD (UNICEF, 2019). Selain kompetensi literasi numerasi, anak yang mengikuti PAUD juga menunjukkan perilaku sosial yang lebih baik dan regulasi diri yang lebih kuat dibandingkan dengan anak yang tidak mengikuti PAUD. Perilaku sosial yang lebih baik dan regulasi diri yang lebih kuat pada anak usia dini diperkuat oleh hasil penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Mischel (1970).



Hasil penelitian tersebut dikenal sebagai *Marshmallow Test*, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anak dalam menunda kepuasan (*delayed gratification*), menunjukkan bahwa keterampilan meregulasi sejak dini berperan penting dalam menentukan keberhasilan seseorang di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini yang berkualitas sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut.



Gambar 1.2. Persentase Kompetensi Literasi Numerasi Anak

Dampak positif kontribusi PAUD tidak hanya terbatas pada aspek kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek sosial, terutama dalam membangun karakter anak sejak dini. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan pada usia dini cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, seperti kemampuan berkomunikasi, berempati, dan bekerja sama dengan orang lain (Barnett, 2013). Berbagai kajian menunjukkan bagaimana faktor-faktor di luar aspek kognitif seperti social emosi, memiliki dampak positif terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang.

PAUD juga berkontribusi terhadap aspek budaya melalui perannya dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal dan nasional, bahkan global, sejak usia dini. Menurut Gonzalez-Mena (2010), anak-anak yang mendapatkan pendidikan berbasis budaya sejak dini lebih mampu memahami dan menghargai keberagaman serta memiliki identitas yang kuat dalam masyarakat. Hal penting lainnya adalah bahwa pendidikan usia dini juga menjadi sarana dalam memperkenalkan norma dan nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat, seperti disiplin, kemandirian, toleransi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, selain membangun kecerdasan intelektual, PAUD juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan jati diri anak sebagai anggota komunitas di lingkungan keseharian yang pada gilirannya nanti mereka akan menjadi anggota masyarakat yang lebih luas.

Kesimpulannya, **PAUD berkualitas merupakan investasi strategis jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena peran PAUD sangat penting dalam membentuk fondasi kesiapan belajar, karakter anak, serta pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.**

1.2 Pentingnya PAUD bagi Pembangunan Global dan Negara



Gambar 1. 3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Global

PAUD memegang peranan yang penting bukan hanya bagi tumbuh kembang anak, tetapi juga bagi pembangunan negara dan pembangunan global (World Bank, 2006). Salah satu indikator dari Pembangunan Berkelanjutan Global atau *Sustainable Development Goals* (SDG) yang tertera pada Gambar 1.3., tepatnya indikator dari tujuan nomor 4 (empat) menegaskan perluasan akses bagi anak laki-laki dan perempuan kepada layanan PAUD berkualitas sebagai bagian dari pendidikan yang berkualitas (SDGs, n.a).

PAUD juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk menjamin tercapainya mobilitas dan keadilan sosial sebuah masyarakat (Adriany, 2022). Kajian yang dilakukan oleh Heckman (2012) menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan di PAUD akan memberikan keuntungan kepada negara di masa yang akan datang. Keuntungan ini kembali dalam bentuk meningkatnya produktivitas individu, penurunan nilai kemiskinan dan meningkatkan perkembangan ekonomi serta sosial sebuah negara. Keuntungan ini semakin terasa apabila investasi PAUD diperkuat khususnya untuk anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah (World Bank, 2007).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, PAUD memiliki peran krusial dalam membangun landasan kognitif, sosial, dan emosional anak sejak dini. Pendidikan yang diberikan pada usia dini mengakselerasi kesiapan anak dalam menghadapi tantangan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, sehingga mereka berpotensi lebih sukses pada jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, diawali dengan pendidikan yang berkualitas sejak dini, generasi Indonesia di masa mendatang akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang global karena mereka memiliki daya saing yang tinggi ketika dihadapkan pada situasi kompetitif yang ketat.



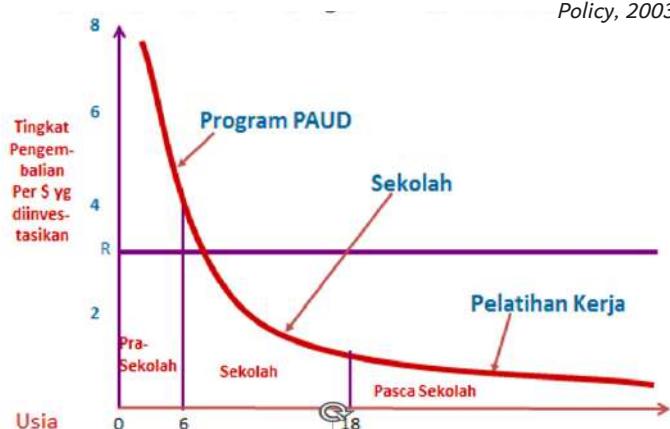
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Peran krusial PAUD juga dinyatakan dalam berbagai dokumen dan inisiatif global, dimulai dari kebijakan terkait *United Nations Convention of Children's Rights, Education for All (EFA)*, *Millenium Development Goals (MDGs)*, hingga kebijakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Berbagai dokumen dan inisiatif global ini diperkuat oleh berbagai deklarasi terkait PAUD. Pada tahun 2015, *SEAMEO Secretariat*, sebuah organisasi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara, meluncurkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan di mana PAUD menjadi prioritas pembangunan pertama. Lebih lanjut, pada tahun 2022, UNESCO meluncurkan *Tashkent Declaration on ECCE* yang secara tegas merekomendasikan perluasan akses PAUD, khususnya akses terhadap layanan 1 Tahun Pendidikan Prasekolah; peningkatan anggaran PAUD secara bertahap menjadi 10%; dan penguatan pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif (PAUD HI).. Kemudian, pada tahun 2023, melalui kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebuah deklarasi regional terkait PAUD yaitu *ASEAN Declaration on ECCE* telah diratifikasi oleh seluruh negara di Asia Tenggara. Seperti halnya *Tashkent Declaration*, *ASEAN Declaration* juga menegaskan perluasan akses layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah terutama untuk anak-anak dari kelompok rentan dan penguatan kerjasama lintas sektoral yang saling melengkapi.

Tidak hanya terkait dengan kemanfaatannya, PAUD juga memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Menurut Heckman (2011), sebagaimana tampak pada Gambar 1.4., dalam analisisnya terhadap program *Perry Preschool*, investasi dalam pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat memberikan tingkat pengembalian sebesar 7% hingga 10% per tahun per anak. Selain itu, studi lain dari Heckman mengenai program *Abecedarian* menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang komprehensif dan berkualitas tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sejak lahir hingga usia lima tahun dapat menghasilkan pengembalian investasi sebesar 13% per tahun per anak.

Penelitian lain oleh OECD (2017) menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan pada usia dini memiliki peluang lebih besar untuk sukses di sekolah dan dunia kerja dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan (formal) sejak dini. Dengan demikian, PAUD tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan individu, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi suatu negara melalui pemenuhan tenaga kerja yang lebih siap dan berkualitas.

Sumber: P. Carneiro, J. Heckman, *Human Capital Policy*, 2003

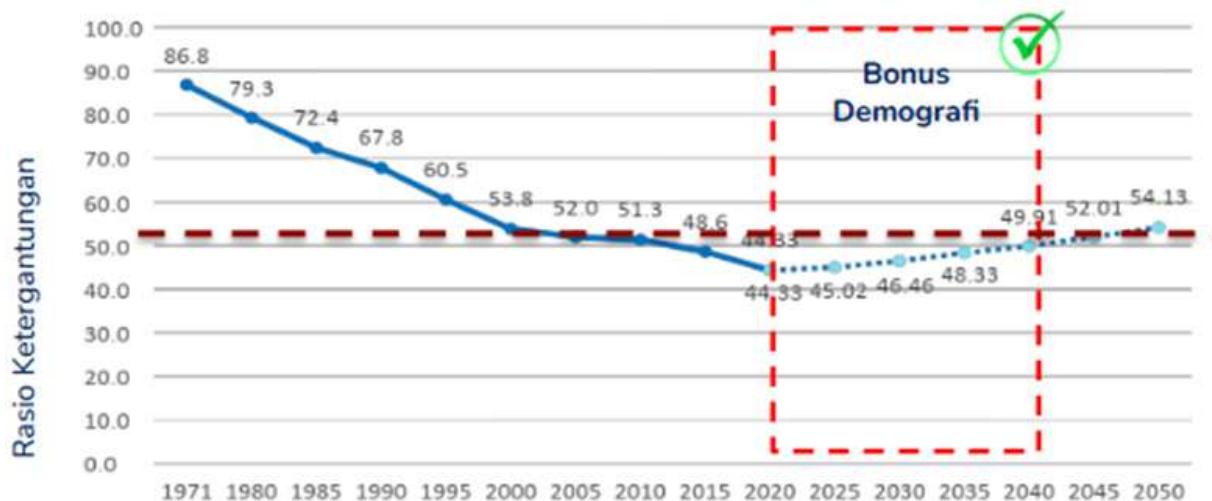


Gambar 1. 4. Tingkat Pengembalian Investasi PAUD

Selain itu, PAUD, baik formal maupun non-formal, juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif. Dengan adanya pendidikan usia dini yang merata dan inklusif, anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dalam proses pendidikan dan berprestasi di masa depan. Dengan kata lain, PAUD memiliki peran penting dalam mencapai mobilitas dan keadilan sosial.

Dalam konteks kependudukan, Indonesia pada saatnya akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Tingkat Rasio Ketergantungan dari Tahun ke Tahun (1971-2050)



Sumber: BPS, Sensus Penduduk, Supas, dan Proyeksi Penduduk 2020-2050

Gambar 1. 5. Tingkat Rasio Ketergantungan Tahun 1971 - 2050

Menurut Bappenas (2019), Indonesia diprediksi mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030-2040 yang ditunjukkan pada Gambar 1.5. Fenomena ini akan membawa dampak besar terhadap dunia pendidikan, karena jumlah penduduk usia sekolah akan meningkat secara signifikan. Bonus demografi ini juga akan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Apabila pemanfaatan peluang ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka jumlah penduduk usia produktif yang tinggi tersebut malah akan menjadi beban sosial, bahkan menjadi pemicu masalah ekonomi dan masalah-masalah iringan lainnya. Oleh karena itu, investasi dalam bidang pendidikan saat ini, khususnya pada pendidikan usia dini, menjadi sangat penting, sehingga diperlukan sejumlah langkah strategis guna memastikan bahwa pada saatnya nanti Indonesia memiliki sumber daya manusia unggul yang akan menjadi pelaku dan penggerak pembangunan pada rentang waktu tersebut. Untuk itu mempersiapkan generasi mendatang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk siap berkompetisi dan berkolaborasi di era global bukan sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan.



1.3 Mengapa 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'?

Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Program 'Wajib Belajar 13 Tahun' yang dimulai dari satu tahun prasekolah. Istilah wajib belajar seringkali dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk mengirimkan anaknya ke satuan pendidikan. Sehingga ada kekhawatiran bahwa orang tua akan mendapatkan konsekuensi tertentu sekiranya anaknya tidak bersekolah. Yang kedua, kata wajib juga seringkali dipahami sebagai sebuah keharusan anak memiliki ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya, sebelum memasuki jenjang selanjutnya. Dalam hal ini kata wajib haruslah dipahami sebagai upaya memastikan kehadiran negara dalam sektor pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

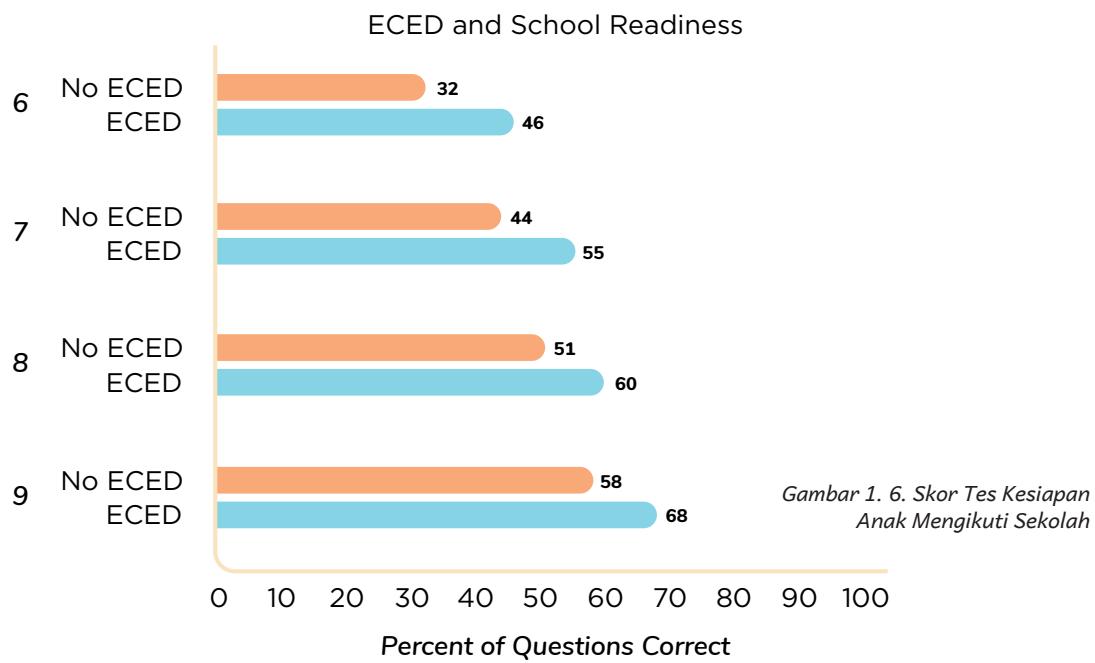
Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB akan Hak Anak atau *United Nation Convention of Children* yang menegaskan bahwa akses terhadap layanan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini yang berkualitas merupakan hak fundamental anak. Setiap anak lahir memiliki hak tersebut dan pemenuhan hak haruslah diberikan tanpa syarat. Sebagai sebuah negara yang sudah mengadopsi dan meratifikasi Konvensi PBB akan Hak Anak ini, maka Indonesia tentulah berkewajiban untuk bisa secara bertahap memenuhi hak ini. Tentu ini dilakukan tanpa mengabaikan partisipasi semesta termasuk peran dan tanggung jawab orang tua.

Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah juga tidak berarti bahwa pemenuhan hak atas layanan pendidikan dan pengasuhan hanya dilakukan pada anak usia 5 (lima) tahun ke atas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, usia 0-6 tahun merupakan usia kritis. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa masa pertumbuhan optimum anak terjadi pada 1000 hari pertama dalam kehidupan anak, tetapi terdapat beberapa pertimbangan mengapa prioritas kebijakan saat ini difokuskan pada 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.

Pertama, PAUD satu tahun prasekolah juga memiliki peran penting dalam membentuk rasa percaya diri anak dan memberikan dukungan agar mereka dapat mengeksplorasi lingkungan secara aman dan menyenangkan. Sebagaimana dinyatakan di atas, PAUD bukan hanya berperan dalam membangun kemampuan akademik anak, tetapi juga dalam mengembangkan aspek psikososial yang akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka untuk menghadapi proses pendidikan. PAUD satu tahun prasekolah juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kesiapan dalam menjalankan kehidupan di masa yang akan datang.

Kedua, kajian mengenai PAUD di Indonesia menunjukkan bahwa PAUD memiliki dampak positif terhadap kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar. Hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (2019) yang meneliti *“Dampak Program PAUD terhadap Hasil Belajar Siswa di Tingkat SD”* di 15 kabupaten menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD memiliki nilai rata-rata UASBN 12% lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mengikuti PAUD. Pada tahun berikutnya, UNICEF Indonesia dan BAPPENAS (2020) melakukan penelitian yang dimuat dalam laporan *“Investing in Early Childhood Education in Indonesia”*. Hasilnya mengungkapkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan di PAUD, terutama di daerah pedesaan, 1,8 kali lebih siap menghadapi pendidikan pada jenjang sekolah dasar dibandingkan dengan anak yang tidak mengikuti PAUD. Selanjutnya, Kemendikbud RI pada tahun 2021 melakukan pemantauan terhadap kesiapan bersekolah anak usia dini di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 78% anak PAUD memiliki kesiapan kognitif dan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan 45% anak non-PAUD. Data ini semakin menguatkan bahwa PAUD berperan penting dalam membangun keterampilan awal yang dibutuhkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Hasil kajian di atas sejalan dengan hasil penelitian UNICEF (2011) yang menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD memiliki skor skolastik (akademik) dan non-skolastik (sosial dan sikap kerja) yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mengikuti PAUD. Hal ini diperkuat oleh data dari World Bank (2013), sebagaimana tampak pada Gambar 1.6, yang menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD (*Early Childhood Education and Development - ECED*) memiliki persentase jawaban benar lebih tinggi dalam tes kesiapan sekolah pada usia 6 hingga 9 tahun.



Ketiga, kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap anak usia dini memperoleh pendidikan yang berkualitas sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan dasar. Kata “wajib” pada kebijakan ini diartikan sebagai kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara, dalam hal ini anak usia 5-6 tahun, untuk mendapatkan layanan pendidikan pada level prasekolah (PAUD).



Keempat, kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak dalam berinteraksi melalui lingkungan sosialnya. Selain itu, melalui PAUD anak diperkenalkan pada konsep dasar membaca, menulis, dan berhitung secara informal untuk membangun fondasi akademik yang kuat sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Terkait dengan hal tersebut, kurikulum PAUD seyoginya dirancang untuk mendorong kemandirian anak dalam melakukan aktivitas belajar, sehingga mereka diharapkan lebih siap dalam menghadapi tuntutan lingkungan belajar yang lebih terstruktur. Melalui pemberian stimulasi yang optimal, khususnya pada aspek sosial, emosional, kognitif, dan motorik, kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki bekal yang memadai dalam menjalani dan meraih keberhasilan dalam pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya.

Kelima, merujuk pada perspektif ekonomi, berdasarkan analisis biaya dan manfaatnya, kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ diprediksi akan berlangsung tepat guna dan berdaya guna. Perhitungan yang membandingkan antara biaya operasional, pengelola, dan investasi pendidikan dikaitkan dengan harapan pendapatan anak, yang sebelumnya mengikuti pendidikan di PAUD (pendidikan prasekolah) selama 1 tahun, di masa depan diprediksi akan mendapatkan perolehan yang signifikan. Gagasan ini didukung oleh data dari *Indonesia Family Life Survey (IFLS)* yang membandingkan anak yang mengikuti TK Kelompok A atau TK Kelompok B pada tahun 1992 dengan pendapatan mereka di tahun 2014, yang disesuaikan dengan inflasi untuk perhitungan tahun 2021, hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan prasekolah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ tidak hanya berkontribusi terhadap kesiapan akademik dan non-akademik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ harus didukung oleh semua pemangku kepentingan, karena apabila diterapkan dengan baik, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat kesiapan belajar anak pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya untuk aspek pendidikan berkualitas, sebagaimana dinyatakan sebelumnya. Karena walau bagaimanapun kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan dan penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Implementasi ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ menuntut dukungan multisektoral. Hal ini sejalan dengan teori ekologi dari Broffrenbrenner (1979) yang menekankan pentingnya membangun ekosistem yang kuat untuk meningkatkan tumbuh kembang anak. Teori ini merekognisi bahwa selain aspek individu anak, faktor lain seperti *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, *macrosystem*, dan *chronosystem* sangat memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak.



Langkah Realistik dan Bertahap

Menetapkan satu tahun PAUD prasekolah sebagai wajib belajar merupakan langkah awal yang realistik dan terukur, terutama mengingat Ketersediaan layanan PAUD di seluruh Indonesia yang masih belum merata, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendidikan yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan satu tahun sebagai langkah awal, pemerintah bisa memastikan kualitas dan akses yang setara, sebelum memperluas ke durasi yang lebih Panjang.

Menjaga Fleksibilitas dan Peran Orang Tua

Tidak semua anak memiliki kesiapan perkembangan yang sama pada usia 0-5 tahun. Disisi lain juga tidak semua keluarga memiliki kebutuhan yang sama. Sehingga penting untuk memberikan ruang fleksibilitas keluarga dalam memilih pola pengasuhan dan pendidikan anak yang sesuai dengan konteks budaya dan ekonomi mereka.

Fokus pada Usia Kritis Transisi ke SD

Usia 5-6 tahun adalah fase transisi kritis dari masa bermain ke masa belajar lebih formal. Satu tahun PAUD menjelang SD dipandang cukup strategis untuk: Mempersiapkan kesiapan sekolah (school readiness) secara intensif, dan melatih anak dalam kemampuan dasar literasi, numerasi, serta keterampilan sosial-emosional yang dibutuhkan saat masuk SD. Dengan demikian, satu tahun prasekolah bersifat transisi yang sistematis dan difokuskan pada penguatan kesiapan masuk sekolah dasar.

Landasan Kebijakan yang Disepakati Secara Nasional

Kebijakan satu tahun PAUD prasekolah telah ditetapkan dalam berbagai dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045.

Memberi Prioritas pada Anak Usia 5-6 Tahun

Kelompok usia 5-6 tahun memiliki angka partisipasi PAUD yang masih rendah di beberapa wilayah, padahal kelompok usia ini paling dekat dengan jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah lebih diarahkan untuk mengejar ketertinggalan akses, menyiapkan anak secara sistematis untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SD, dan menjadi "jembatan" yang memperkecil learning gap antaranak dari berbagai latar belakang untuk menyiapkan masa depan mereka.



1.4 Dasar Hukum

Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ didasarkan pada sejumlah dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang merata dan berkualitas. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 31;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23/2002 jo. No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI);
6. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 menjadi PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional PAUD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik & Nonfisik (BOP PAUD);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2025-2045;

1.5 Tujuan

Kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' merupakan gagasan yang memastikan bahwa setiap anak yang berusia 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun harus mendapatkan akses sehingga dapat turut berpartisipasi mengikuti proses pendidikan pada satuan PAUD yang berkualitas sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar (SD). Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk:

1. Meningkatkan kesiapan anak dalam mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar;
2. Menjamin akses setiap anak laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi, budaya, agama, dan disabilitas untuk mengikuti PAUD yang inklusif dan berkualitas;
3. Mengurangi kesenjangan dalam kesiapan belajar pada jenjang sekolah dasar;
4. Membentuk karakter dan kemandirian anak sejak dini; dan
5. Menjadi fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' terdiri atas 4 (empat) aspek utama, yaitu sasaran, standar pelaksanaan pendidikan, aksesibilitas, dan evaluasi serta pengukuran keberhasilan program. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing aspek tersebut.

1. Sasaran

Kebijakan ini ditujukan untuk menjamin hak anak berusia 5 - 6 tahun terhadap layanan PAUD minimal satu tahun prasekolah. Kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan layanan PAUD yang merata dan berkualitas bagi setiap anak Indonesia guna meningkatkan kesiapan mereka sebelum memasuki jenjang sekolah dasar melalui pengembangan keterampilan dasar.

2. Standar Pelaksanaan Pendidikan

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, ditetapkan standar pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang meliputi: standar isi (Permendikbudristek No. 8 Tahun 2024); standar proses (Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022); standar sarana dan prasarana (Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023); dan standar pendidikan guru (Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022).

3. Aksesibilitas

Kebijakan harus dijalankan secara inklusif sehingga diperlukan beberapa strategi untuk memperluas akses PAUD melalui: pendirian satuan PAUD di daerah terpencil dan tertinggal; penyediaan layanan PAUD yang optimal; serta pemberian bantuan operasional dan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, sehingga setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan prasekolah yang berkualitas.

4. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan

Untuk memastikan keberhasilannya, kebijakan ini harus terstruktur dan terukur. Demi kepentingan hal tersebut, kebijakan ini diukur melalui sejumlah indikator yang terdiri atas tingkat partisipasi, evaluasi mutu pendidikan, dan dampak terhadap kesiapan pengelola pendidikan.



BAB II

Kondisi dan Permasalahan



2.1 Akses dan Pemerataan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran krusial sebagai landasan bagi pendidikan di sekolah dasar dan rangkaian proses pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya. Dengan kata lain, dalam jangka panjang PAUD turut menjadi penentu kualitas pendidikan sebuah bangsa. Oleh karena itu, akses masyarakat untuk memperoleh layanan PAUD merupakan hal yang penting karena turut memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan prasekolah tersebut. Selain akses, hal lain yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan PAUD adalah pemerataan. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di level PAUD menjadi kurang berarti manakala hanya diraih oleh beberapa orang saja dan di beberapa tempat saja. Dengan demikian, akses dan pemerataan adalah dua kata kunci yang turut memastikan keberhasilan program PAUD. Sayangnya, akses dan pemerataan layanan PAUD di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan meliputi hal-hal berikut.

2.1.1. Daya Tampung

Daya tampung merujuk pada kapasitas satuan PAUD dalam menerima dan melayani peserta didik usia dini. Aspek ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana layanan PAUD dapat menjangkau anak-anak usia dini di suatu wilayah. Daya tampung yang memadai turut memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pendidikan di PAUD yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Secara lebih spesifik, ketersediaan ruang kelas, media dan alat permainan edukatif (APE), serta fasilitas pendukung lainnya mempengaruhi daya tampung sebuah PAUD. Selain itu, rasio ideal antara jumlah pendidik dan jumlah peserta didik yang dikelolanya juga menjadi faktor yang turut menentukan daya tampung sebuah PAUD. Di bawah ini adalah data sebaran PAUD di Indonesia.



© 2025 Mapbox © OpenStreetMap

Gambar 2. 1. Peta Sebaran Ketersediaan Desa Memiliki PAUD di Level Provinsi.

Keterangan:

10 Provinsi Tertinggi	
Prov. DKI Jakarta	100.00%
Prov. DI Yogyakarta	100.00%
Prov. Jawa Barat	99.73%
Prov. Jawa Timur	99.72%
Prov. Jawa Tengah	99.44%
Prov. Bali	98.88%
Prov. Banten	98.58%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	98.47%
Prov. Nusa Tenggara Barat	98.20%
Prov. Gorontalo	96.86%

10 Provinsi Terendah	
Prov. Papua Pegunungan	11.20%
Prov. Papua Tengah	20.45%
Prov. Papua Barat Daya	25.19%
Prov. Papua Selatan	27.25%
Prov. Papua Barat	31.44%
Prov. Papua	38.87%
Prov. Kalimantan Utara	58.06%
Prov. Aceh	59.36%
Prov. Sumatra Utara	71.77%
Prov. Kalimantan Barat	76.22%

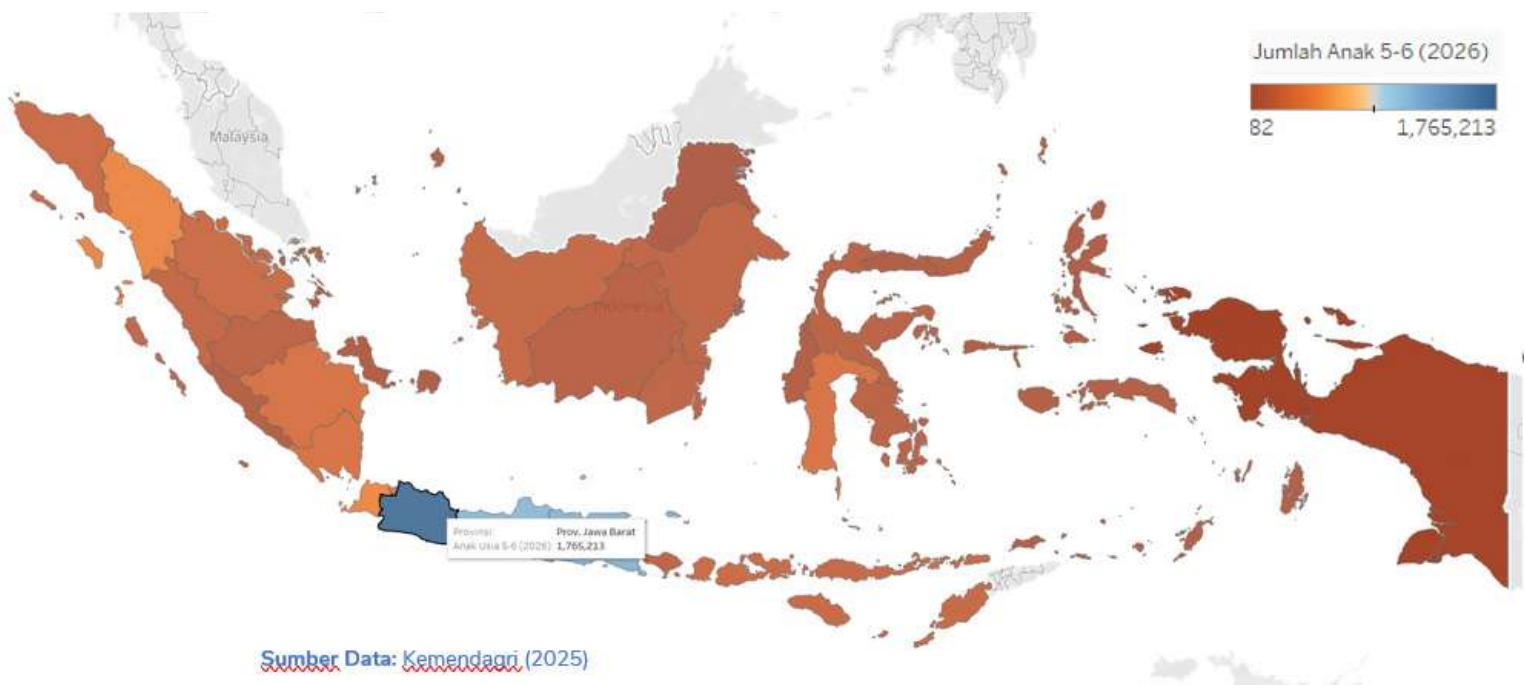
10 Kab/Kota Tertinggi	
Kota Yogyakarta	100.00%
Kota Tegal	100.00%
Kota Tasikmalaya	100.00%
Kota Tarakan	100.00%
Kota Tanjungpinang	100.00%
Kota Tangerang Selatan	100.00%
Kota Tangerang	100.00%
Kota Surakarta	100.00%
Kota Surabaya	100.00%
Kota Sukabumi	100.00%

10 Provinsi Terendah	
Kab. Tolikara	2.20%
Kab. Puncak Jaya	2.32%
Kab. Yalimo	3.33%
Kab. Yahukimo	4.83%
Kab. Nduga	4.84%
Kab. Intan Jaya	5.15%
Kab. Puncak	8.74%
Kab. Maybrat	10.00%
Kab. Pegunungan Bintang	13.36%
Kab. Mappi	14.63%



Geo chart pada Gambar 2.1. menunjukkan bahwa ketersediaan layanan PAUD di Indonesia sangat bervariasi antar provinsi, dengan rentang antara 20,45% hingga 100%. Wilayah barat dan tengah Indonesia umumnya memiliki ketersediaan PAUD yang lebih baik, terlihat dari dominasi warna biru pada peta, yang mencerminkan bahwa sebagian besar desa di wilayah tersebut telah memiliki layanan PAUD yang memadai. Hal ini mencerminkan adanya perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, wilayah timur, khususnya Papua dan Papua Barat, masih menunjukkan tingkat ketersediaan PAUD yang rendah. Kendala geografis, infrastruktur yang terbatas, serta akses yang sulit diduga menjadi penyebab utama rendahnya layanan PAUD di wilayah ini.

Meskipun secara nasional jumlah satuan PAUD tergolong banyak, tetapi distribusinya belum merata dan daya tampungnya masih menjadi tantangan, terutama di provinsi dengan jumlah penduduk yang rendah. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan fisik PAUD menjadi sangat penting, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), untuk memastikan bahwa seluruh anak usia dini di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan memadai. Upaya ini akan mendukung tujuan pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.



Gambar 2.2. Peta Sebaran Jumlah Anak Usia 5 – 6 Tahun

Keterangan:

10 Provinsi Tertinggi	
Prov. Jawa Barat	1,765,213
Prov. Jawa Timur	1,184,955
Prov. Jawa Tengah	1,151,845
Prov. Banten	472,983
Prov. Sumatera Utara	468,653
Prov. D,K,I Jakarta	350,141
Prov. Sulawesi Selatan	299,516
Prov. Sumatera Selatan	297,424
Prov. Lampung	297,106
Prov. Riau	211,726

10 Provinsi Terendah	
Prov. Papua Pegunungan	41
Prov. Papua Tengah	279
Prov. Papua Barat Daya	2,372
Prov. Papua Selatan	10,734
Prov. Papua Barat	17,992
Prov. Kalimantan Utara	27,762
Prov. Papua	35,079
Prov. Gorontalo	42,996
Prov. Maluku Utara	45,163
Prov. Kep. Bangka Belitung	45,454

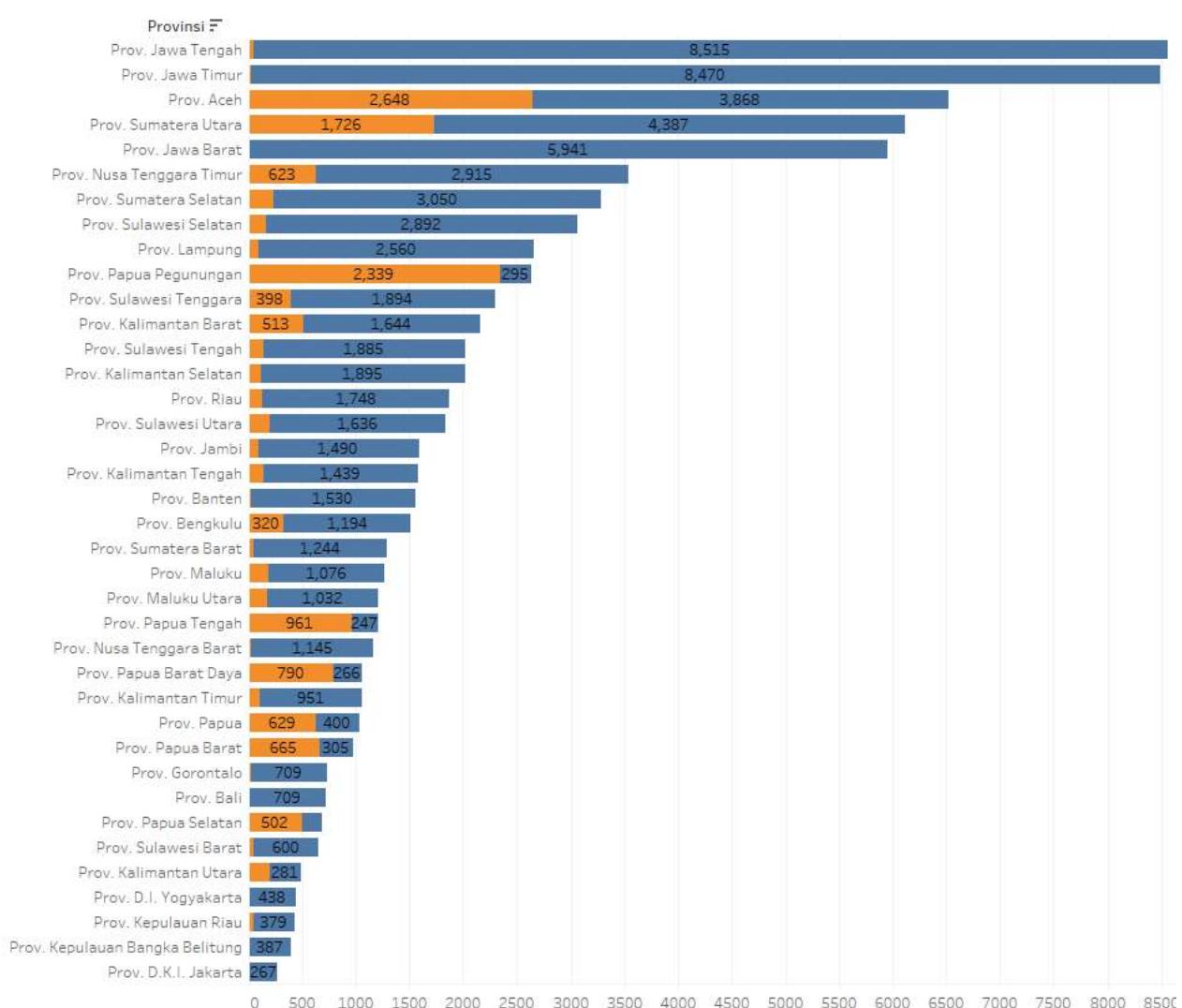
10 Kab/Kota Tertinggi	
Kab. Bogor	216,957
Kab. Bandung	133,811
Kab. Tangerang	126,255
Kab. Bekasi	126,053
Kab. Garut	109,687
Kab. Sukabumi	105,698
Kota Jakarta Timur	103,784
Kab. Cianjur	99,889
Kab. Karawang	94,929
Kota Surabaya	87,790

10 Provinsi Terendah	
Kab. Kepulauan Tanimbar	0
Kab. Maybrat	0
Kab. Sorong	0
Kab. Tambrauw	0
Kota Sorong	0
Kab. Tolikara	3
Kab. Nduga	8
Kab. Dogiyai	9
Kab. Jayawijaya	9
Kab. Yalimo	21



Geo chart pada Gambar 2.2. memperlihatkan distribusi jumlah anak usia 5-6 tahun di Indonesia berdasarkan wilayah. Warna pada peta menunjukkan tingkat populasi anak dalam rentang usia tersebut: merah untuk jumlah yang relatif sedikit, oranye untuk jumlah sedang, dan biru untuk jumlah yang banyak. Terlihat bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah anak usia 5-6 tahun yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, sementara wilayah Papua cenderung memiliki jumlah yang lebih sedikit.

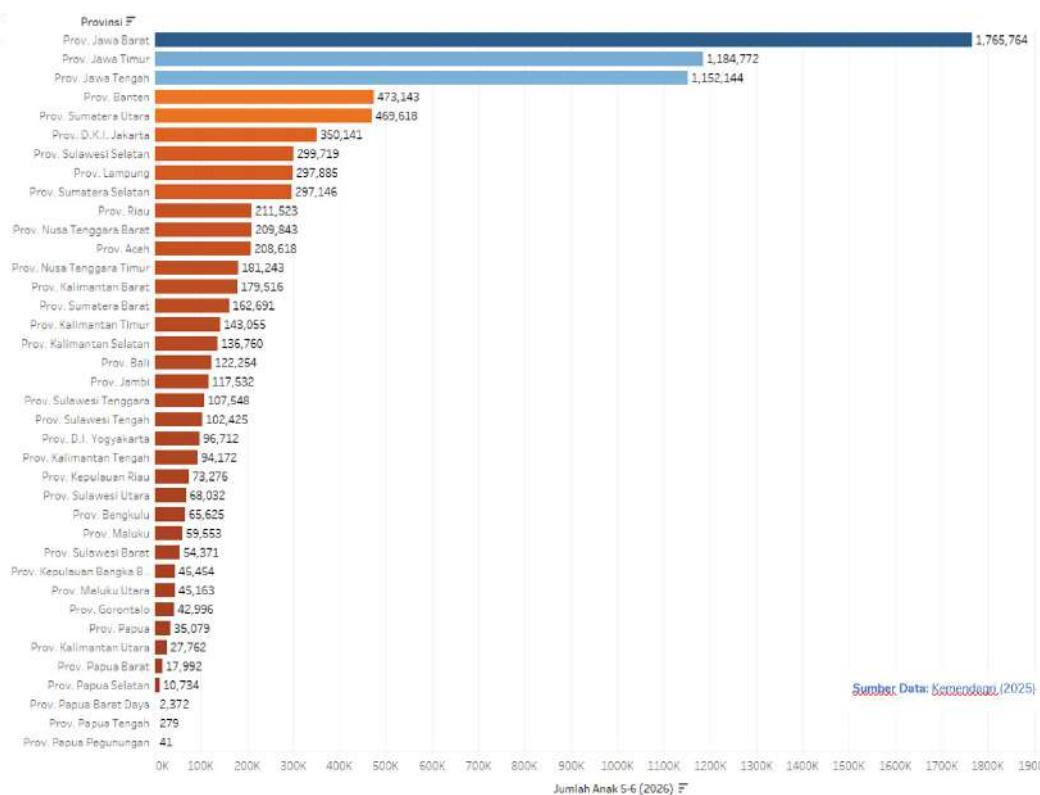
Distribusi ini menunjukkan ketimpangan sebaran anak usia dini di Indonesia. Wilayah dengan jumlah anak yang tinggi, seperti di Pulau Jawa, memiliki potensi besar untuk penguatan layanan pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, wilayah dengan populasi anak yang rendah, seperti Papua, memerlukan perhatian khusus untuk memperluas akses layanan pendidikan. Secara keseluruhan, Geo chart di atas menggambarkan distribusi anak usia 5 - 6 tahun di wilayah Indonesia yang tidak merata. Beberapa provinsi dengan jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang lebih banyak menunjukkan potensi yang memadai bagi penguatan kebijakan layanan pendidikan, sementara daerah dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang lebih sedikit menandakan perlunya perhatian untuk meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki anak usia 5 - 6 tahun di daerah tersebut. Berikut diagram batang yang menggambarkan distribusi jumlah PAUD di berbagai provinsi di Indonesia.



Gambar 2. 3. Jumlah Desa yang Memiliki PAUD di Level Provinsi

Berdasarkan Gambar 2.3. di atas, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa terbanyak yang menyediakan layanan PAUD, yaitu 8.515 desa, diikuti oleh Jawa Timur (8.470 desa) dan Jawa Barat (5.941 desa). Ketiga provinsi ini menunjukkan dominasi dalam penyebaran layanan PAUD di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan juga memiliki jumlah desa dengan PAUD yang cukup besar, menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah barat Indonesia.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Indonesia timur seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya masih memiliki jumlah desa dengan PAUD yang relatif sedikit. Faktor penyebabnya bisa mencakup jumlah desa yang lebih sedikit atau terbatasnya akses dan fasilitas. Secara umum, data ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD secara nasional, tetapi tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal dalam ketersediaan layanan PAUD.



Gambar 2. 4. Data Jumlah Anak Usia 5 – 6 Tahun

Berdasarkan Gambar 2.4. di atas, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah anak usia 5-6 tahun tertinggi di Indonesia (1.765.764 anak), diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi ini secara konsisten menjadi pusat populasi anak usia dini, mencerminkan tingginya kebutuhan akan layanan PAUD yang memadai dan merata di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Provinsi lain seperti Banten, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta juga menunjukkan angka signifikan yang menandakan kebutuhan besar terhadap penguatan kapasitas layanan pendidikan anak usia dini.

Sementara itu, provinsi dengan populasi anak usia dini terendah seperti Sulawesi Barat, Maluku, dan Bengkulu menunjukkan tantangan berbeda, yaitu keterbatasan jumlah anak usia dini yang mungkin disebabkan oleh kepadatan penduduk rendah serta kondisi geografis yang tersebar. Analisis ini menegaskan bahwa strategi pengembangan PAUD harus



mempertimbangkan variasi jumlah anak dan tantangan wilayah: di satu sisi, penguatan kapasitas layanan dibutuhkan di daerah padat, sementara di sisi lain, intervensi afirmatif dan layanan berbasis komunitas diperlukan di wilayah terpencil agar tercapai pemerataan akses pendidikan anak usia dini secara nasional.

2.1.2. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada tingkat keikutsertaan anak dalam program PAUD sebagai peserta didik. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang memiliki akses terhadap pendidikan usia dini, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Partisipasi yang tinggi juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan layanan PAUD yang inklusif dan merata.

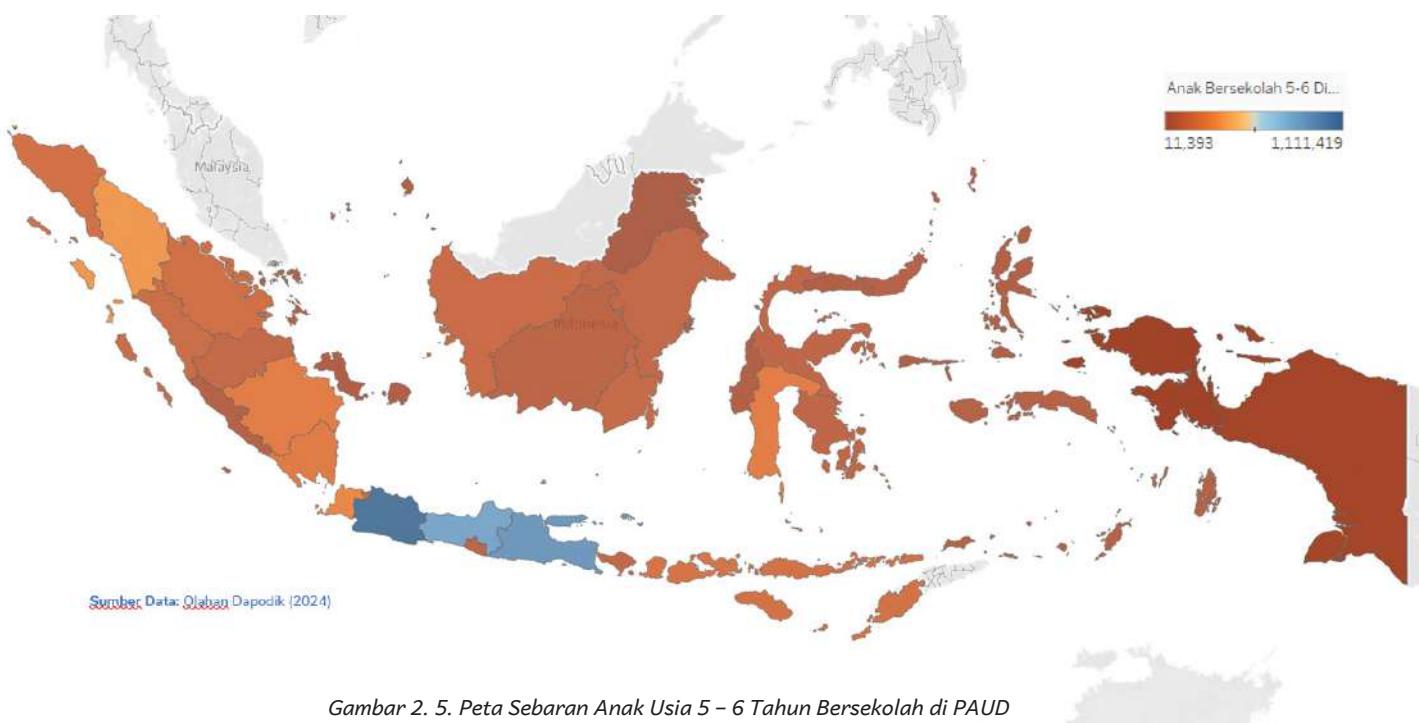
Partisipasi dalam PAUD dapat diukur melalui sejumlah indikator, beberapa di antaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi anak usia dini yang terdaftar dalam satuan PAUD dibandingkan dengan total populasi anak usia dini di suatu wilayah. Sementara, APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak dalam rentang usia 3-6 tahun yang terdaftar di PAUD terhadap total populasi anak dalam rentang usia tersebut. Terakhir, APS merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Ketiga indikator di atas memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dalam mengukur akses dan efektivitas sistem pendidikan, PAUD tak terkecuali. APS menggambarkan seberapa banyak peserta didik dalam kelompok usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang ditempuh. Sementara itu, APK memberikan gambaran tentang daya tampung pendidikan di suatu jenjang dengan membandingkan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan dengan populasi usia sekolah yang seharusnya berada di jenjang tersebut. Oleh karena itu, APK dapat melebihi 100% apabila terdapat peserta didik yang mengikuti pendidikan namun tidak sesuai dengan usianya.

Di sisi lain, APM lebih spesifik karena hanya menghitung peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, sehingga hal tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan efektivitas sistem pendidikan untuk aspek daya tampung peserta didik secara tepat. Apabila APS tinggi tetapi APM rendah, berarti banyak peserta didik yang masih tertinggal atau berada di jenjang yang tidak sesuai dengan usia belajarnya. Demikian pula, apabila APK tinggi tetapi APM rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara usia peserta pendidikan dan jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, ketiga indikator ini perlu digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan akses dan efektivitas pendidikan di suatu wilayah.

Dalam penyusunan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, penggunaan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dinilai lebih akurat dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Hal ini karena APS secara khusus mengukur persentase anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di

jenjang yang sesuai, tanpa dipengaruhi oleh faktor anak yang berada di luar rentang usia ideal. Sebaliknya, APK seringkali memberikan gambaran yang bias karena memasukkan semua anak yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan kesesuaian usia, sehingga angka dapat terlihat tinggi padahal tidak sepenuhnya mencerminkan keterjangkauan layanan bagi anak usia wajib PAUD. Demikian pula, APM yang hanya menghitung anak sesuai usia ideal dapat mengabaikan kondisi riil di lapangan, misalnya ketika ada anak yang lebih tua atau lebih muda yang juga mengikuti layanan pra sekolah. Dengan demikian, APS memberikan representasi yang lebih realistik tentang partisipasi anak sesuai rentang usia sasaran kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih valid dalam perencanaan dan evaluasi program ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’.



Gambar 2. 5. Peta Sebaran Anak Usia 5 – 6 Tahun Bersekolah di PAUD

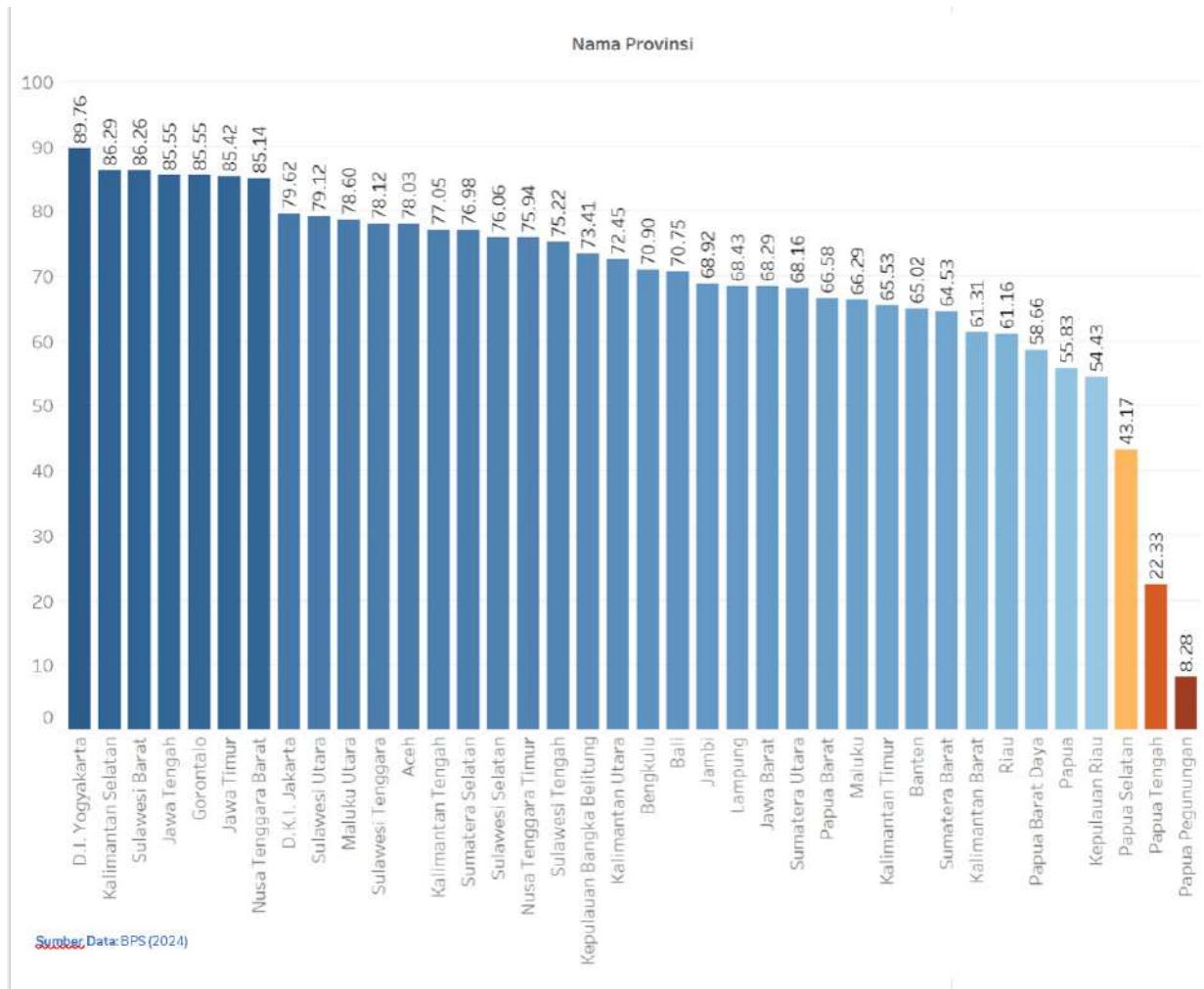
Geo chart pada Gambar 2.5. menunjukkan jumlah anak usia 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan pada level PAUD di berbagai provinsi di Indonesia. Keterangan warna merah menunjukkan jumlah anak usia 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan di level PAUD dengan kategori rendah, sementara warna biru menunjukkan jumlah anak usia 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan di level PAUD dengan kategori tinggi. Provinsi dengan populasi anak usia dini yang besar ada di Pulau Jawa. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketersediaan lembaga PAUD yang lebih banyak dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

Apabila dibandingkan dengan peta jumlah anak usia 5-6 tahun secara keseluruhan, tampak bahwa tidak semua anak usia dini (usia 5-6 tahun) di setiap provinsi mengikuti pendidikan di level PAUD. Beberapa daerah yang memiliki populasi anak usia 4-5 tahun tinggi namun ternyata tidak memiliki jumlah peserta didik PAUD yang sebanding. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbatasan akses untuk mengikuti pendidikan di PAUD, keterbatasan fasilitas dan biaya pendidikan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan orang tua untuk mengirimkan anaknya ke PAUD. Daerah dengan



jumlah anak usia 5-6 tahun yang tinggi tetapi tingkat partisipasi pada PAUD tergolong rendah memerlukan kebijakan khusus untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

Berikut adalah diagram batang yang menampilkan jumlah APS usia 5-6 tahun di berbagai provinsi di Indonesia.



Gambar 2. 6. Data Jumlah Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Usia 5 - 6 Tahun

Gambar 2.6. menunjukkan data APS untuk kelompok usia 5-6 tahun di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa APS menggambarkan persentase anak usia dini yang berpartisipasi atau terdaftar dalam layanan pendidikan pada rentang usia tersebut. Secara umum, grafik di atas memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara sejumlah provinsi dalam hal partisipasi pendidikan anak usia dini.

Provinsi dengan APS tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan persentase sebesar 89,76%, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (86,29%), Provinsi Sulawesi Barat (86,26%), dan beberapa provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Gorontalo, dan Jawa Tengah yang semuanya memiliki APS di atas 85%. Hal ini menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi tersebut, kesadaran dan akses terhadap pendidikan anak usia dini tergolong tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan APS terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan



persentase sebesar 8,28%, disusul oleh Provinsi Papua Tengah (22,33%), dan Provinsi Papua Selatan (43,17%). Provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua dan sekitarnya, umumnya memiliki APS yang jauh lebih rendah dibandingkan provinsi di wilayah barat dan tengah. Rendahnya APS ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses geografis yang sulit, jumlah lembaga PAUD yang terbatas, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk anak usia dini.

Perbedaan yang cukup signifikan di antara sejumlah provinsi tersebut di atas menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia bukan hanya soal jumlah lembaga PAUD, tetapi juga tentang akses dan pemerataan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di level PAUD. Untuk meningkatkan angka partisipasi, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung penyediaan PAUD berkualitas, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Langkah-langkah seperti membangun lebih banyak PAUD, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat, khususnya anak-anak usia tertentu, dalam mengikuti pendidikan pada level PAUD di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menegaskan bahwa ketimpangan akses dan partisipasi pada pendidikan anak usia dini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada daerah-daerah dengan APS rendah, baik melalui pembangunan fasilitas PAUD, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk usia dini. Tujuan dari hal tersebut adalah agar semua anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini.

Apabila antara data jumlah anak usia 5-6 tahun dan jumlah anak usia dini yang mengikuti pendidikan di PAUD dibandingkan, tampak bahwa belum semua anak usia dini mendapatkan akses pendidikan. Meskipun terdapat provinsi dengan jumlah anak usia dini yang relatif besar, namun tingkat partisipasi mereka dalam mengikuti pendidikan di level PAUD belum tentu tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini di sebagian wilayah Indonesia. Informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah dengan APS rendah. Dengan memperbaiki berbagai keterbatasan, menyediakan lebih banyak fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, diharapkan lebih banyak lagi anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar di level PAUD.

Oleh karena terdapat kesenjangan tersebut, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus mendorong kemudahan akses masyarakat dan pemerataan jumlah PAUD. Upaya seperti membangun lebih banyak PAUD di daerah terpencil, memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang mau bertugas di wilayah tertinggal, dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat dapat menjadi langkah nyata yang efektif. Apabila hal ini dilakukan secara berkelanjutan, maka sangat mungkin angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan di level PAUD di seluruh Indonesia dapat meningkat, sehingga semakin banyak anak usia semestinya (usia 5-6 tahun) yang



mendapatkan pendidikan di level PAUD. Di bawah ini adalah peta sebaran anak usia 5-6 tahun yang telah dan sedang mengikuti pendidikan di level PAUD.

Kesenjangan partisipasi anak juga dapat dilihat dari aspek gender. Table dibawah memperlihatkan jumlah anak laki-laki yang mengikuti PAUD lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Sebanyak 51.43% anak laki-laki memiliki akses ke PAUD, dibandingkan anak perempuan yang hanya mencapai 48.57% sumber: Dapodik, 2025.

Data terpilah berbasis Jenis Kelamin

Kategori	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	Laki-laki%	Perempuan	Perempuan%	
Peserta Didik	3,357,778	51,43%	3,171,432	48,57%	6,529,210

2.2. Mutu

Pendidikan di level PAUD sangat krusial dalam membangun fondasi perkembangan anak secara holistik, yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Mutu PAUD yang baik dapat meningkatkan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya serta mendukung perkembangan karakter sejak dini. Untuk memastikan layanan PAUD yang optimal, berbagai faktor perlu diperhatikan, termasuk mutu tenaga pendidik dan kependidikan (PTK), mutu sarana dan prasarana, dan mutu pembelajaran. Didalam bab ini pembahasan mengenai masalah dan tantangan yang terkait mutu difokuskan kepada isu terkait status akreditasi, tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, dan implementasi PAUD HI.

2.2.1. Status Akreditasi

Status akreditasi PAUD menjadi tolok ukur standar mutu pendidikan yang mencakup kurikulum dan pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta tata kelola kelembagaan. PAUD dengan akreditasi yang tinggi cenderung telah melaksanakan pembelajaran yang efektif, sedangkan PAUD dengan akreditasi yang lebih rendah atau belum terakreditasi lazimnya masih ada kesenjangan terkait mutu pembelajaran yang belum terstandar. Ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam memastikan akses terhadap PAUD yang bermutu di seluruh wilayah secara merata dan berkeadilan. Berikut adalah gambaran status akreditasi PAUD di Indonesia.

Berdasarkan diagram pada Gambar 2.7. terlihat bahwa sebagian besar satuan PAUD di Indonesia berada pada kategori akreditasi B, dengan persentase sebesar 48,66%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari lembaga PAUD telah memenuhi standar mutu yang baik sesuai dengan kriteria akreditasi nasional. Sementara itu, sebanyak 32,63% satuan PAUD terakreditasi C yang mencerminkan bahwa masih terdapat proporsi yang cukup besar dari lembaga-lembaga PAUD dengan mutu layanan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat 10,49% satuan PAUD yang belum mengisi data akreditasi. Hal tersebut



diduga karena adanya kendala dalam pelaporan atau pendataan status akreditasi tersebut. Hanya 6,21% satuan PAUD yang berhasil meraih akreditasi A yang merupakan kategori tertinggi dan mencerminkan mutu layanan pendidikan yang sangat baik. Di sisi lain, masih terdapat 2,00% satuan PAUD belum terakreditasi yang menunjukkan adanya sejumlah lembaga PAUD yang belum terintegrasi ke dalam sistem penjaminan mutu pendidikan secara formal. Secara keseluruhan, data pada diagram batang tersebut di atas mengilustrasikan

Gambar 2. 7. Data Akreditasi PAUD di Indonesia

bahwa meskipun sebagian besar lembaga PAUD telah terakreditasi, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi mutu di antara satu lembaga PAUD dengan lembaga PAUD lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan PAUD yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan strategi peningkatan mutu PAUD yang menyeluruh, termasuk pembinaan, pendampingan, dan pemenuhan standar bagi satuan-satuan PAUD yang belum atau baru mencapai akreditasi dasar.

Apabila dirinci berdasarkan jenis layanan, terdapat perbedaan capaian akreditasi: Taman Kanak-kanak (TK) memiliki persentase tertinggi dengan 70% yang terakreditasi minimal B, diikuti oleh Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar 58%, Kelompok Bermain (KB) 41%, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) hanya 41%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa program yang lebih mapan seperti TK dan TPA cenderung lebih siap dalam hal tata kelola dan mutu layanan dibandingkan program lain. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus untuk mendorong akreditasi pada satuan-satuan yang masih tertinggal, khususnya KB dan SPS.

2.2.2. Kualitas Pembelajaran

Berdasarkan keseluruhan satuan PAUD, hanya 29,39% atau sekitar 59 ribu yang menyediakan pembelajaran yang secara aktif membangun kemampuan fondasi anak. Kemampuan fondasi ini mencakup enam aspek penting, yaitu agama dan budi pekerti, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan kognitif. Satuan PAUD yang masuk dalam kategori ini tergolong baik dalam Rapor Pendidikan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menyeluruh dan seimbang sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Namun demikian, angka tersebut masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan total



jumlah satuan PAUD yang ada. Hal ini menunjukkan banyak satuan PAUD yang belum optimal dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi lebih lanjut melalui pendampingan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta monitoring dan evaluasi berkala agar seluruh PAUD dapat menjamin pengembangan kemampuan fondasi anak secara merata dan berkualitas.

Selain kemampuan fondasi, kemampuan literasi dasar anak juga merupakan hal penting yang harus dikembangkan sejak usia dini. Data menunjukkan sebanyak 11% atau sekitar 22 ribu satuan PAUD termasuk kategori rendah dalam hal kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam membina kemampuan literasi dasar anak. Literasi dasar merupakan komponen penting yang menjadi landasan keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, termasuk dalam aspek mengenal huruf, angka, kosakata dasar, dan kemampuan memahami cerita sederhana. Lemahnya kemampuan PTK dalam mendukung literasi dasar dapat berdampak pada kesenjangan belajar anak sejak dini.

Faktor penyebab rendahnya kompetensi ini antara lain adalah terbatasnya pelatihan profesional yang berkelanjutan, kurangnya bahan ajar yang kontekstual, serta keterbatasan dukungan dari lingkungan belajar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan literasi berbasis praktik, penyediaan sumber belajar yang ramah anak, serta supervisi akademik yang mendorong praktik reflektif di lapangan. Peningkatan kapasitas pendidik dalam hal ini sangat krusial untuk memperkuat fondasi literasi anak secara menyeluruh.

Untuk stimulasi kemampuan fondasi anak agar dapat berjalan secara optimal diperlukan pendidikan dan pengasuhan yang positif. Sayangnya, masih terdapat 6% atau sekitar 12 ribu satuan PAUD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang menyatakan setuju dengan penggunaan hukuman fisik. Hal ini merupakan temuan yang mengkhawatirkan, mengingat pendekatan kekerasan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pendidikan yang ramah serta suportif. Walau bagaimanapun, hukuman fisik berisiko menimbulkan trauma dan menghambat perkembangan emosional dan sosial anak.

Kondisi tersebut di atas mencerminkan masih adanya pemahaman yang keliru terkait praktik disiplin di lingkungan PAUD. Oleh karena itu, perlu penguatan literasi terhadap pendekatan disiplin positif melalui pelatihan, sosialisasi kebijakan perlindungan anak, serta pengawasan yang ketat dari otoritas pendidikan dan masyarakat. Perubahan paradigma dari hukuman menjadi pembinaan yang empatik adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Guru memerlukan penguatan materi pemenuhan hak anak agar dapat terhindar dari melakukan kekerasan kepada anak.

Pembelajaran dan kegiatan di PAUD seringkali masih terfokus kepada pembelajaran untuk kognitif saja. Pengembangan sosial emosional masih belum menjadi prioritas. Karenanya diperlukan upaya untuk menintegrasikan pembelajaran kognitif dan sosial emosional.

2.2.3. Kualifikasi PTK PAUD

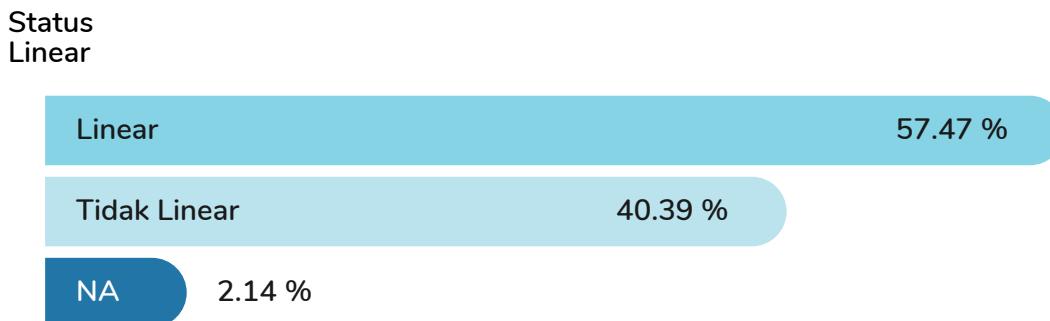
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD di Indonesia saat ini mencapai 628.155 orang. Namun, hanya 49,8% dari jumlah tersebut yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1). Hal ini berarti bahwa lebih dari separuh PTK belum memenuhi standar pendidikan yang ideal sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta peraturan pelaksanaan di bidang PAUD.

Berikut adalah diagram yang menampilkan jumlah pendidik PAUD di Indonesia berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir yang ditempuh.



Gambar 2. 8. Data Status Ijazah Pendidik PAUD di Indonesia

Berdasarkan Gambar 2.8., proporsi pendidik PAUD yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) mencapai 52,994%, sedangkan 47,006% lainnya belum menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.



Gambar 2. 9. Data Status Linear Pendidik PAUD di Indonesia

Berdasarkan Gambar 2.9. yang ditampilkan, diketahui bahwa dari keseluruhan pendidik PAUD yang telah menyelesaikan pendidikan S1, hanya 57,47% yang memiliki latar belakang pendidikan yang linear (LI) dengan bidang ke-PAUD-an. Sementara itu, sebanyak 40,39% berasal dari jurusan yang tidak linear (TL), dan 2,14% tidak memiliki data atau tidak diketahui latar belakang pendidikannya (NA). Berdasarkan diagram batang yang ditampilkan, diketahui bahwa dari keseluruhan pendidik PAUD yang telah menyelesaikan pendidikan S1, hanya 57,47% yang memiliki latar belakang pendidikan yang linear (LI) dengan bidang ke-PAUD-an. Sementara itu, sebanyak 40,39% berasal dari jurusan yang tidak linear (TL), dan 2,14% tidak memiliki data atau tidak diketahui latar belakang pendidikannya (NA). Meskipun pada diagram sebelumnya ditunjukkan bahwa mayoritas pendidik PAUD telah menyelesaikan pendidikan S1, data ini memperlihatkan bahwa tidak semua lulusan S1 tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang relevan atau sesuai (linear) dengan bidang pendidikan anak usia dini.



Dengan kata lain, hanya sekitar separuh dari pendidik PAUD secara keseluruhan yang benar-benar memiliki kompetensi akademik yang selaras dengan tuntutan profesinya. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam peningkatan mutu pendidik PAUD, yakni pentingnya kesesuaian antara bidang studi yang ditempuh dengan profesi yang dijalani. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidik tidak hanya mendorong pendidik PAUD untuk menyelesaikan pendidikan S1, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan kompetensi di bidang PAUD.

Isu lain yang terkait dengan tenaga pendidik adalah masih kuatnya persepsi yang menganggap bahwa PAUD identik dengan pekerjaan perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini, mayoritas guru PAUD adalah perempuan. Rendahnya partisipasi laki-laki untuk menjadi guru PAUD tentunya merupakan hambatan bagi pencapaian Sustainable Development Goals No 5 mengenai kesetaraan gender. Selain itu kurangnya guru laki-laki di PAUD hanya akan memperkuat stereotype bahwa pengasuhan hanyalah tugas dari perempuan saja.

Data Terpilah Jumlah Guru PAUD dilihat dari Jenis Kelamin

Kategori	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	Laki-laki%	Perempuan	Perempuan%	
Guru + Tendik	43,003	5,84%	693,507	94,14%	736,510

(Sumber: Dapodik, 2025)

2.2.4. Penyediaan Layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)

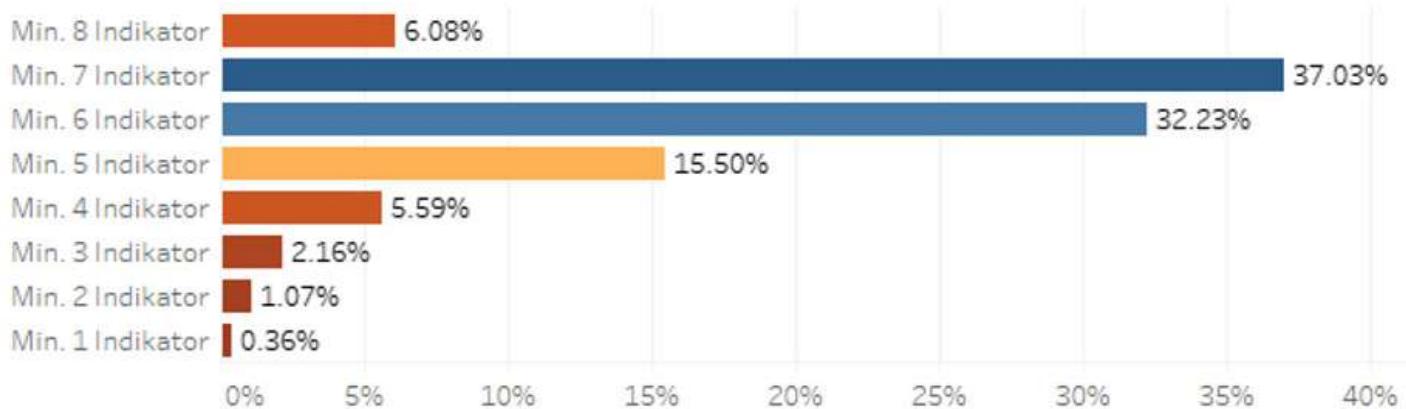
Sebanyak 78,18% atau lebih dari 152 ribu satuan PAUD telah menyediakan layanan holistik integratif (PAUD HI), yaitu layanan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak dan keluarganya. PAUD HI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak secara menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai sektor, sehingga mendorong tumbuh kembang optimal sejak dini. Satuan PAUD yang masuk dalam kategori ini telah memenuhi minimal 6 (enam) dari 8 (delapan) indikator yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen dan mitra lintas sektor.

Meskipun capaian tersebut di atas terlihat menjanjikan secara kuantitatif, namun Rapor Pendidikan menunjukkan sebagian besar satuan PAUD HI masih berada dalam kategori sedang. Artinya, meskipun cakupan layanan sudah meluas, namun kualitas pelaksanaan dan integrasi layanan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perlu peningkatan koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial) dan penguatan kapasitas satuan PAUD dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan secara berkelanjutan.

Merujuk pada gagasan PAUD HI, setiap satuan PAUD harus memenuhi minimal 7 dari 8

(delapan) indikator utama, yaitu:

1. Kelas orang tua sebagai wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak;
2. Pemantauan pertumbuhan anak;
3. Pemantauan perkembangan anak;
4. Koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan anak;
5. Praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pembiasaan;
6. Pemberian makanan tambahan (PMT) dan/atau makanan bergizi secara berkala;
7. Pemantauan terhadap kepemilikan identitas (NIK) peserta didik; dan
8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai.



Gambar 2. 10. Persentase Ketercapaian Indikator Utama PAUD HI

Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD telah berada pada jalur yang cukup baik dalam memenuhi standar layanan holistik integratif, dengan hampir 70% satuan PAUD telah memenuhi setidaknya 6 (enam) indikator. Hal ini menggambarkan kemajuan dalam implementasi pendekatan PAUD HI yang menekankan pada layanan menyeluruh bagi anak.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah satuan PAUD yang belum memenuhi indikator secara optimal. Ini mencerminkan adanya tantangan dalam pemerataan kualitas layanan PAUD, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, pemahaman, atau dukungan lintas sektor di daerah tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan peningkatan kualitas layanan PAUD HI di Indonesia, sehingga tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah satuan, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan.



81.12%

Satuan PAUD yang Menyediakan Layanan **Holistik Integratif (PAUD HI)**



TK : KB : SPS : TPA =

70 : 41 : 41 : 58

(persentase akreditasi minimal B)

34.30%

Satuan PAUD Memfasilitasi **Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi**



628.155

Jumlah PTK PAUD



52,99%

Tenaga pendidik memiliki ijazah S1/D4

6%

Satuan PAUD Memiliki PTK yang Menyatakan **Setuju dengan Hukuman Fisik**



57.47%

Tenaga Pendidik Sesuai Kualifikasi



19,67%

Tenaga Pendidik Sudah Sertifikasi

Gambar 2. 11. Data kondisi mutu PAUD di Indonesia

Pemenuhan lima hak anak dalam kerangka PAUD HI merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh secara optimal. Selain itu, pemenuhan hak anak juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi PBB akan Hak Anak (*United Nations Convention of the Right of Children*).

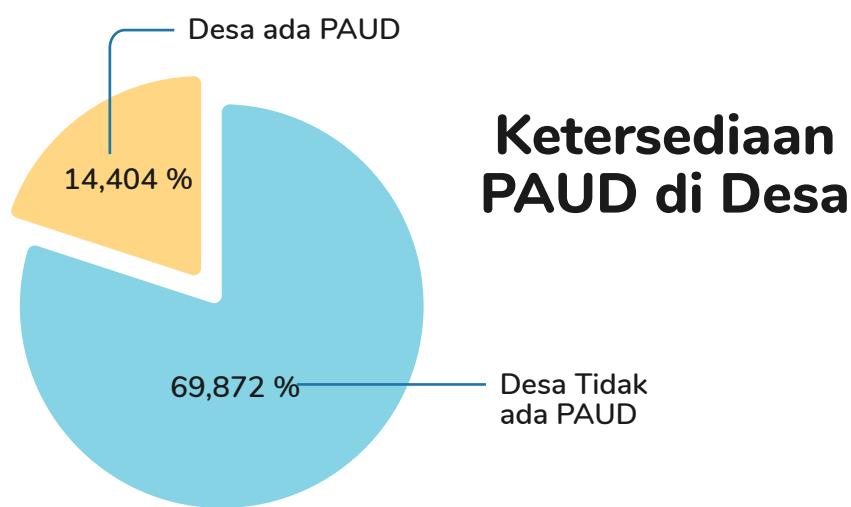
2.3. Tata Kelola

Tata kelola pendidikan merupakan sistem pengelolaan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidikan untuk usia dini (PAUD) termasuk di dalamnya. Tata kelola pendidikan, dalam hal ini pada satuan PAUD, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan dan masyarakat secara umum. Berikut adalah penjelasan terkait dengan beberapa aspek penting dalam tata kelola pendidikan PAUD.

2.3.1. Penataan Kelembagaan-Perizinan

Penataan kelembagaan dan perizinan PAUD bertujuan untuk memastikan bahwa semua satuan PAUD memenuhi standar kualitas pendidikan secara nasional. Berdasarkan statusnya, PAUD dapat berstatus negeri (dikelola oleh pemerintah) atau berstatus swasta (dikelola oleh perorangan atau yayasan). Meskipun banyak PAUD yang telah memiliki izin operasional,

namun faktanya masih terdapat satuan PAUD yang berstatus tidak berizin, terutama di daerah terpencil. Hal ini merupakan tantangan dalam menjamin standar kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem perizinan dan pengawasan agar semua satuan PAUD memenuhi standar kualitas pendidikan, baik pada aspek kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum yang digunakan, maupun sarana prasarana yang tersedia. Berikut adalah data terkait ketersediaan PAUD pada tingkat desa di Indonesia.

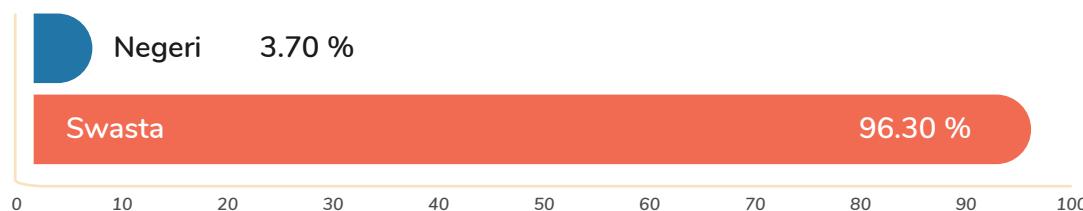


Gambar 2. 12. Persentase Ketersediaan PAUD di Desa

Berdasarkan Gambar 2.12, tercatat sebanyak 84.276 desa di Indonesia dengan rincian: 82.91% (69.872 desa) telah memiliki satuan PAUD dan 17,09% (14.404 desa) belum memiliki satuan PAUD. Data yang menunjukkan bahwa sebanyak 69.872 telah memiliki satuan PAUD menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penyediaan akses untuk PAUD telah tercapai di sebagian besar wilayah, terutama di daerah yang mudah dijangkau.

Sementara, data yang menunjukkan bahwa sebanyak 16.581 desa belum memiliki satuan PAUD menandakan masih ada masalah terkait ketersediaan akses untuk PAUD. Hal tersebut kemungkinan terjadi di daerah terpencil, area perbatasan, atau di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Sebagai konsekuensinya, desa yang belum memiliki PAUD berpotensi memiliki angka partisipasi PAUD yang rendah.

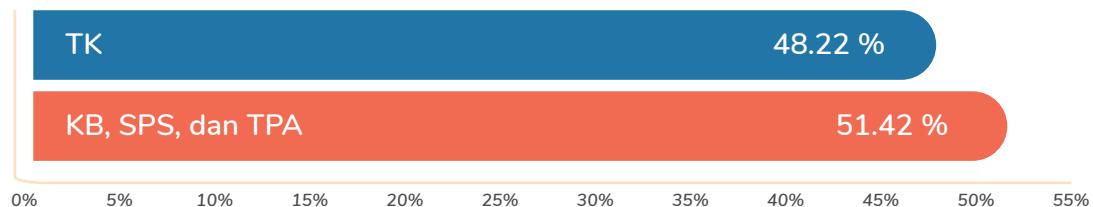
Anak-anak di desa tersebut sangat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan untuk anak usia dini sehingga berpotensi memengaruhi kesiapan mereka dalam memasuki jenjang sekolah dasar dan jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya.



Gambar 2. 13. Persentase PAUD Negeri dan Swasta di Indonesia



Berdasarkan diagram pada Gambar 2.13. di atas, distribusi satuan PAUD di Indonesia oleh lembaga swasta memiliki persentase sebesar 96,30%, sementara satuan PAUD negeri memiliki persentase sebesar 3,70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar layanan PAUD disediakan oleh lembaga swasta, baik berupa yayasan, komunitas, atau organisasi non-pemerintah lainnya.



Gambar 2. 14. Persentase TKKB, SPS, dan TPA di Indonesia

Lebih lanjut, berdasarkan data pada diagram di atas, tampak bahwa distribusi satuan PAUD antara yang bersifat formal dan non-formal menunjukkan keseimbangan yang cukup signifikan. PAUD formal merupakan pendidikan untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi dengan penerapan batasan usia dan lebih terstruktur, yakni untuk usia 4-6 tahun. Contoh PAUD formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Di TK maupun RA terkategorikan berdasarkan usia, kategori kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun, sedangkan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Kurikulum pada PAUD formal mengacu pada kurikulum resmi (pemerintah) yang bersifat baku dan terstandar. Sementara PAUD non-formal merupakan pendidikan untuk anak usia dini yang tidak terikat oleh kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, kurikulum pada PAUD non-formal lazim mengikuti kebijakan pengelolanya, baik yayasan, kelompok, individu, atau entitas lainnya. Contoh PAUD non formal adalah Kelompok Bermain (KB) atau *Play Group* dan Taman Penitipan Anak (TPA). Fokus PAUD non-formal lebih kepada menyiapkan kemampuan anak sebagai bentuk persiapan untuk melanjutkan ke TK maupun RA.

Berdasarkan data pada Gambar 2.16. di atas, PAUD formal memiliki persentase sebesar 51,60% dan PAUD non-formal dengan persentase sebesar 48,40%. Selisih yang tipis ini mengindikasikan bahwa kedua jenis satuan PAUD memainkan peran yang hampir setara dalam menyediakan layanan pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia. PAUD non-formal tetap menjadi pilihan utama terutama di daerah yang membutuhkan fleksibilitas atau memiliki akses terbatas terhadap layanan PAUD formal.

2.3.2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara umum terkait dengan bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal tersebut dijabarkan secara lebih luas sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencapai pemerintahan yang efektif tetapi efisien dalam hal kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Tujuan desentralisasi antara lain adalah untuk mencegah dominasi pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dan sebagai upaya demokratisasi pada pemerintah daerah yang mengikutsertakan aspirasi rakyat dalam tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien, dan

bertanggung jawab. Melalui kebijakan desentralisasi, pembangunan di daerah (otonom) menjadi lebih berkembang karena mereka diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi lebih maju dan berkualitas.

Walaupun kebijakan desentralisasi tujuannya baik, namun pada praktiknya terjadi beberapa ekses, salah satunya adalah pada bidang pendidikan, pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) tidak terkecuali. Dalam konteks PAUD, desentralisasi meliputi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berdasarkan wilayah kewenangan, yaitu pemerintah pusat (Direktorat PAUD), pemerintah provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), dan pemerintah kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).

1. Direktorat PAUD

Direktorat PAUD memiliki tupoksi: merumuskan kebijakan dan standar pendidikan; melaksanakan kebijakan penjaminan mutu; menyusun norma, standar, prosedur, kriteria, dan fasilitasi penyelenggaraan; memberikan bimbingan teknis dan supervisi; memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan program kegiatan; membuat laporan tentang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola; menilai proses pendidikan dan layanan khusus untuk anak usia dini; serta memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD yang dikelola oleh perwakilan negara asing atau lembaga asing. Dalam implementasinya, Direktorat PAUD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan dan standar nasional PAUD diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Namun pada praktiknya, penerapan kebijakan dan standar PAUD dari Direktorat PAUD seringkali tidak lancar karena pemerintah kabupaten/kota

2. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas pendidikan tingkat provinsi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program PAUD di tingkat provinsi. Tupoksi dinas pendidikan provinsi meliputi: penyusunan kebijakan dan program PAUD di tingkat provinsi; pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap satuan PAUD di wilayahnya; pemberian dukungan anggaran dan sumber daya untuk mendukung operasional satuan PAUD; dan koordinasi pelaksanaan program PAUD dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam implementasinya, dinas pendidikan tingkat provinsi bertugas memastikan bahwa program PAUD di wilayahnya berjalan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Pada praktiknya, dinas pendidikan provinsi berperan dalam mengawal capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, terutama indikator capaian SPM yang terkait dengan PAUD, dan memastikan pemenuhan capaian indikator PAUD dalam Dokrenda (RPJMD Kabupaten/Kota).

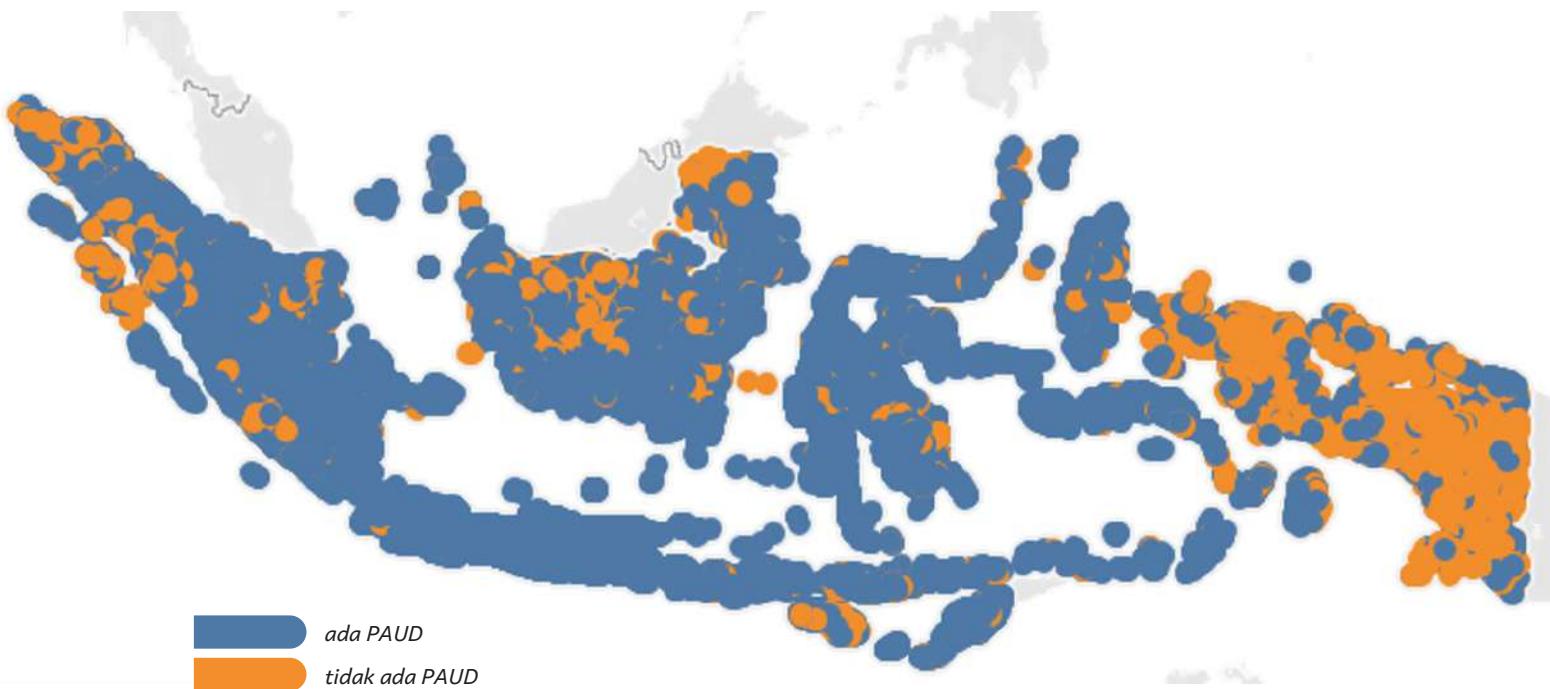
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam keterlaksanaan proses pendidikan pada PAUD di tingkat lokal (kabupaten/kota). Tupoksi dinas pendidikan kabupaten/kota meliputi: pendataan dan pemetaan satuan PAUD di wilayahnya; izin operasional dan pengawasan terhadap satuan PAUD; pembinaan dan peningkatan kualitas satuan PAUD; pengalokasian anggaran APBD untuk mendukung operasional PAUD; dan pemantauan atas semua desa/kelurahan di wilayahnya memiliki akses terhadap PAUD. Dalam implementasinya, dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab



dalam memastikan layanan PAUD tersedia secara merata dan berkualitas di seluruh wilayahnya. Namun pada prakteknya, meskipun pembinaan dan pengawasan PAUD merupakan salah satu tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan kerap kali tidak mudah. Salah satunya adalah karena lebih dari 95% PAUD di Indonesia, terutama di desa, dikelola oleh pihak swasta, baik berupa yayasan maupun perorangan, sehingga bagi PAUD yang bersangkutan “garis komando” dari pihak yayasan atau perorangan pengelola lebih dipatuhi daripada pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Berikut adalah data terkait sebaran desa berdasarkan ketersediaan PAUD di Indonesia per tahun 2025.



Gambar 2. 15. Sebaran desa berdasarkan status ketersediaan PAUD

Pada Gambar 2.15. desa yang sudah memiliki layanan PAUD ditandai dengan warna biru, sementara desa yang belum memiliki layanan PAUD ditandai dengan warna jingga. Berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa sebagian besar desa di wilayah barat dan tengah Indonesia, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan sebagian Pulau Kalimantan, sudah memiliki layanan PAUD. Sebaliknya, banyak desa di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih belum memiliki layanan PAUD. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap PAUD di Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sejalan dengan data APS usia 5-6 tahun yang menunjukkan bahwa sejumlah daerah di wilayah timur Indonesia cenderung memiliki angka partisipasi pada PAUD yang lebih rendah. Salah satu penyebabnya kemungkinan besar adalah karena belum tersedianya layanan PAUD di banyak desa tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD secara nasional, perlu dilakukan upaya strategis seperti pembangunan lembaga PAUD baru, pelatihan tenaga pendidik PAUD, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung akses terhadap layanan PAUD di desa-desa yang belum memiliki, terutama di kawasan Indonesia timur.



Sejumlah permasalahan terkait dengan layanan pendidikan pada level PAUD sebagai akibat adanya kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) antara lain adalah menyangkut permasalahan:

1. Sumber Daya Manusia dan Keuangan untuk Bidang Pendidikan

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Hal ini seringkali menyebabkan adanya kesulitan dalam penyediaan layanan PAUD berkualitas akibat adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

2. Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Meskipun kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan pada level PAUD termasuk di dalamnya.

3. Koordinasi dalam Bidang Pendidikan

Koordinasi adalah kegiatan kolaboratif dalam melaksanakan sebuah atau sejumlah kegiatan bersama, termasuk kegiatan dalam bidang pendidikan, pendidikan pada level PAUD adalah salah satunya. Sayangnya, akibat adanya kebijakan desentralisasi, kegiatan koordinasi dalam bidang pendidikan antar unit kerja di lingkungan kabupaten/kota menjadi terkendala, salah satunya adalah akibat adanya kepentingan masing-masing sektor/bidang kegiatan.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Banyak lembaga PAUD, terutama yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, mengalami masalah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Tempat untuk kegiatan belajar mengajar dan media pendukung pembelajaran adalah dua di antaranya. Akibat keterbatasan sarana dan prasarana, proses pembelajaran menjadi kurang optimal tercapai sehingga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik yang kurang maksimal.

5. Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan dalam pengelolaan PAUD seringkali mengalami kendala akibat keterbatasan dana, kurangnya kemampuan mengelola dana, dan kurang adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk dana. Hal tersebut berdampak terhadap keberlangsungan proses pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh sebagai wujud dari layanan PAUD.

6. Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini mulai meningkat, namun partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan dukungan terhadap keterlaksanaan lembaga PAUD masih rendah, terutama di daerah terpencil. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan merata.





2.3.3. Anggaran Satuan PAUD

Anggaran merupakan komponen penting dalam tata kelola pendidikan pada level PAUD. Alokasi anggaran dari berbagai tingkat pemerintahan digunakan untuk mendukung operasional dan peningkatan kualitas PAUD.

1. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk PAUD melalui program seperti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional satuan PAUD, termasuk pembayaran honor guru, pembelian alat pembelajaran, serta peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu dana dari pemerintah pusat juga ditransfer ke pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non-Fisik. Akan tetapi karena DAK ini tidak secara spesifik diperuntukkan untuk PAUD, kebermanfaatannya bagi PAUD sangat tergantung komitmen dari pemerintah daerah.

2. Alokasi anggaran dari pemerintah provinsi

Meskipun PAUD bukanlah tanggung jawab pemerintah provinsi, akan tetapi sejumlah pemerintah provinsi mengalokasikan dana peningkatan layanan PAUD, khususnya untuk program-program spesifik seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pembangunan infrastruktur PAUD. Hal ini sangatlah baik karena menunjukkan komitmen politik (*political will*) dari pemerintah provinsi. Namun demikian, pemerintah provinsi yang melakukan hal tersebut masih sangat terbatas, baik jumlah maupun nominal alokasinya. Oleh karena itu, regulasi terkait yang belum sesuai perlu diselaraskan dengan kebutuhan.

3. Alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten/kota

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana melalui APBD untuk memperluas akses layanan PAUD, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan keberlanjutan operasional satuan PAUD. Namun alokasi dana tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya karena masih berlandaskan pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota setempat, sehingga masih terdapat ketimpangan dalam alokasi anggaran antar kabupaten/kota.

Tabel berikut menggambarkan pengalokasian anggaran pendidikan untuk PAUD pada 11 kabupaten di Indonesia.

Tabel 2. 1. Anggaran PAUD pada 11 Kabupaten di Indonesia

No	Provinsi	Kab/Kota	% Anggaran PAUD
1	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	21.27 %
2	Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	19.49 %
3	Prov. Bali	Kab. Klungkung	18.50 %
4	Prov. Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	17.97 %
5	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	17.14 %

No	Provinsi	Kab/Kota	% Anggaran PAUD
6	Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	10.90 %
7	Prov. Jawa Timur	Kab. Pacitan	10.47 %
8	Prov. Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	10.43 %
9	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.25 %
10	Prov. Papua Pegunungan	Kab. Nduga	10.11 %
11	Prov. Papua Selatan	Kab. Asmat	9.77 %

Sumber data: Olah Data SIPD-RI Kemendagri 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.1., terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam pengalokasian anggaran PAUD di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan tertinggi dengan proporsi anggaran PAUD mencapai 21,27% dari total anggaran pendidikan untuk semua jenjang. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten daerah tersebut memberikan perhatian khusus terhadap layanan pendidikan anak usia dini. Selain itu, beberapa daerah lain mengalokasikan anggaran untuk layanan PAUD yang cukup memadai, di antaranya Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 19,49%; Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sebesar 18,50%; dan Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku mengalokasi anggaran sebesar 17,97%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada ketiga kabupaten memiliki kepedulian terhadap layanan PAUD.

Meskipun terdapat sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan dana yang cukup memadai untuk layanan PAUD, namun masih lebih banyak kabupaten lain yang belum melakukannya. Sekadar contoh, Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan “hanya” mengalokasikan dana sebesar 9,77% untuk layanan PAUD dari keseluruhan alokasi untuk bidang pendidikan. Disparitas pengalokasian dana untuk layanan PAUD ini mencerminkan tantangan dalam implementasi desentralisasi bidang pendidikan, di mana kebijakan dan prioritas anggaran sangat bergantung pada keputusan masing-masing pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya dorongan kebijakan nasional yang lebih kuat dan mengikat untuk kebijakan peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan pada level PAUD, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tanpa intervensi yang terstruktur dan terukur, ketimpangan dalam pengalokasian anggaran untuk layanan PAUD ini berpotensi memperbesar kesenjangan akses dan kualitas layanan PAUD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat komitmen terhadap layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.



BAB III

Strategi

Implementasi



3.1 Strategi Percepatan dan Perluasan

Implementasi strategi percepatan dan perluasan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ memerlukan perencanaan dan strategi yang matang untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara tepat. Paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi prioritas strategi. Pertama, strategi untuk meningkatkan akses anak terhadap layanan PAUD satu tahun prasekolah. Kedua, strategi untuk meningkatkan mutu layanan satuan PAUD. Ketiga, strategi yang terkait dengan tata kelola, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lintas sektoral mengingat kebijakan satu tahun prasekolah ini merupakan kebijakan yang menuntut kolaborasi dari berbagai pihak.

Secara filosofis dan teknis, strategi peningkatan akses dan strategi peningkatan mutu tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi dalam upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan yang bermutu sejak dini. Apabila akses diperluas namun tidak diiringi dengan peningkatan mutu, maka anak-anak dapat mendapatkan layanan PAUD, namun mereka tidak mendapatkan pengalaman belajar bermakna yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Sebaliknya, apabila layanan PAUD sudah bermutu tinggi namun hanya dapat diakses oleh sebagian kecil anak dari kelompok tertentu, maka akan terjadi ketimpangan yang justru memperbesar kesenjangan pendidikan sejak usia dini. Oleh karena itu, perluasan akses harus dibarengi dengan jaminan mutu, baik dari sisi proses pembelajaran, kompetensi pendidik, penyediaan layanan esensial, hingga pengelolaan yang berpihak pada kebutuhan anak.

Hal ini penting karena PAUD satu tahun prasekolah merupakan bagian dari kebijakan wajib belajar karena merupakan pondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan, khususnya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, pendekatan PAUD yang bersifat holistik-integratif menuntut agar layanan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mendukung kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh sebab itu, peningkatan akses dan peningkatan mutu bukan merupakan dua agenda yang terpisah, melainkan dua aspek yang harus dijalankan secara simultan dan terpadu demi memastikan keadilan, inklusivitas, dan kualitas layanan PAUD bagi seluruh anak Indonesia.

Namun demikian, meskipun secara prinsip akses dan mutu tidak dapat dipisahkan, dalam tataran program dan implementasi kebijakan, keduanya kadang-kadang perlu dipisahkan untuk tujuan perencanaan yang lebih terfokus, terarah, dan terukur. Pemisahan ini dilakukan bukan untuk memisahkan tujuannya, tetapi sebagai strategi pelaksanaan agar masing-masing aspek dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Misalnya, di wilayah dengan keterbatasan jumlah lembaga atau tenaga pendidik, program peningkatan akses menjadi prioritas awal agar anak-anak memiliki tempat belajar terlebih dahulu. Sementara, di wilayah yang sudah memiliki layanan PAUD secara luas, upaya peningkatan mutu melalui pelatihan pendidik, penguatan kurikulum, atau peningkatan sarana dapat lebih diutamakan.

Dengan memisahkan fokus intervensi secara strategis, kualitas layanan diharapkan lebih dijamin, karena masing-masing program dirancang dengan pendekatan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pemisahan dalam perencanaan program dilakukan bukan untuk memisahkan tujuan, melainkan untuk memastikan bahwa baik akses maupun mutu dapat terpenuhi secara maksimal dan berkelanjutan sesuai konteks lokal.

3.1.1. Strategi Perluasan Akses

Strategi perluasan akses dan peningkatan mutu kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' harus memprioritaskan pengembangan PAUD, khususnya di desa, karena beberapa alasan yang sangat strategis dan kontekstual, terutama menyangkut aspek pemerataan, keadilan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Paling tidak terdapat 6 (enam) alasan mengapa desa perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Alasan pertama, kesenjangan akses di antara desa dan kota masih cukup tinggi. Data dari berbagai studi dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa akses layanan PAUD di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Di samping itu, banyak desa yang belum memiliki satuan PAUD yang memadai, baik dari sisi jumlah, jangkauan geografis, maupun keterjangkauan biaya. Alasan kedua, tingkat partisipasi PAUD di desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan di kota. Anak-anak usia 5-6 tahun di desa lebih sedikit yang mengikuti program PAUD dibandingkan dengan anak-anak di kota. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, kesadaran orang tua, hingga keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik.

Alasan ketiga, terkait dengan belum terstandarisasinya kondisi PAUD di desa. Banyak lembaga PAUD di desa yang belum memenuhi standar minimum layanan PAUD, seperti rasio pendidik-peserta didik yang belum ideal, kualitas pembelajaran yang masih seadanya, serta fasilitas yang terbatas dan belum terpenuhinya layanan esensial anak. Disamping itu, pendekatan yang holistik-integratif belum diterapkan karena keterbatasan kapasitas dan dukungan lintas sektor. Alasan keempat, terkait dengan dampak negatif yang dapat dihasilkan apabila pengembangan PAUD satu tahun prasekolah tidak dimulai dari desa. Jika anak-anak di desa tidak mendapatkan stimulasi dan pendidikan dini yang memadai, maka ketimpangan dalam kesiapan anak memasuki jenjang SD akan terus berlanjut. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan jangka panjang dalam kualitas pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi, hingga kesiapan kerja dan produktivitas sumber daya di masa yang akan datang. Selain itu, hal ini juga dapat memperbesar ketimpangan di antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar di antara kedua wilayah tersebut.

Data dari Direktorat PAUD, Kemendikdasmen menunjukkan bahwa dari 69.872 desa yang ada di Indonesia, masih terdapat sekitar 14.404 desa yang sama sekali tidak memiliki PAUD. Data tersebut dapat dilihat pada tautan berikut: <https://s.id/paudindonesia>. Hal ini semakin memperkuat pentingnya menjadikan desa sebagai prioritas utama dalam kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'.

Selain memperhatikan jumlah desa yang belum memiliki PAUD, penting juga untuk memperhatikan jumlah populasi anak usia dini yang ada di setiap desa. Hal ini untuk memastikan bahwa penyediaan layanan PAUD di setiap desa akan terjaga keberlangsungannya, sehingga investasi yang sudah dialokasikan untuk mengembangkan PAUD menjadi tepat sasaran.



Tabel 3.1 Jumlah populasi Anak Usia Dini ditinjau dari kondisi Desa

Kondisi Desa	Ada Populasi Anak Usia Dini	Tidak Ada Populasi Anak Usia Dini
Terdapat PAUD Formal	47.206 (56.02%)	1.611 (1.91%)
Hanya terdapat PAUD non-formal	15.946 (18.92%)	634 (0.75%)
Tidak ada PAUD/sejenis	11.116 (13.19%)	7.758 (9.21%)

Sumber: Hasil olahan Data Pokok Pendidikan (2023) dan Data Penduduk Desa Dukcapil (2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, perlu untuk diperhatikan bahwa perluasan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah haruslah bersifat inklusif sehingga anak-anak berkebutuhan khusus pun terlayani. Sebagai catatan, saat ini di Indonesia terdapat 973.351 anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Mark Tomlinson dan Profesor James Radner (2024) bahwa negara memiliki kewajiban penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan PAUD yang berkualitas. Hal ini merupakan perwujudan dari pengakuan negara atas hak dasar anak.

Perluasan akses harus juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari anak-anak penyandang kebutuhan khusus. Saat ini salah satu persoalan terkait anak-anak berkebutuhan khusus adalah tidak adanya data yang valid dan reliabel mengenai jumlah anak-anak ini. Sehingga hal paling mendasar yang perlu dilakukan adalah melakukan pendataan jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sehingga pemerintah daerah dan satuan dapat mengembangkan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan satu tahun prasekolah. Lima strategi tersebut adalah:

1. Layanan PAUD-SD Satu Atap

PAUD-SD Satu Atap adalah penyelenggaraan PAUD dengan layanan PAUD yang berada dalam satu lokasi dengan SD yang dikelola secara terpadu. Kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' dalam layanan PAUD-SD Satu Atap merupakan strategi penting dalam memperkuat masa transisi anak usia dini menuju jenjang sekolah dasar secara lebih terencana dan menyenangkan. Lebih lanjut, pengembangan layanan PAUD-SD Satu Atap telah menjadi salah satu unsur penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045).



Secara kajian akademis, layanan PAUD-SD Satu Atap merupakan sebuah program yang dapat dilakukan. Berbagai definisi dari perspektif ilmu Psikologi Perkembangan menjelaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia dari sejak dilahirkan sampai dengan 8 tahun. Definisi yang sama juga diadopsi oleh berbagai dokumen global yang dikeluarkan diantaranya oleh UNESCO, UNICEF, dan WHO. Bahkan dalam kerangka *Nurturing Care Framework* yang dikeluarkan oleh WHO, layanan PAUD sesungguhnya perlu dimulai sejak anak berada dalam kandungan.

Layanan PAUD-SD Satu Atap bertujuan memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang memadai sebelum mereka masuk ke jenjang SD, khususnya di daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses dan layanan PAUD. Melalui layanan PAUD-SD Satu Atap, anak-anak dapat mengikuti pendidikan pada level PAUD di dalam lingkungan sebuah SD, sehingga memperkecil jarak psikologis dan fisik antara kedua jenjang pendidikan tersebut. Di samping itu, layanan ini juga memerlukan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan layanan PAUD regular.

Meskipun demikian, untuk mengimplementasikan layanan PAUD-SD Satu Atap, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pusat

Agar Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan strategi ini maka diperlukan penguatan regulasi di tingkat pusat yang mengatur hal ini, khususnya yang terkait dengan status guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini telah terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru yang memberikan ruang bagi guru untuk mengajar di satuan pendidikan lain apabila ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, Kepala Satuan atau Kepala Yayasan. Hal ini dapat menjadi landasan bagi guru SD kelas awal untuk dapat mengajar di satuan PAUD, khususnya dalam program PAUD-SD Satu Atap. Hal ini akan menjamin bahwa kepala sekolah yang ditugaskan menjadi Plt kepala sekolah TK dan guru SD kelas rendah yang mengajar di PAUD tidak akan kehilangan hak mereka atas tunjangan sertifikasi karena tugas mereka mengajar di PAUD tetap linier dengan tugas utama mereka selaku guru SD. Peraturan Menteri ini dapat diikuti dengan pembuatan Peraturan Direktur Jenderal yang dapat memberikan arahan lebih lanjut mengenai program PAUD-SD Satu Atap. Pemerintah Pusat juga dapat mengembangkan Petunjuk Teknis untuk panduan implementasi bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten.

b. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Daerah

Perlu dilakukan penguatan regulasi dan kebijakan daerah yang dapat mendorong lahirnya payung hukum penyelenggaraan layanan PAUD-SD Satu Atap. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat merumuskan peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang mengatur tentang standar layanan, kurikulum transisi, hingga pola pendanaan untuk mendukung keterlaksanaan dan keberlanjutan layanan ini. Konsekuensi dari adanya layanan ini harus menegaskan penghapusan terhadap adanya syarat kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dalam penerimaan peserta didik baru di jenjang SD, sekaligus mengatur tentang penguatan kesiapan belajar anak sebagai prioritas utama. Selain itu, pemerintah pusat dapat mengembangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat membantu pemerintah daerah melaksanakan layanan ini.



Secara lebih spesifik, regulasi dan kebijakan daerah ini mengatur prosedur penempatan guru yang akan mengajar di layanan PAUD-SD Satu Atap ini. Selain itu, kebijakan ini juga menjelaskan mekanisme kepemimpinan kepala PAUD dan kepala SD di dalam sebuah lingkungan pendidikan yang mengimplementasikan sebuah layanan yang membuka pilihan apakah kepala PAUD dapat dirangkap oleh kepala SD atau masing-masing level dipimpin oleh seorang pimpinan (kepala) yang berbeda. Pilihan pertama memungkinkan penyelenggaraan pendidikan lebih efektif, karena kedua level, baik PAUD maupun SD, dipimpin oleh seorang kepala, sehingga kesinambungan proses pendidikan dapat lebih terjaga, terutama pada masa transisi dari dunia PAUD ke dunia SD. Terkait dengan pilihan ini, secara administratif status kepala SD bersifat definitif, sementara status kepala PAUD sebagai pelaksana tugas (plt).

c. Integrasi Kurikulum dan Pendekatan Pembelajaran PAUD-SD

Kurikulum yang terintegrasi untuk PAUD dan kelas awal SD perlu disusun untuk menghubungkan capaian pembelajaran PAUD dengan fase awal SD secara holistik. Pendekatan pembelajaran berbasis bermain, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional menjadi kunci utama. Dalam skema ini, SD wajib memastikan bahwa proses belajar mengajar di kelas awal tidak semata-mata menekankan pada aspek akademik semata, tetapi juga mendukung proses transisi dan adaptasi anak secara menyeluruh. Selain itu, proses integrasi ini perlu menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD dengan berfokus pada penguatan karakter, kecakapan sosial-emosional, dan keterampilan dasar literasi-numerasi secara kontekstual. Di samping itu, perlu diperhatikan juga strategi PAUD-SD Satu Atap yang berangkat dari konsep perlu adanya "jembatan" transisi di antara PAUD dan SD. Oleh karena itu, langkah ini bukan hanya terbatas pada PAUD dan SD yang dikelola oleh Kemendikdasmen saja, tetapi juga dapat dilakukan untuk jenjang pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam bentuk RA-MI Satu Atap.

d. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Untuk menguatkan kapasitasnya, guru PAUD dan guru kelas awal SD harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait transisi usia belajar anak, metode pembelajaran ramah anak yang menstimulasi kemampuan dasar anak, serta asesmen yang sifatnya non-testing untuk memantau capaian perkembangan dan pembelajaran anak. Melalui pelatihan bersama dan forum kolaborasi, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara pendidik pada kedua jenjang, PAUD dan SD, dalam merancang dan melaksanakan proses belajar yang terintegrasi. Selain itu integrasi dan penyelarasan kurikulum di tingkat LPTK khususnya prodi PGPAUD dan PGSD juga menjadi penting untuk dilakukan.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Integrasi Layanan

Demi mendukung integrasi layanan, fasilitas sekolah harus dirancang ramah anak. Salah satu wujudnya ditandai dengan area bermain yang memadai serta ruang belajar yang nyaman bagi anak. Selain itu, perlu pula dipersiapkan alat permainan edukatif (APE) dan area *outdoor*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga anak merasa betah dan siap mengikuti proses pembelajaran.



f. **Penguatan Peran Aktif Orang Tua dan Komunitas.**

Untuk mengoptimalkan hasil belajar di PAUD, orang tua harus dilibatkan dalam program pendidikan keluarga agar mereka memahami pentingnya kesiapan belajar anak dan transisi pendidikan dari PAUD menuju SD. Di samping itu, komite sekolah dan pemerintah desa, sebagai bagian dari komunitas, diharapkan turut terlibat dalam mendukung program ini, termasuk mendorong alokasi anggaran dari dana desa untuk memperkuat layanan transisi di sekolah.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, terdapat beberapa kriteria yang juga harus dipahami ketika akan mengembangkan program PAUD-SD Satu Atap. PAUD dan SD yang diikutsertakan dalam program PAUD-SD Satu Atap diharapkan dapat memperluas akses layanan PAUD di daerah yang belum terjangkau. Secara umum, program PAUD-SD Satu Atap dilaksanakan di desa yang tidak memiliki layanan PAUD seperti Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Kelompok Bermain (KB). Selain itu, pengembangan program PAUD-SD Satu Atap wajib dilaksanakan pada SD Negeri agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Pemilihan SD sebagai lokasi pelaksanaan program PAUD-SD Satu Atap seyogianya mempertimbangkan situasi kelebihan tenaga pendidik sehingga mereka dapat diberdayakan untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di satuan pendidikan tersebut.

Program PAUD-SD Satu Atap diprioritaskan untuk dikembangkan di sekolah negeri karena lembaga pendidikan negeri memiliki jangkauan yang lebih luas dan berada di bawah kendali langsung pemerintah, sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan kebijakan nasional. Sekolah negeri umumnya tersebar hingga ke wilayah terpencil dan pedesaan, yang sering kali menjadi daerah dengan keterbatasan akses layanan PAUD. Dengan memanfaatkan keberadaan SD negeri, penyelenggaraan layanan PAUD dapat dilakukan secara lebih efisien karena meminimalkan kebutuhan pembangunan infrastruktur baru dan memaksimalkan sarana prasarana yang sudah ada. Selain itu, pengelolaan sekolah negeri yang berada di bawah dinas pendidikan memastikan adanya standar mutu, pengawasan, dan keberlanjutan program, sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 12 Tahun yang mencakup layanan PAUD prasekolah.

Pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya kesinambungan antara jenjang PAUD dan SD, baik dari segi kurikulum, manajemen guru, maupun layanan transisi anak, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD. Tujuan dari kriteria tersebut di atas adalah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD di berbagai wilayah hingga tingkat desa, dengan memprioritaskan daerah yang belum memiliki layanan PAUD. Selain itu, layanan PAUD-SD Satu Atap juga bertujuan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi oleh pemerintah. Di sisi lain, optimalisasi tenaga pendidik PAUD yang ada di SD "calon" lokasi program PAUD-SD Satu Atap diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut.

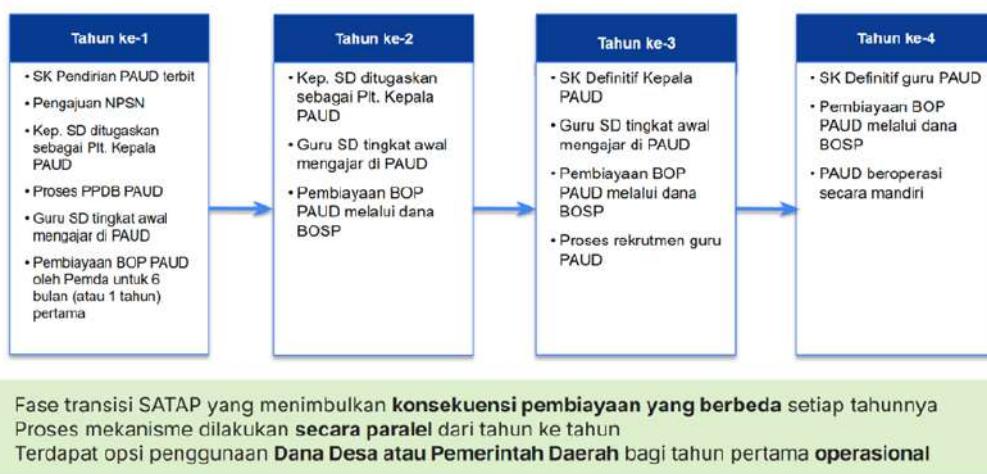
Kriteria dalam konteks penyesuaian layanan PAUD-SD Satu Atap yang diarahkan pada pemetaan daerah prioritas untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, optimal, dan efisien dari sisi anggaran. Identifikasi wilayah prioritas ditujukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara efektif, khususnya di daerah yang memiliki APS usia 5-6 tahun lebih rendah dari rata-rata nasional. Selain itu, pembangunan difokuskan pada daerah



dengan proyeksi jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang cukup, agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mencegah terjadinya pembengkakan anggaran.

Secara khusus, prioritas diberikan pada daerah yang memiliki APS usia 5-6 tahun di bawah rata-rata nasional dan desa-desa dengan jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang tinggi atau setidaknya tidak mengalami penurunan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini secara merata dan berkeadilan. Strategi program PAUD-SD Satu Atap perlu dimaknai sebagai sebuah transisi dalam rangka mempersiapkan PAUD menjadi lembaga yang mandiri di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan tahapan dan mekanisme untuk memastikan proses ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun mekanisme transisi tersebut dapat dilihat pada diagram 3.2. berikut

Rincian Mekanisme Transisi PAUD-SD Satu Atap



Sumber: Dit. PAUD



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Gambar 3.1. Kriteria PAUD-SD Satu Atap

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa diharapkan PAUD yang berada pada PAUD-SD satu atap secara bertahap akan menjadi PAUD yang mandiri. Jangka waktu pada diagram 3.1 ini bukanlah sesuatu yang kaku tapi dikembalikan pada kesiapan satuan. Rentang waktu 4 tahun disini bukanlah sesuatu yang kaku dan baku. Meskipun demikian, perlu diantisipasi juga skenario sekiranya satuan PAUD tersebut tidak siap untuk menjadi mandiri. Pemisahan management ini perlu mempertimbangkan data siswa melalui PBD, status akreditasi PAUD (minimal B), dan, kesiapan tenaga pengajar serta kepala sekolah PAUD, dan alasan terkait mutu lainnya. Dalam hal ini PAUD-SD Satu Atap tetaplah dapat menjadi pilihan jangka panjang.

Terdapat tiga faktor untuk menentukan apakah sebuah PAUD siap menjadi mandiri atau tidak, Yang pertama adalah populasi anak usia dini yang terus mengalami peningkatan atau stabil. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk memastikan bahwa PAUD yang akan didirikan

memiliki kecukupan daya tampung. Yang kedua jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Hal ini untuk memastikan bahwa guru yang mengajar adalah guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tepat. Dan yang ketiga adalah kapasitas dan kemampuan desa. Menjadikan PAUD dalam program PAUD-SD Satu Atap tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Diharapkan pemerintah desa melalui dana desa dan sumber pendapatan mereka bisa turut mendanai satuan yang akan melepaskan dari SD.

Akan tetapi, apabila ketiga faktor tersebut tidak memungkinkan, maka program PAUD-SD Satu Atap dapatlah tetap dilakukan dalam satu management (tidak terpisah). Berikut analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat*) yang membandingkan pengelolaan PAUD-SD Satu Atap dibawah satu management dan dua management.

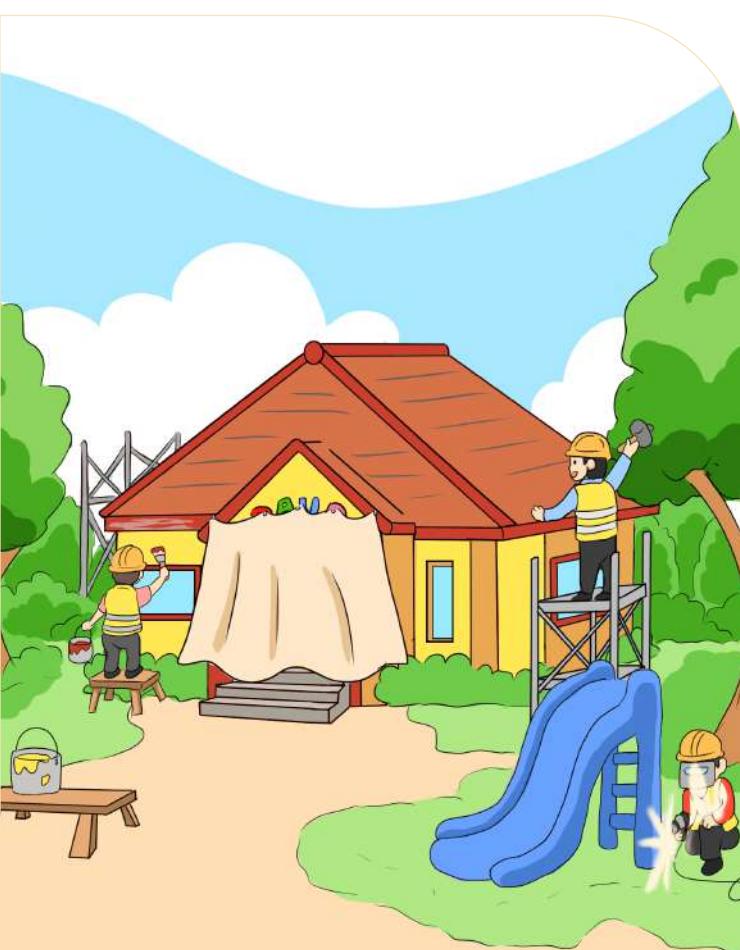
No	Aspek	Satu Management	Dua Management
1	<i>Strength</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Satu komando • koordinasi transisi PAUD-kelas awal lebih cepat • Efisiensi sistem mutu & pemakaian sarpras • Cocok saat kandidat pimpinan sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses BOP PAUD lebih aman karena TK jelas satuan berdiri (NPSN/ Dapodik sendiri) • Identitas & kultur PAUD lebih terlindungi • Akuntabilitas kinerja per jenjang lebih jelas
2	<i>Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko BOP bila TK tidak dipisah sebagai satuan (tanpa NPSN/ Dapodik sendiri) • Beban kerja kepala tinggi/ Tunjangan Plt tidak akan diperoleh • supervisi khas PAUD bisa berkurang • PLT rawan berkepanjangan • Potensi schoolification PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya koordinasi naik (dua RKT/ RKAS, dua siklus mutu) • Perlu rekrut/penugasan Kepala TK & penataan SDM • Potensi redundansi proses bila SOP lintas satuan belum rapi
3	<i>Opportunities</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Parent engagement lintas jenjang lebih mudah • Pilot integrasi layanan (gizi, kesehatan, perlindungan) di satu lokasi • Co-teaching dan asesmen kesiapan masuk SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bersama (Shared service)s dapat dilakukan • otonomi ke khas an PAUD tetap terjaga • Inovasi kurikulum transisi, proyek orang tua, skrining perkembangan • Peningkatan profesional PAUD lebih fokus



No	Aspek	Satu Management	Dua Management
4	<i>Threats</i>	<ul style="list-style-type: none">• Dominasi kultur akademik SD ke PAUD (mengurangi bermain bermakna)• Risiko konflik peran kepala	<ul style="list-style-type: none">• Fragmentasi koordinasi (jadwal, asesmen, layanan) bila tidak ada forum rutin• Ketergantungan pada guru SD kelas rendah tanpa upskilling PAUD memicu mismatch kompetensi• Potensi schoolification tetap akan terjadi mengingat tenaga pendidik berasal dari SD kelas rendah
5	<i>Rambu Mitigasi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan TK tetap satuan mandiri: NPSN, akun Dapodik, & rekening sendiri• Batasi masa PLT + target kinerja jelas• Tunjuk Koordinator/Wakasek PAUD yang kompeten	<ul style="list-style-type: none">• Bentuk SOP & forum koordinasi lintas satuan (kalender, asesmen, layanan dukung)• Efisiensikan shared services untuk tekan biaya koordinasi• Program <i>bridging/upskilling</i> PAUD bagi guru SD kelas rendah

2. Penyelenggaraan PAUD BARU atau Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Penyelenggaraan PAUD Baru dapat juga disebut dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) adalah program pemerintah yang mencakup penyediaan lahan, pembangunan ruang kelas, sarana dan prasarana penunjang, serta penempatan pendidik dan tenaga kependidikan agar unit sekolah baru dapat beroperasi sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, bahwa salah satu permasalahan pendidikan pada level PAUD di Indonesia adalah belum meratanya jumlah lembaga. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terlayani oleh lembaga PAUD, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan urban padat, dan daerah pedesaan.



Oleh karena itu, pembangunan USB PAUD menjadi strategi alternatif yang penting untuk menambah kapasitas layanan, memperluas akses, dan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) secara nasional. USB PAUD bukan sekadar membangun gedung, tetapi harus juga dipahami sebagai sarana memperkuat layanan pendidikan holistik bagi anak usia dini. Selain itu, pembangunan USB dapat pula dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan keberlangsungan akses anak terhadap layanan PAUD di wilayah tempat tinggal mereka.

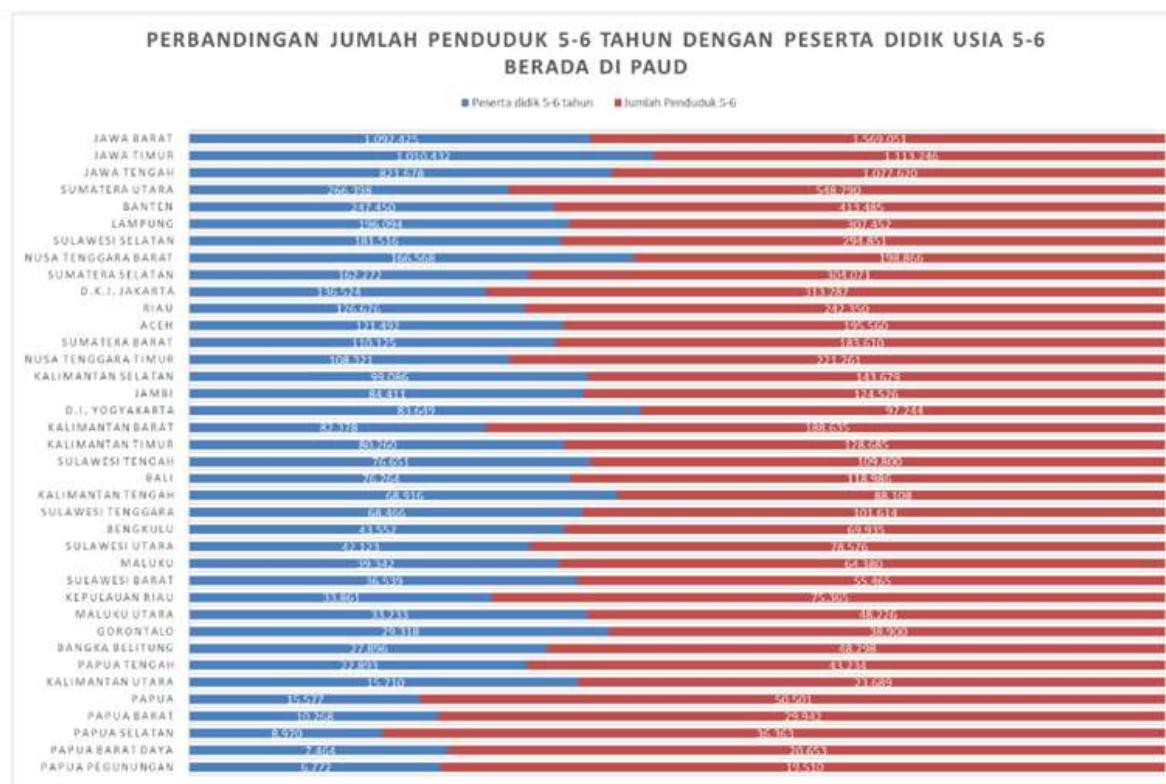
Dalam mengembangkan strategi pembangunan USB PAUD, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, antara lain adalah:

a. Perencanaan Berbasis Data dan Pemetaan Kebutuhan

Pembangunan USB PAUD harus diawali dengan proses perencanaan yang matang dan berbasis data yang akurat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara detail terhadap wilayah-wilayah yang memiliki angka partisipasi kasar (APK) PAUD rendah namun memiliki jumlah anak usia dini tinggi dan belum terjangkau layanan PAUD. Prioritas pembangunan USB PAUD diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah urban padat penduduk, serta permukiman baru akibat relokasi atau pengembangan kawasan industri. Pemetaan ini menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan USB agar lebih efektif menjangkau anak-anak usia dini yang sebelumnya tidak terlayani.

Saat ini lembaga PAUD masih terkonsentrasi di kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Mengingat kapasitas anggaran yang terbatas, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka prioritas pembangunan USB PAUD seyogianya difokuskan kepada daerah pada provinsi-provinsi yang jumlah satuan PAUD-nya masih terbatas seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Kalimantan Utara. Secara lebih spesifik, prioritas perlu dilakukan kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga layanan PAUD dapat diakses oleh anak-anak di setiap daerah di Indonesia.

Selain itu, pembangunan USB PAUD juga dapat dilakukan dengan memprioritaskan desa-desa yang belum memiliki PAUD. Sebagaimana diungkapkan pada di BAB II bahwa hampir 22% desa di Indonesia belum memiliki PAUD. Oleh karena itu, untuk tahap awal, pembangunan USB PAUD dapat lebih difokuskan di desa-desa tersebut. Prioritas juga perlu diberikan kepada wilayah dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang tinggi namun tidak terlayani PAUD. Gambar 3.3 menjelaskan jumlah anak berusia 5-6 tahun pada seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah anak yang sudah terlayani PAUD.



Gambar 3.2. Perbandingan Jumlah Peserta Didik PAUD dengan Penduduk Usia 5-6 Tahun



Diagram di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam PAUD masih belum merata di seluruh Indonesia, dan banyak provinsi yang masih memiliki tingkat keikutsertaan PAUD yang rendah dibandingkan jumlah anak usia tersebut.

b. Standar Teknis Bangunan

Pembangunan USB PAUD harus memenuhi standar teknis bangunan ramah anak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari desain ruang kelas, area bermain (*indoor* maupun *outdoor*), alat permainan edukatif, toilet anak, sanitasi ruang pendukung kegiatan, hingga area terbuka hijau yang mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan bagi anak. USB PAUD yang dibangun harus dirancang sebagai pusat layanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta mendukung aktivitas eksplorasi serta stimulasi perkembangan dan kemampuan dasar anak. Oleh karena itu, bangunan yang dikembangkan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah anak usia dini di wilayah tersebut dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang.

c. Skema Pendanaan yang Fleksibel dan Kolaboratif

Dari sisi pendanaan, pembangunan USB PAUD memerlukan dukungan dari berbagai sumber, dengan skema utama memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mengalokasikan dana sebagai bentuk komitmen dalam memperluas layanan PAUD di wilayahnya. Pemanfaatan aset pemerintah daerah, tanah desa, atau lahan milik negara juga perlu dioptimalkan sebagai lokasi pembangunan USB PAUD, sehingga meminimalkan beban biaya pembebasan lahan dan memastikan keberlanjutan layanan. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga diharapkan bertanggung jawab untuk mengalokasikan biaya operasional rutin guna memastikan USB yang telah dibangun dapat berjalan secara optimal dan memberikan layanan yang berkualitas. Pemerintah pun dapat melibatkan lembaga donor nasional maupun internasional untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan mutu layanan. Selain itu, pembangunan USB PAUD juga dapat melibatkan dunia usaha dan dunia industri melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

d. Penyiapan SDM dan Penguatan Tata Kelola

Pembangunan USB PAUD tidak berhenti pada penyediaan fisik bangunan semata, melainkan harus diikuti dengan penyiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan bersertifikasi sesuai standar nasional. Ketersediaan pendidik (guru) PAUD yang berkualitas menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa USB PAUD yang dibangun benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan USB PAUD harus terintegrasi dengan perencanaan pengadaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga lembaga yang berdiri tidak hanya siap secara fisik tetapi juga siap dari sisi kualitas layanan.

Dengan strategi yang terfokus pada pembangunan fisik unit sekolah baru secara terencana, terukur, dan sesuai standar, pembangunan USB PAUD diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan PAUD serta meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), serta menjamin pemerataan akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi investasi penting dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai pondasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Meskipun demikian, strategi pembangunan USB PAUD perlu benar-benar direncanakan secara matang agar program ini tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Salah satu tantangan utama adalah risiko pembangunan USB PAUD yang tidak tepat sasaran, akibat perencanaan yang lemah dan tidak berbasis data yang akurat. Tanpa pemetaan kebutuhan yang baik, USB PAUD berpotensi dibangun di lokasi yang sebenarnya sudah terjangkau layanan PAUD atau di daerah dengan jumlah anak usia dini yang rendah, sehingga lembaga yang dibangun tidak optimal pemanfaatannya, bahkan terancam menjadi gedung kosong terbengkalai atau underutilized. Hal ini berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran negara dan daerah, di mana biaya besar telah dikeluarkan namun tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PAUD.

Selain itu, pembangunan USB PAUD juga memiliki potensi menciptakan ketimpangan kualitas layanan antar daerah, terutama apabila pemerintah daerah hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa perencanaan yang memadai terkait dengan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Akibatnya, USB PAUD yang berdiri di daerah terpencil dan miskin sulit untuk mendapatkan pendidik (guru) PAUD yang kompeten dan bersertifikat, sehingga layanan pendidikan yang diberikan tidak optimal dan berisiko hanya menjadi tempat penitipan anak, bukan lembaga pendidikan yang bermutu. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi daerah yang tidak memiliki anggaran operasional memadai untuk memastikan keberlanjutan layanan, termasuk pemeliharaan bangunan, pengadaan alat peraga edukatif, dan peningkatan kapasitas guru. Tanpa dukungan anggaran rutin, USB PAUD yang telah dibangun sangat rentan mengalami penurunan kualitas layanan dan degradasi fasilitas fisik, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga PAUD formal.

Dampak negatif lain dari kondisi tersebut di atas adalah risiko konflik sosial di masyarakat terkait dengan lokasi pembangunan USB PAUD, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan atau sengketa kepemilikan tanah. Jika proses perencanaan dan sosialisasi kepada masyarakat tidak berjalan baik, maka pembangunan USB PAUD dapat memicu ketegangan antara warga, pemerintah desa, atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Selain itu, adanya USB PAUD baru berpotensi menimbulkan persaingan dengan lembaga PAUD yang sudah ada, khususnya PAUD swasta kecil yang selama ini berjuang melayani masyarakat setempat. Kehadiran PAUD baru yang lebih besar dan memiliki dukungan pemerintah dapat menggerus jumlah peserta didik di PAUD swasta, sehingga memicu ketimpangan dan bahkan mendorong tutupnya lembaga-lembaga PAUD kecil yang sebelumnya telah berkontribusi besar dalam layanan pendidikan anak usia dini di dalam komunitas setempat.

Terakhir, fokus yang terlalu besar pada pembangunan fisik USB PAUD juga dikhawatirkan dapat mengaburkan esensi utama layanan PAUD, yakni membangun kualitas proses pendidikan dan pengasuhan yang menstimulasi kemampuan dasar anak, menciptakan relasi pendidik-peserta didik, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Jika pembangunan USB PAUD hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur, maka orientasi program akan lebih banyak pada pencapaian fisik ketimbang kualitas layanan. Hal ini dapat berujung pada layanan PAUD yang kaku, birokratis, dan jauh dari semangat pendidikan yang ramah anak dan berbasis kebutuhan tumbuh kembang anak usia dini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan USB PAUD tidak hanya berorientasi pada bangunan fisik, tetapi juga disertai dengan strategi peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional jangka panjang.

3. Perluasan Kewenangan Layanan PAUD Non-Formal



Perluasan kewenangan layanan PAUD Non-Formal adalah program perluasan Kewenangan Layanan PAUD Nonformal untuk Menyediakan Layanan TK. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan izin dan kewenangan lebih luas kepada satuan PAUD nonformal—seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)—untuk menyelenggarakan layanan setara Taman Kanak-Kanak (TK) dalam rangka pemenuhan kebijakan Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah.

Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pemerataan akses

layanan PAUD, terutama di wilayah yang belum memiliki TK formal atau memiliki keterbatasan fasilitas. Melalui perluasan kewenangan ini, satuan PAUD nonformal dapat menambahkan program pembelajaran setingkat TK sesuai Standar Nasional PAUD, dengan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku dan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan pemerintah.

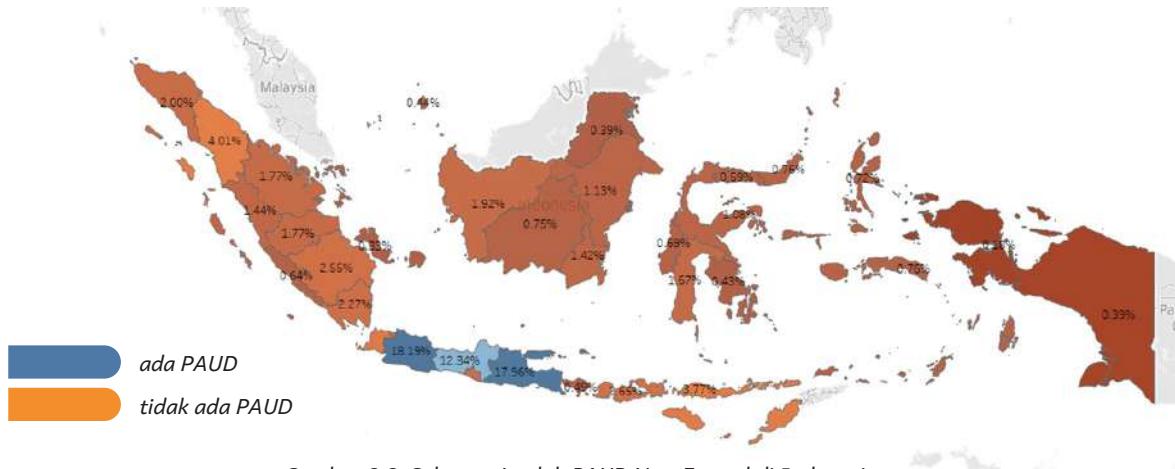
Ekosistem PAUD di Indonesia saat ini terbagi menjadi PAUD formal yang berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) yang memberikan layanan untuk anak berusia 4-6 tahun, PAUD non-formal yang memberikan layanan Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) untuk anak berusia 0-4 tahun, serta PAUD informal yang merupakan alur pendidikan anak usia dini yang berlangsung di keluarga dan lingkungan sekitar, di mana pembelajaran terjadi secara mandiri dan tidak terstruktur.

Saat ini Kemendikdasmen sedang dipersiapkan perangkat aturan yang membuat Perizinan Tunggal (*Single Licensing*) sehingga membuka peluang satu lembaga PAUD dapat membuka layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan TK dalam satu atap. Transformasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan sesuai dengan standar nasional sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Diharapkan dengan adanya *Single Licensing*, layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini akan disebut PAUD dan didalamnya akan terdapat layanan TPA, KB, dan juga TK.

Program ini pun memerlukan biaya yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan membangun PAUD baru. Di samping itu, perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal juga memberikan kesempatan kepada para pendidik PAUD non-formal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Perlu dicatat bahwa perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan peran dari PAUD non-formal tetapi sebagai upaya diversifikasi dan perluasan layanan dalam rangka mengimplementasikan PAUD satu tahun prasekolah. Untuk memperluas kewenangan layanan PAUD non-formal, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

a. Pemetaan dan Identifikasi

Langkah awal dalam perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal adalah melakukan pemetaan dan identifikasi secara menyeluruh terhadap lembaga PAUD non-formal. Pemetaan ini mencakup pendataan jumlah lembaga, sebaran lokasi, kapasitas sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual lembaga dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan lembaga-lembaga prioritas yang siap untuk dikembangkan. Selain itu, pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan teknis dan strategi pendampingan dalam rangka memperluas kewenangan layanan PAUD non-formal secara bertahap dan berkelanjutan. Saat ini, jumlah PAUD non-formal tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana tampak pada Gambar 3.6. di bawah ini.



Gambar 3.3. Sebaran Jumlah PAUD Non-Formal di Indonesia

Berdasarkan Gambar 3.3., terdapat 10 provinsi yang menggambarkan jumlah PAUD non-formal. Adapun 10 provinsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini.

Provinsi	% Satuan Non Formal	Jumlah PAUD Non Formal
Prov. Jawa Barat	19.49%	19,113
Prov. Jawa Timur	19.25%	18.877
Prov. Jawa Tengah	13.22%	12.963
Prov. Sumatera Utara	4.30%	4.212
Prov. Nusa Tenggara Timur	4.04%	3.965
Prov. Banten	3.80%	3.725
Prov. Nusa Tenggara Barat	2.84%	2.789
Prov. Sumatera Selatan	2.73%	2.678
Prov. Lampung	2.43%	2.382
Prov. D.I. Yogyakarta	2.34%	2.292

Gambar 3.4. Sepuluh provinsi yang menggambarkan jumlah PAUD non-formal



b. **Fasilitasi dan Pendampingan Alih Fungsi**

Proses pendampingan dalam perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal mencakup penyusunan *milestones* dalam bentuk rencana alih fungsi yang terukur, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan penguatan kelembagaan agar lebih siap menjalankan fungsi sesuai ketentuan.

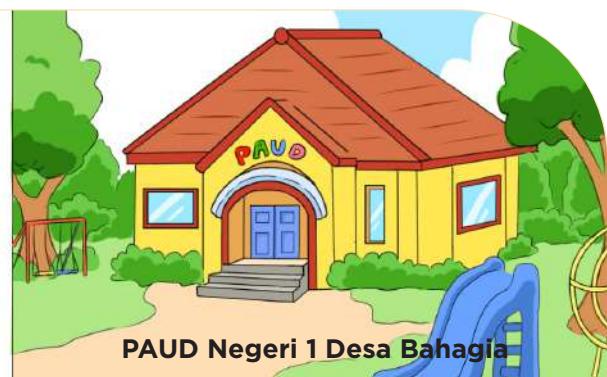
c. **Peningkatan Kompetensi Pendidik**

Kualitas layanan PAUD sangat ditentukan oleh kompetensi pendidiknya. Oleh karena itu, dalam rangka perluasan kewenangan layanan PAUD non-formal, pendidik harus difasilitasi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, memperoleh sertifikasi pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta menguasai pendekatan pembelajaran holistik yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

d. **Penyesuaian Kurikulum**

Untuk mendukung perluasan kewenangan layanan, lembaga PAUD non-formal juga perlu menyesuaikan kurikulum yang digunakan agar sejalan dengan kerangka PAUD yang berlaku secara nasional. Penyesuaian kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak usia dini, dan menerapkan pendekatan bermain yang menyenangkan dan bermakna sebagai dasar pembelajaran. Penyesuaian ini juga perlu mempertimbangkan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik, sehingga lembaga mampu memberikan layanan kontekstual dan relevan dengan perkembangan anak.

4. Penegerian PAUD



Penegerian PAUD merupakan salah satu kebijakan strategis yang mengacu pada proses perubahan status satuan pendidikan anak usia dini dari swasta atau milik masyarakat menjadi satuan pendidikan negeri yang berada di bawah pengelolaan dan pendanaan pemerintah. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat peran negara dalam menjamin hak setiap anak atas pendidikan usia dini yang bermutu, terjangkau, dan merata. Saat ini, terdapat sekitar 97% PAUD di Indonesia dikelola oleh pihak non-pemerintah, baik yayasan, organisasi masyarakat, maupun individu, sementara di sisi lain, hanya sekitar 3% PAUD yang berstatus negeri. Ketimpangan ini menyebabkan akses terhadap layanan PAUD berkualitas sangat bergantung pada kemampuan masyarakat setempat, sehingga banyak anak dari keluarga tidak mampu atau yang tinggal di daerah tertinggal tidak dapat menikmati layanan PAUD secara optimal.

Penegerian PAUD menjadi penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya membangun fondasi kokoh bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan anak usia dini selama satu tahun sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar memiliki peran krusial dalam membentuk kesiapan belajar anak, baik dari aspek kognitif, sosial-emosional, maupun karakter. Namun tanpa keterlibatan aktif negara dalam penyediaan layanan PAUD, khususnya dalam bentuk satuan pendidikan dengan status negeri, target partisipasi universal untuk kesuksesan kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' akan sulit dicapai. Dengan adanya PAUD negeri, negara dapat lebih efektif menjamin akses layanan gratis atau sangat terjangkau bagi seluruh anak, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin, rentan, atau tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain memperluas akses, penegerian PAUD swasta juga merupakan langkah penting dalam penjaminan mutu layanan PAUD secara merata. Satuan PAUD dengan status negeri lebih mudah dijangkau melalui sistem pengawasan, pelatihan guru, penerapan kurikulum nasional, serta penjaminan mutu pendidikan anak usia dini. Melalui PAUD negeri memungkinkan dilakukannya integrasi yang lebih baik antara layanan pendidikan dan layanan esensial lainnya seperti gizi, kesehatan, perlindungan anak, dan pengasuhan, sehingga sejalan dengan pendekatan PAUD Holistik-Integratif yang menjadi arah kebijakan nasional. Dalam konteks ini, penegerian PAUD tidak hanya menjadi upaya administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk menciptakan sistem pendidikan anak usia dini yang lebih terstruktur, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan anak dan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa penegerian PAUD tidak selalu berarti mendirikan satuan PAUD baru oleh pemerintah, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti alih status satuan PAUD swasta menjadi PAUD negeri melalui kemitraan atau hibah aset, pendirian PAUD negeri di daerah yang belum terlayani, atau penyusunan skema transisi kelembagaan melalui PAUD mitra pemerintah. Dengan demikian, proses ini dapat dilakukan secara bertahap dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, keberhasilan penegerian PAUD akan turut menentukan tercapainya target kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' serta memperkuat peran negara dalam memastikan keadilan sosial dan hak dasar anak atas pendidikan yang bermutu sejak usia dini.

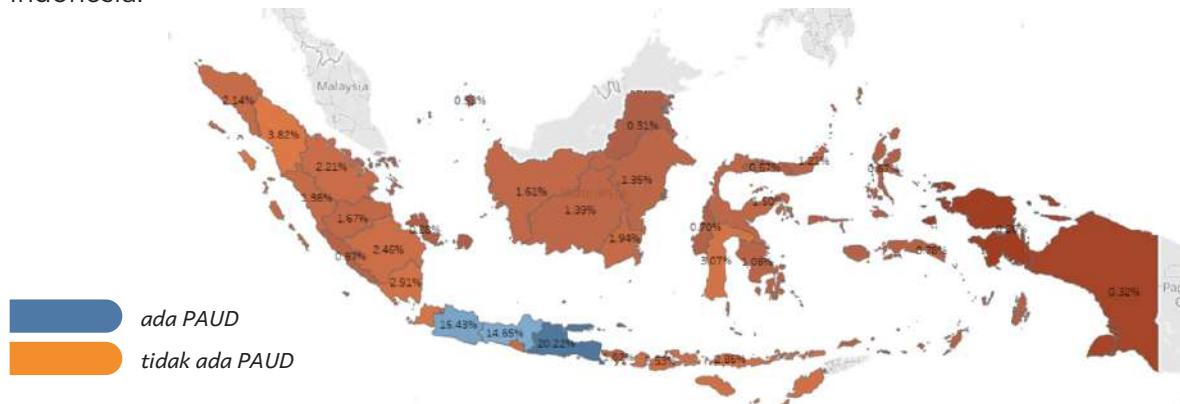
Tahapan-tahapan dalam proses penegerian PAUD memerlukan pendekatan yang terencana, memenuhi *legal-formal*, dan bersifat partisipatif. Proses ini tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh isu sumber daya manusia, kepemilikan aset, serta kebijakan pendanaan dan tata kelola. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses penegerian PAUD:

a. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan

Tahap pertama proses penegerian PAUD adalah identifikasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan penambahan satuan PAUD negeri, baik karena belum tersedia PAUD sama sekali atau karena kapasitas layanan PAUD yang ada tidak mencukupi. Pemetaan ini mencakup identifikasi satuan PAUD swasta yang memiliki potensi untuk dialihstatuskan menjadi PAUD negeri, dengan mempertimbangkan kualitas layanan, keberlanjutan operasional, lokasi strategis, dan dukungan masyarakat.



Gambar 3.5. berikut ini memperlihatkan sebaran jumlah PAUD Swasta yang ada di Indonesia.



Gambar 3.5. Sebaran jumlah PAUD Swasta yang ada di Indonesia.

Provinsi	% Satuan Non Formal	Jumlah PAUD Non Formal
Prov. Jawa Timur	20.22%	37,046
Prov. Jawa Barat	15.43%	28,285
Prov. Jawa Tengah	14.66%	26,842
Prov. Sumatera Utara	3.82%	7,005
Prov. Banten	3.37%	6,183
Prov. Sulawesi Selatan	3.07%	5,622
Prov. Lampung	2.91%	5,329
Prov. Nusa Tenggara Timur	2.85%	5,216
Prov. Nusa Tenggara Barat	2.53%	4,636
Prov. Sumatera Selatan	2.46%	4,499

Gambar 3.6. Sepuluh provinsi yang menggambarkan jumlah PAUD swasta di Indonesia

Berdasarkan *Geo chart* di atas, dapat diidentifikasi 10 provinsi yang menggambarkan jumlah PAUD swasta di Indonesia sebagaimana pada Gambar 3.6.

b. Analisis Kelayakan Alih Status

Setelah tahap pemetaan, pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan, perlu melakukan studi kelayakan terhadap satuan PAUD swasta yang akan dinegerikan. Kelayakan ini mencakup aspek legalitas kelembagaan, status kepemilikan aset (tanah dan bangunan), kondisi sarana dan prasarana, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta dukungan dari yayasan atau pengelola PAUD sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memastikan apakah satuan PAUD tersebut memenuhi standar untuk dialihkan statusnya menjadi PAUD negeri dan memungkinkan transisi kelembagaan secara berkelanjutan.

c. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Tahap selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan dialog intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik yayasan atau pemilik PAUD, pemerintah daerah, dinas pendidikan, pengelola keuangan, DPRD, maupun komunitas orang tua dan masyarakat sekitar. Kesepakatan bersama mengenai tujuan penegerian PAUD, bentuk dukungan, serta skema alih aset dan pengelolaan menjadi prasyarat penting sebelum proses administrasi dimulai.



d. **Penyiapan Regulasi dan Administrasi**

Penegerian PAUD memerlukan dasar hukum dan administratif yang kuat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan dokumen-dokumen, seperti surat hibah aset, naskah perjanjian kerja sama (jika tidak berupa hibah permanen), serta surat keputusan pendirian PAUD negeri oleh kepala daerah. Pada tahap ini juga disusun struktur organisasi satuan pendidikan, status tenaga pendidik, serta mekanisme transisi operasional.

e. **Penguatan Kapasitas dan Standarisasi**

Setelah status satuan PAUD yang dimaksud berubah menjadi PAUD negeri, perlu dilakukan penguatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum, serta pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini. Pemerintah juga harus menyesuaikan sistem pelaporan dan evaluasi layanan PAUD sesuai dengan sistem informasi pendidikan nasional.

f. **Integrasi ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Satuan PAUD yang telah dinegerikan kemudian harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal ini meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, alokasi anggaran operasional, serta penganggaran untuk peningkatan mutu dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD).

g. **Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan**

Tahap akhir proses penegerian PAUD adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas proses dan hasilnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa transisi penegerian berjalan lancar, layanan tetap berjalan, dan kualitas PAUD yang berubah status menjadi negeri tidak menurun. Oleh karena itu, pendampingan teknis dari pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu layanan secara progresif.

Isu yang kerap berkembang dalam proses penegerian PAUD adalah status guru. Hal ini menjadi salah satu tantangan paling krusial dalam implementasi program penegerian PAUD. Saat ini, mayoritas guru PAUD di Indonesia bekerja di satuan pendidikan, khususnya satuan PAUD, non-negeri seperti swasta, komunitas, atau yayasan, dengan status yang belum tetap, sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer, bahkan sebagai relawan. Kondisi ini membuat mereka berada dalam posisi rentan, baik secara penghasilan maupun kepastian karier. Ketika sebuah satuan PAUD dialihstatuskan menjadi PAUD negeri, pertanyaan utama yang sering muncul adalah: *bagaimana nasib para guru yang sebelumnya mengabdi di PAUD tersebut?*

Dalam proses penegerian PAUD, peralihan status satuan pendidikan membawa serta konsekuensi aspek administratif dan kepegawaian. Salah satu persoalan mendasar adalah bahwa guru-guru PAUD non-negeri tidak secara otomatis dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini karena proses pengangkatan ASN/PPPK tunduk pada regulasi nasional yang ketat dan mensyaratkan mekanisme seleksi terbuka, kualifikasi minimal S1/D4 di bidang PAUD, serta sertifikasi pendidik. Akibatnya, guru yang sudah lama mengabdi di PAUD non-negeri berisiko kehilangan peran atau tidak dapat melanjutkan pengabdiannya di PAUD sebelumnya yang statusnya



telah berubah menjadi PAUD negeri, terutama apabila mereka tidak lolos seleksi atau belum memenuhi syarat formal. Situasi ini kerap menimbulkan kerentanan sosial dan psikologis bagi para guru, serta dapat menimbulkan penolakan terhadap kebijakan penegerian PAUD apabila tidak ditangani secara adil dan manusiawi.

Selain itu, masa kerja dan kontribusi panjang guru PAUD non-negeri kerap tidak mendapatkan pengakuan formal dalam sistem kepegawaian negara, sehingga memunculkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan transisi yang berpihak kepada guru PAUD. Sebagai konsekuensinya, pemerintah perlu menyusun skema pengangkatan khusus atau afirmasi bagi guru yang sudah mengabdi dalam waktu lama, baik melalui formasi PPPK khusus, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk peningkatan kualifikasi, maupun sertifikasi yang difasilitasi negara. Lebih jauh, perlu ada kepastian pengakuan masa kerja dan perlindungan hak-hak kesejahteraan, agar proses penegerian PAUD tidak menciptakan masalah bagi status profesionalisme dan kesejahteraan guru.

5. Penambahan Ruang Kelas Baru

Program Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) adalah inisiatif strategis pemerintah untuk menambah kapasitas satuan pendidikan dengan membangun ruang kelas tambahan pada sekolah yang sudah ada. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kepadatan kelas, menurunkan rasio siswa per kelas, dan mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Dalam konteks kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, program ini memiliki peran penting karena banyak sekolah dasar, khususnya sekolah negeri, menjadi lokasi integrasi layanan PAUD-TK dalam bentuk PAUD-SD Satu Atap. Penambahan RKB memungkinkan penyediaan ruang khusus bagi anak usia 5-6 tahun agar dapat mengikuti layanan pra-sekolah di lingkungan SD tanpa mengganggu proses pembelajaran reguler.



Program Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) tidak hanya dilakukan pada satuan pendidikan dasar seperti SD, tetapi juga menyangkai satuan PAUD formal (misalnya TK) sebagai bagian dari strategi memperluas akses layanan dalam rangka mendukung kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah. Banyak wilayah yang sudah memiliki satuan PAUD, namun keterbatasan ruang kelas menyebabkan daya tampung terbatas sehingga tidak semua anak usia 5-6 tahun dapat terlayani. Melalui pembangunan RKB di satuan PAUD, kapasitas penerimaan peserta didik dapat ditingkatkan tanpa harus mendirikan unit sekolah baru, sehingga lebih efisien dari sisi biaya dan waktu.

Program ini sejalan dengan integrasi layanan PAUD-SD Satu Atap di sekolah negeri, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi satuan PAUD yang sudah ada agar mampu memperluas layanan untuk kelompok usia pra-sekolah secara optimal. Dengan demikian, penambahan RKB di PAUD akan memastikan bahwa pemerataan akses tidak hanya mengandalkan SD sebagai lokasi integrasi, tetapi juga memperkuat keberadaan PAUD yang sudah eksis, terutama di daerah perkotaan padat dan wilayah dengan angka partisipasi pra-sekolah yang masih rendah. Implementasi program ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana PAUD, serta Renstra Kemendikdasmen 2020-2024 yang menekankan perluasan layanan PAUD berkualitas untuk mendukung transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD.

Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) merupakan elemen fundamental dalam mendukung pelaksanaan wajib PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, yang merupakan bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia. Tanpa adanya ruang kelas yang memadai dan tersebar merata, kebijakan tersebut akan sulit diwujudkan secara efektif. RKB menjadi prasyarat utama untuk menjawab tantangan keterbatasan daya tampung di satuan PAUD, terutama di daerah pedesaan, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta kawasan padat penduduk. Banyak anak usia 5-6 tahun belum dapat mengakses layanan PAUD karena keterbatasan fisik ruang belajar yang tersedia. Dengan bertambahnya jumlah RKB, satuan PAUD dapat membuka lebih banyak rombongan belajar dan memastikan bahwa seluruh anak usia prasekolah memiliki tempat yang layak untuk mengikuti pendidikan awal yang berkualitas.

Selain itu, RKB yang dibangun dengan standar ramah anak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan PAUD. Ruang kelas yang aman, terang, bersih, dan dirancang sesuai kebutuhan anak dapat menjadi lingkungan yang merangsang perkembangan fisik, kognitif, sosial-emosional, dan spiritual mereka. Hal ini akan mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis bermain, mendorong eksplorasi, dan mendukung transisi yang menyenangkan ke jenjang Sekolah Dasar. Dalam konteks PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), keberadaan RKB juga memungkinkan satuan PAUD menyediakan layanan tambahan seperti pemantauan tumbuh kembang, penyuluhan gizi, kesehatan dasar, dan pelibatan orang tua, dengan dukungan dari lintas sektor seperti dinas kesehatan, dinas sosial, serta lembaga masyarakat.

RKB juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Melalui pemetaan kebutuhan ruang belajar berbasis data anak usia dini dan kolaborasi antar instansi, pembangunan RKB dapat dibiayai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, CSR, atau APBD. Dengan demikian, RKB tidak hanya menjadi

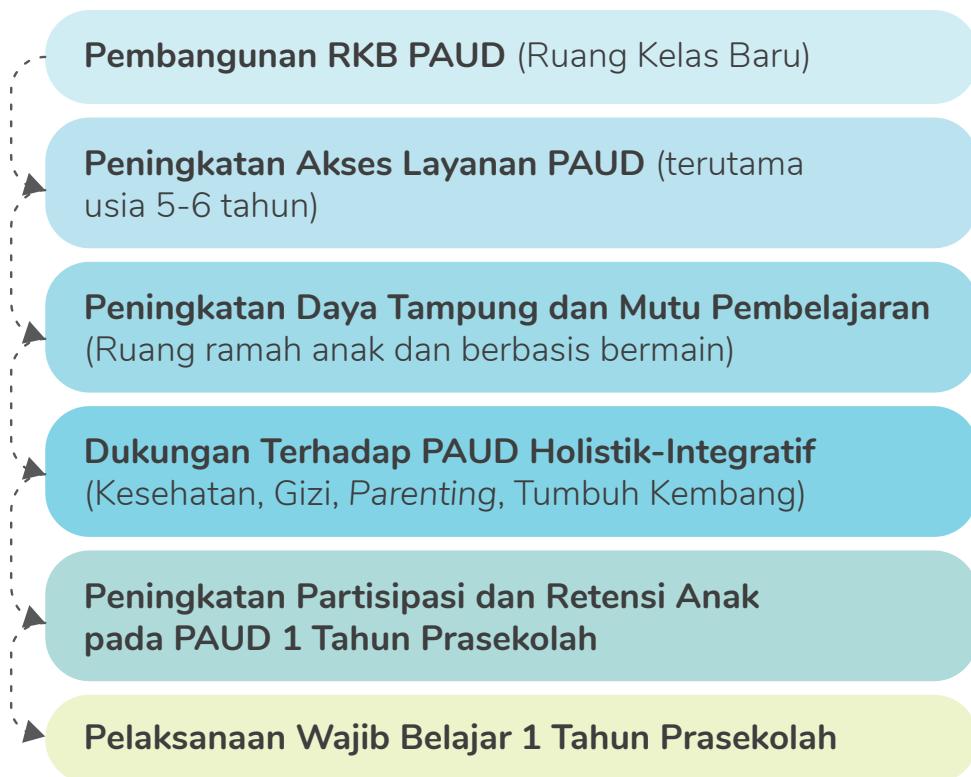


infrastruktur fisik, melainkan instrumen strategis yang mendorong keadilan pendidikan, memperluas partisipasi, dan memperkuat tata kelola PAUD yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan RKB yang memadai juga akan mengurangi angka putus PAUD, meningkatkan retensi, dan mendorong capaian Indeks Pembangunan Anak Usia Dini (ECDI) di tingkat nasional.

Strategi RKB dapat juga dilakukan bekerjasama dengan LTPK. LPTK dapat menempatkan mahasiswa untuk melakukan PLS, KKN atau magang di SD dan PAUD yang menerapkan RKB. Keberadaan mahasiswa pada program ini dapat membantu guru sekaligus memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa.

Adapun alur peran strategis RKB dalam kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Diagram Alur Peran Strategis RKB dalam Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah



Gambar 3. 7. Diagram Alur Peran Strategis RKB dalam Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah

Kelima strategi di atas tentunya memerlukan dukungan anggaran. Karena perlu ada upaya untuk melakukan relaksasi dan penyesuaian dana BOP. Penggunaan dana BOP perlu diberikan ruang fleksibilitas, disamping secara jumlah juga perlu ada peningkatan.

Pemilihan strategi mana yang akan diambil dari kelima strategi tadi, perlulah mempertimbangkan beberapa hal seperti ketersediaan PAUD di desa, jumlah populasi anak berusia 5-6 tahun, ketersediaan SD, jumlah anak tidak tertampung PAUD, dan jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1/D4 dalam bidang PAUD atau Psikologi. Table 3.8 menggambarkan dasar pertimbangan yang dapat diambil, sebelum pemerintah daerah menentukan strategi mana yang akan diambil.

Opsi Strategi Perluasan Akses Pendidikan 1 Tahun Prasekolah

Strategi Perluasan Akses	Kriteria Desa				
	Ketersediaan PAUD	Anak Tidak Tertampung 5 - 6 (2026)	Ketersediaan SD	Jumlah Anak 5-6 (2029)	% Guru PAUD S1/D4
PAUD SD Satu Atap (SATAP)	Tidak Ada	≥ 15	Ada	≥ 15	≥ Rata- Rata Nasional
Kelas Rangkap	Tidak Ada	< 15	Ada	-	-
Ruang Kelas Baru (RKB)	Ada	≥ 15	Ada/Tidak Ada	>=15*(Rombel Eksisting + Potensi Dibangun)	-
Unit Sekolah Baru (USB)	Tidak Ada	≥ 30	Ada/Tidak Ada	≥ 30	≥ Rata- Rata Nasional
PAUD Keliling	Tidak Ada	< 15	Ada/Tidak Ada	-	-

Keterangan:

- Pendekatan strategi dibuat menggunakan rasio ideal guru terhadap peserta didik 1:15.
- Pada 2026, digunakan proksi anak tidak tertampung agar tetap mempertimbangkan daya tampung eksisting.
- Strategi kelas rangkap digunakan ketika di desa tersebut ada SD yang jumlah siswa kelas 1-nya sedikit.

Gambar 3.8. Pertimbangan dalam penentuan strategi implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah



Selain strategi tersebut di atas, terdapat juga beberapa program afirmasi yang dapat diberikan, khususnya kepada masyarakat rentan di daerah 3T dan wilayah lainnya yang mempunyai kriteria kebutuhan untuk melakukan strategi implementasi pada kategori program afirmasi. Beberapa program afirmasi yang dapat mendukung percepatan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ antara lain adalah:

a. Guru PAUD Kunjung

Program Guru PAUD Kunjung merupakan pendekatan strategis dalam menjangkau anak-anak usia dini yang belum terlayani oleh lembaga PAUD, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah perkotaan yang padat dan miskin. Melalui program ini, guru PAUD secara aktif mendatangi anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan metode belajar yang kontekstual dan berbasis komunitas, guru kunjung diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan anak usia dini, sekaligus mengedukasi orang tua tentang pentingnya satu tahun prasekolah. Keberadaan guru kunjung berpotensi secara signifikan untuk meningkatkan cakupan layanan PAUD secara lebih merata dan inklusif serta mendukung tercapainya target nasional kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’.



Akan tetapi, di sisi lain, program ini sangat mungkin menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar layanan minimal (SPM) dan Standar Nasional PAUD, khususnya pada aspek kualifikasi pendidik, rasio pendidik-peserta didik, serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar yang layak. Guru PAUD kunjung umumnya bekerja secara individual tanpa dukungan tim, dengan keterbatasan alat bantu, transportasi, dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada mutu proses pembelajaran yang tidak konsisten, serta kurangnya dokumentasi perkembangan anak yang menjadi bagian dari standar evaluasi pendidikan pada level PAUD. Perlu juga diperhatikan status dari guru kunjung ini agar mereka pun dapat diakui sebagai guru yang profesional.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk mendukung program Guru Kunjung ini adalah dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Melalui program Magang Berdampak, Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan), mahasiswa dapat dilibatkan untuk menjadi bagian dari program Guru Kunjung ini. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selanjutnya dapat dikonversi menjadi sejumlah SKS.

b. **Alat Permainan Edukatif (APE) dan Perpustakaan Keliling**

Alat Permainan Edukatif (APE) dan Perpustakaan Keliling adalah dua bentuk dukungan sarana pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD serta mendukung pengembangan anak secara holistik. APE merupakan seperangkat alat yang dibuat secara khusus untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak usia dini—kognitif, motorik, sosial-emosional, bahasa, dan moral melalui aktivitas bermain yang menyenangkan, terarah, dan aman. APE berfungsi sebagai media pembelajaran yang mendukung keterampilan berpikir, kreativitas, dan interaksi sosial, sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD dan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan/STPPA pada PAUD.

Sementara itu, Perpustakaan Keliling adalah layanan penyediaan bahan bacaan yang dilakukan secara bergerak menggunakan sarana transportasi untuk menjangkau anak-anak, pendidik, dan masyarakat, khususnya di daerah yang sulit terlayani oleh perpustakaan permanen. Layanan ini bertujuan meningkatkan akses literasi sejak dini melalui penyediaan buku cerita anak, bacaan edukatif, dan aktivitas literasi yang mendukung kemampuan berbahasa dan minat baca. Keduanya merupakan bagian integral dari strategi pemerataan akses dan peningkatan mutu PAUD untuk mendukung Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, memastikan anak-anak tidak hanya memiliki akses terhadap layanan prasekolah, tetapi juga mendapatkan stimulasi dan literasi yang sesuai standar untuk mempersiapkan transisi ke SD dengan baik.

Alat Permainan Edukatif (APE) merupakan sarana penting dalam pembelajaran anak usia dini karena mendukung prinsip bahwa anak belajar melalui bermain. Penggunaan APE yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dapat membantu menstimulasi aspek kognitif, motorik, sosial-emosional, bahasa, dan seni secara holistik.

Dalam konteks percepatan realisasi kebijakan wajib belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, APE berperan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di lembaga PAUD maupun dalam program guru kunjung. APE juga dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anak dan kepercayaan orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, distribusi dan pemanfaatan APE perlu diperluas sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu PAUD di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping APE, perpustakaan keliling juga dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan akses bahan bacaan di daerah yang minim sarana literasi. Perpustakaan keliling merupakan layanan bergerak yang menggunakan kendaraan atau media sederhana lainnya dengan membawa buku cerita anak, buku bergambar, dan materi literasi lainnya ke komunitas-komunitas yang belum memiliki perpustakaan tetap.





Layanan ini tidak hanya memperkenalkan budaya membaca sejak dini, tetapi juga mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan anak. Perpustakaan keliling turut memperkuat aspek literasi dini yang menjadi fondasi keberhasilan anak dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan keliling sangat mendukung percepatan implementasi 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' melalui pendekatan berbasis literasi keluarga dan komunitas.

Namun demikian di sisi lain, keterbatasan koleksi buku yang relevan dengan perkembangan usia anak, ketidakteraturan jadwal kunjungan, serta kurangnya integrasi materi dengan kurikulum dan pembelajaran PAUD, sangat mungkin menyebabkan perpustakaan keliling tidak optimal dalam memenuhi standar mutu layanan literasi anak usia dini. Akibatnya, penguatan fondasi literasi anak sebelum masuk SD tidak merata, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

c. Program Indonesia Pintar (PIP PAUD)

Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga miskin dan rentan miskin, turut memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan partisipasi anak pada pendidikan anak usia dini. PIP dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, alat tulis, transportasi, atau pembayaran iuran sekolah. Dalam konteks PAUD, dukungan finansial ini sangat membantu keluarga yang memiliki keterbatasan untuk turut partisipasi tanpa terbebani oleh kendala ekonomi. Dengan demikian, PIP tidak hanya meningkatkan jumlah anak yang mengikuti PAUD, tetapi juga mendorong pemerataan layanan pendidikan secara sosial dan ekonomi. Keberadaan program ini sangat strategis dalam mempercepat pencapaian target nasional kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah', terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Saat ini, PIP masih belum menjangkau PAUD, sehingga menjadi penting untuk memperluas program PIP ini ke jangkau PAUD.



Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi PIP di jenjang PAUD berpotensi memiliki kelemahan dalam hal akurasi data sasaran, ketepatan waktu pencairan, dan pemanfaatan dana secara efektif oleh orang tua. Kurangnya sosialisasi juga dapat menyebabkan banyak keluarga tidak memahami bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan anak, termasuk akses terhadap satuan PAUD yang sesuai standar. Akibatnya, banyak anak usia dini dari kelompok rentan tetap mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan PAUD yang memenuhi standar nasional mutu, sehingga berisiko tertinggal dalam kesiapan belajar ketika memasuki jenjang SD.

d. Program Kelas Rangkap

Program Kelas Rangkap PAUD - SD (atau dikenal juga sebagai multi-grade class) berperan strategis dalam mempercepat pencapaian kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya guru, ruang kelas, jumlah peserta didik, atau keterbatasan lainnya, yang belum memenuhi kapasitas satu rombongan belajar (rombel) utuh. Berikut penjelasan mendalam mengenai peran program ini:

- Meningkatkan Akses PAUD di Daerah Terpencil dan Minim Layanan
- Kelas rangkap memungkinkan satu pendidik menangani anak usia PAUD (5-6 tahun) dan siswa SD kelas awal (kelas 1 dan/atau 2) secara bersamaan dalam satu ruang belajar. Di banyak daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), jumlah peserta didik PAUD sering kali sedikit dan tidak sebanding dengan kebutuhan operasional satuan pendidikan. Dengan model ini, anak usia PAUD tetap dapat terlayani meskipun tidak ada PAUD formal di desa tersebut.





- Efisiensi Sumber Daya dan Saran

Model kelas rangkap memanfaatkan ruang kelas, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran yang sudah ada di SD, sehingga mencegah pemborosan anggaran dan mempercepat perluasan layanan PAUD tanpa harus membangun gedung baru atau menambah guru PAUD secara terpisah. Hal ini sangat relevan dalam konteks keterbatasan fiskal dan kebutuhan percepatan layanan universal PAUD satu tahun prasekolah.

- Mendorong Transisi dan Kesiapan Masuk SD

Anak PAUD dalam kelas rangkap terbiasa dengan suasana lingkungan SD sejak dini, yang memperkuat aspek transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Ini sejalan dengan prinsip transisi yang menyenangkan, sehingga anak tidak mengalami keterkejutan saat berpindah jenjang.

- Peningkatan Partisipasi dan Kepatuhan terhadap Wajib Belajar PAUD

Dengan pendekatan integratif ini, pemerintah daerah dan sekolah dapat lebih mudah mendorong orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke PAUD satu tahun prasekolah, karena pelaksanaannya dilakukan di sekolah dasar yang sudah dikenal masyarakat. Hal ini meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) PAUD 1 tahun prasekolah.

- Mendorong Kebijakan SD-Satu Atap atau Kemitraan Lintas Jenjang

Kelas rangkap PAUD-SD juga mendorong penguatan kebijakan pendidikan satu atap (PAUD-SD), di mana manajemen layanan PAUD menjadi bagian dari pengelolaan satuan pendidikan dasar, khususnya di sekolah yang memiliki potensi pengembangan layanan PAUD. Pendekatan ini memperkuat koordinasi lintas jenjang dan memudahkan supervisi serta penjaminan mutu.

3.1.2. Strategi Peningkatan Partisipasi

Strategi peningkatan partisipasi difokuskan kepada penyesuaian dan relaksasi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Dana BOP merupakan salah satu kebijakan afirmatif pemerintah dalam mendukung keberlangsungan layanan PAUD di seluruh Indonesia. BOP diberikan untuk membantu satuan PAUD dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional non-personalia, seperti pembelajaran, alat edukatif, kegiatan transisi, dan kebutuhan dasar lainnya. Saat ini, besaran BOP yang diberikan berkisar antara Rp600.000,00 hingga Rp900.000,00 per anak per tahun, berdasarkan wilayah dan kategori tertentu.

Namun demikian, tantangan untuk memenuhi target 100% partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam PAUD sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun menghadapkan kita pada kenyataan bahwa besaran BOP saat ini sudah kurang sesuai dengan beban biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh satuan PAUD untuk menyelenggarakan layanan yang layak dan berkualitas.

- Kebutuhan peningkatan pendanaan menjadi sangat mendesak mengingat:
- a. Inflasi tahunan yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa terkait pendidikan anak usia dini.
 - b. Tuntutan penyediaan layanan yang lebih komprehensif bagi anak usia 5–6 tahun menjelang masa transisi ke SD.
 - c. Penambahan jumlah anak usia wajib PAUD yang akan diterima tanpa pungutan biaya.
 - d. Kewajiban untuk menjamin pemerataan layanan di daerah 3T, daerah miskin, dan wilayah urban padat penduduk.

1. Struktur Biaya Operasional PAUD: **Fixed Cost dan Variable Cost**

Dalam menyelenggarakan layanan PAUD, satuan pendidikan tidak hanya menghadapi biaya berdasarkan jumlah peserta didik, tetapi juga memikul biaya tetap yang tidak bergantung pada jumlah anak. Oleh karena itu, kebijakan BOP seharusnya disesuaikan dengan struktur biaya nyata di lapangan, yang terdiri atas:

a. **Fixed Cost (Biaya Tetap)**

Fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh satuan PAUD terlepas dari jumlah peserta didik. Beberapa pengeluaran yang merupakan *fixed cost* diantaranya honor pendidik dan tenaga pendukung (non-PNS/non-sertifikasi), Operasional gedung (sewa, listrik, air, kebersihan), pemeliharaan sarana-prasarana, pembelian alat permainan edukatif (APE) dasar dan media belajar; serta administrasi dan pelaporan. Satuan PAUD dengan peserta didik sedikit pun tetap harus menanggung biaya ini secara penuh, sehingga alokasi BOP berbasis per anak sering kali tidak menutupi *fixed cost* secara memadai.

b. **Variable Cost (Biaya Variabel)**

Variable cost merupakan biaya yang berfluktuasi tergantung pada jumlah peserta didik. Yang termasuk *variable cost* pada BOP adalah bahan ajar individual (buku, alat tulis), makanan tambahan dan nutrisi, kegiatan pembelajaran individual dan kelompok, transportasi anak (terutama di daerah terpencil), serta kegiatan parenting dan pelibatan orang tua. Dengan meningkatnya jumlah anak usia 5–6 tahun yang diikutsertakan dalam PAUD, komponen *variable cost* juga meningkat secara proporsional, dan belum sepenuhnya tertutupi oleh alokasi BOP saat ini.

2. Kenaikan dan Penyesuaian Formula BOP PAUD

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformulasi kebijakan BOP PAUD yang lebih adaptif, berbasis kebutuhan, dan menjamin keberlanjutan layanan PAUD, khususnya untuk mendukung Wajib PAUD satu tahun prasekolah. Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Kenaikan Besaran BOP

melakukan kajian untuk menghitung kembali biaya operasional untuk satu orang anak usia dini yang mengikuti PAUD berdasarkan layanan yang tersedia, seperti TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Perhitungan biaya operasional sebaiknya merujuk pada keunikan setiap daerah yang berdampak pada perbedaan biaya yang ada.



b. Skema Alokasi Campuran

Skema Alokasi campuran yang menggabungkan *Fixed Grant* dan *Variable Grant*.

c. Formula Berbasis Indeks Afirmasi

Tambahan indeks untuk satuan PAUD di wilayah 3T, desa miskin ekstrem, wilayah urban padat dengan populasi tinggi, PAUD satu atap dengan SD

d. Incentif Daerah dan Dana Pelengkap

Pemerintah daerah dapat diberikan ruang fleksibel melalui DAK non-fisik atau DAU afirmatif untuk menambah alokasi BOP PAUD sesuai kebutuhan lokal. Hal ini dapat juga didorong dengan adanya Dana Komplementer dari CSR, BUMDes, dan filantropi lokal melalui payung kebijakan daerah.

e. Reformasi Mekanisme Penyaluran dan Evaluasi

Penyaluran BOP dikaitkan dengan indikator output dengan melihat jumlah anak usia 5-6 tahun terlayani dan kemajuan layanan PAUD. Pelaporan BOP pun perlu didorong untuk menggambarkan kualitas layanan bukan hanya sekedar kepatuhan administratif.

3.1.3. Strategi Peningkatan Mutu Layanan PAUD

Secara umum, mutu layanan PAUD dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi status akreditasi, kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan yang terkait dengan stimulasi terhadap kemampuan fondasi anak, kualifikasi tenaga pendidik, serta sejauh mana satuan PAUD mengimplementasikan konsep PAUD HI.

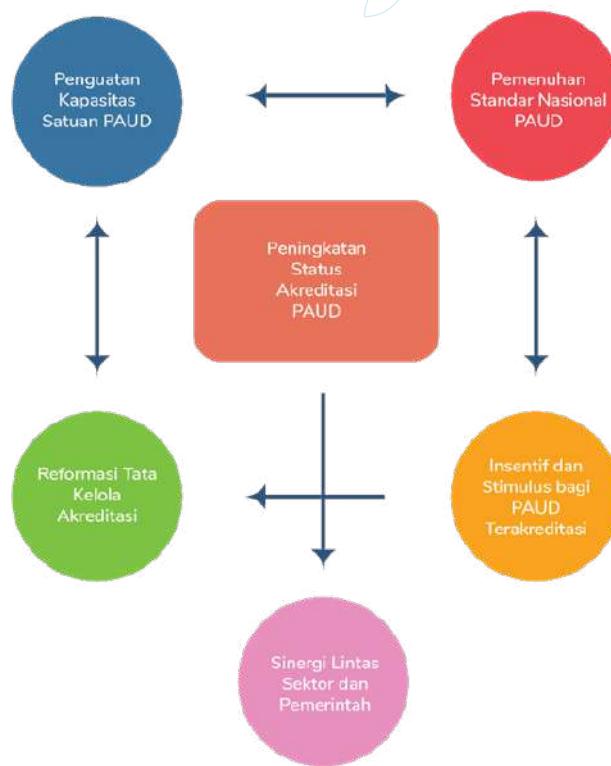
1. Akreditasi Satuan PAUD

Peningkatan status akreditasi layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Strategi ini dimulai dengan penguatan kapasitas satuan PAUD melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Program pelatihan, sertifikasi, dan komunitas belajar menjadi pilar utama dalam membekali guru PAUD agar mampu memenuhi standar proses pembelajaran yang bermutu. Selain itu, pendampingan teknis oleh asesor atau fasilitator daerah sangat penting untuk membantu satuan PAUD memahami instrumen akreditasi dan menyiapkan dokumen yang relevan.

Langkah berikutnya adalah memastikan satuan PAUD memenuhi Enam Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai dari standar isi hingga standar penilaian. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat dukungan dalam pemenuhan sarana prasarana, terutama bagi PAUD di daerah 3T. Penyediaan ruang kelas yang aman, alat permainan edukatif, dan fasilitas sanitasi menjadi indikator penting dalam asesmen akreditasi. Untuk itu, perlu sinergi lintas sektor dalam memastikan layanan esensial anak usia dini tersedia secara holistik, sesuai dengan prinsip PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI).

Reformasi tata kelola akreditasi juga menjadi kunci penting. Digitalisasi proses akreditasi melalui sistem e-akreditasi memungkinkan proses yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem akreditasi diferensial yang mempertimbangkan konteks geografis dan karakteristik satuan PAUD dapat meningkatkan inklusivitas dan keadilan dalam penilaian mutu. Di samping itu, pemberian insentif, seperti prioritas pendanaan atau penghargaan bagi PAUD terakreditasi, dapat menjadi stimulus penting dalam mendorong partisipasi dan semangat peningkatan mutu dari satuan pendidikan.

Akhirnya, strategi ini perlu diiringi oleh sosialisasi dan literasi publik yang luas tentang pentingnya akreditasi. Pemerintah dan lembaga penjaminan mutu dapat menyusun panduan praktis dan menyelenggarakan kampanye edukatif bagi pengelola PAUD, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga penting untuk mendorong regulasi lokal yang mendukung akreditasi PAUD sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan kombinasi strategi teknis, kebijakan, dan partisipatif ini, peningkatan status akreditasi PAUD bukan hanya menjadi target administratif, melainkan sebuah langkah nyata menuju layanan PAUD yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia. Keterkaitan antar komponen untuk meningkatkan status akreditasi PAUD dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Keterkaitan antar komponen untuk meningkatkan status akreditasi PAUD

2. Kualitas Pembelajaran

Peningkatan kualitas pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul sejak dini. Strategi utama yang dapat ditempuh meliputi empat aspek penting. Pertama, peningkatan kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan dan kurikulum yang kontekstual, termasuk penguatan pendekatan pembelajaran berbasis bermain (*learning through play*) dan pembelajaran sosial-emosional. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berkualitas, seperti alat permainan edukatif, ruang kelas ramah anak, dan bahan ajar kontekstual sesuai perkembangan anak. Ketiga, penguatan kemitraan dengan orang tua, yang diwujudkan dalam program parenting dan pelibatan aktif orang tua dalam proses belajar anak, sehingga tercipta kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan rumah. Keempat, peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala satuan PAUD, yang berperan dalam pengelolaan program pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan stimulatif.

Strategi ini harus terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal lembaga PAUD dan didukung oleh supervisi pembelajaran dari dinas pendidikan. Pendekatan berbasis data melalui asesmen perkembangan anak juga penting agar pembelajaran bersifat individual dan adaptif. Selain itu, integrasi layanan esensial anak (gizi, kesehatan, dan perlindungan) dalam satuan PAUD akan memperkuat aspek holistik-integratif pembelajaran. Upaya ini menuntut dukungan kebijakan, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor agar transformasi kualitas pembelajaran PAUD dapat berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.



3. Pengayaan Konten Pedagogi

Pengayaan konten pedagogi adalah upaya terencana untuk memperluas dan memperdalam pengalaman belajar di PAUD dengan memadukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai guna membentuk perkembangan anak secara holistik integratif—meliputi aspek kognitif, sosial-emosional, moral, budaya, dan literasi masa depan—serta berlandaskan penghormatan atas hak dan keunikan setiap anak. Beberapa konten pedagogy yang dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan di satuan PAUD.

a. Pembelajaran Agama dan Karakter

Pembelajaran Agama di PAUD diarahkan sebagai upaya untuk membangun kebiasaan beragama dari sejak kecil dan pembentukan karakter. Kegiatan dirancang melalui pendekatan bermain. Kegiatan difokuskan kepada hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak seperti untuk menumbuhkan akhlak mulia, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian pada sesama dan alam serta membentuk anak yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, mampu bekerja sama, dan menghargai kebhinekaan. Pendidikan karakter juga dimaksudkan untuk membangun 7 karakter anak Indonesia.

b. Deep Learning

Melalui pendekatan inkuiri dan proyek kontekstual, *deep learning* menstimulasi anak menaikkan konsep, menggali sebab-akibat, serta merefleksikan pengalaman; praktiknya mencakup diskusi berbasis pertanyaan terbuka dan proyek pemecahan masalah nyata yang menumbuhkan metakognisi dan kreativitas kritis (Fullan & Langworthy, 2014).

c. Penguasaan STEAM

Integrasi sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika diperkenalkan lewat eksplorasi laboratorium mini, “coding unplugged”, serta kreasi seni berbasis eksperimen; tujuan akhirnya adalah membangun literasi numerik-ilmiah dan daya imajinasi yang menyiapkan anak menghadapi ekosistem ekonomi digital masa depan.

d. Bahasa Ibu

Penggunaan bahasa ibu disandingkan dengan Bahasa Indonesia memperkuat identitas, meneguhkan rasa aman linguistik, dan mempermudah transfer konsep; implementasinya mencakup dongeng dwibahasa, percakapan kelas sehari-hari, serta penandaan lingkungan belajar dengan dua bahasa untuk menjembatani nalar dan budaya anak.

e. Budaya Lokal

Menghidupkan warisan budaya melalui musik tradisional, permainan rakyat, dan cerita daerah membantu anak menumbuhkan rasa memiliki sekaligus memperkaya skema pengetahuan; strategi ini juga menegaskan bahwa konteks lokal adalah sumber belajar otentik yang relevan dan bermakna bagi perkembangan identitas sosial mereka.

f. Nilai-Nilai Multikultural dan Inklusif

Pembiasaan empati, kesetaraan gender, dan penghargaan atas keberagaman diwujudkan lewat “circle-time” berbagi cerita keluarga, literatur bergambar yang menampilkan tokoh beragam, dan penataan lingkungan yang ramah disabilitas; langkah tersebut membangun kesadaran kritis bahwa setiap anak berhak tumbuh tanpa stigma atau hierarki.



g. Penguasaan Teknologi

Literasi digital dini dipupuk melalui aplikasi edukatif, *augmented reality*, dan portofolio digital yang didokumentasikan bersama orang tua; pendekatan ini memastikan anak dapat berinteraksi dengan teknologi secara kreatif-kritis sekaligus menanamkan kebiasaan penggunaan media yang aman dan bertanggung jawab (UNESCO, 2022).

4. Tenaga Pendidik

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu layanan pendidikan anak usia dini. Strategi yang dapat dilakukan mencakup pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan kemitraan lintas sektor.

Pertama, peningkatan kualifikasi akademik dilakukan dengan mendorong guru PAUD yang belum berkualifikasi minimal D4/S1 untuk mengikuti program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), beasiswa afirmatif, dan pendidikan berjenjang berbasis kompetensi. Program ini penting untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan guru PAUD, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kedua, peningkatan kompetensi berkelanjutan difokuskan pada pelatihan berbasis kebutuhan (in-service training), termasuk pelatihan berbasis pendekatan pembelajaran holistik-integratif, asesmen perkembangan anak, penyusunan rencana pembelajaran, serta penggunaan alat permainan edukatif. Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara luring maupun daring melalui *platform* digital dan pelatihan daring dari Kemendikdasmen dan lembaga-lembaga mitra.

Ketiga, penguatan komunitas belajar dan supervisi. Guru perlu difasilitasi untuk bergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD dan komunitas praktik untuk saling berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran. Pendampingan dan supervisi yang dilakukan oleh pengawas dan penilik PAUD juga harus diarahkan untuk menjadi pembina profesional, bukan hanya pelaksana administrasi.

Keempat, penguatan sistem insentif dan jenjang karier, seperti pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi, pemberian tunjangan fungsional, serta sistem penilaian kinerja guru berbasis pembelajaran. Upaya ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan pendanaan yang memadai dari pusat maupun daerah.

Dengan strategi yang terintegrasi ini, diharapkan guru PAUD tidak hanya memenuhi standar kualifikasi formal, tetapi juga mampu menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak usia dini.

5. Skema Guru PAUD-SD Kontinum

Secara kajian akademik, Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, sejak anak berada dalam kandungan sehingga berusia 0 sampai dengan 8 tahun. Sehingga kontinuitas program di tingkat PAUD dan SD kelas awal (1-3 SD) menjadi sangat penting.



Skema Guru PAUD-SD Kontinuum (0-8 tahun) dirancang untuk mempercepat Wajar Satu Tahun Pra-Sekolah dengan menyatukan PAUD dan kelas awal SD sebagai satu rentang perkembangan yang utuh. Pendekatan ini berbasis hak anak dan DAP (*developmentally appropriate practice*). Pendekatan ini menekankan ko-perencanaan, ko-pengajaran, dan ko-asesmen antara guru PAUD dan SD agar transisi anak dari PAUD ke Kelas 1-2 berlangsung mulus serta memperkuat kemampuan literasi-numerasi dini yang kontekstual dengan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain. Kesinambungan kurikulum mencakup sosial-emosional, bermain-inkuiri, bahasa dan literasi dini, numerasi dini, motorik, seni, sains awal, serta penguatan bahasa ibu; portofolio perkembangan anak bergerak lintas satuan sebagai dasar diferensiasi di SD.

Program ini juga dapat menunjang strategi-strategi yang ada pada perluasan akses dan daya tampung. Program ini dapat mendukung program PAUD-SD Satu Atap, Kelas Rangkap, Perluasan Kewenangan PAUD, Penegerian PAUD dan juga Guru Kunjung. Program ini membuka kesempatan bagi guru SD kelas awal untuk dapat mengajar di PAUD, dan guru PAUD pun dapat mengajar di SD kelas awal.

Agar program ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, maka penguatan program perlu dilakukan dari sejak program S1 dan Pendidikan Profesi Guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Karenanya selain dilakukan pengembangan kurikulum bersama, perlu juga dibuat program seperti mikrokredensial dan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) terpadu.

5. Penyediaan Layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)

Penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di satuan PAUD bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak usia dini secara menyeluruh, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan. Strategi ini diawali dengan penguatan tata kelola melalui pembentukan tim pelaksana PAUD HI di satuan PAUD, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pendidik, kepala satuan, kader kesehatan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Tim ini bertugas menyusun rencana kerja tahunan, memfasilitasi kegiatan lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, satuan PAUD perlu mengintegrasikan layanan esensial seperti skrining tumbuh kembang, penyuluhan gizi, edukasi cuci tangan, dan parenting education yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Puskesmas, Posyandu, dan Dinas Sosial.

Strategi berikutnya adalah memperkuat kemitraan lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pemerintah desa untuk menjamin dukungan sumber daya dan kelancaran pelaksanaan layanan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik menjadi krusial agar guru PAUD memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan holistik, memahami karakteristik tumbuh kembang anak, dan mampu berkoordinasi dengan sektor lain. Satuan PAUD juga harus mendorong partisipasi aktif keluarga dan komunitas melalui kegiatan parenting dan forum komunikasi, guna menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak. Akhirnya, penguatan ini perlu didukung oleh skema pendanaan yang memadai, termasuk optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dan Dana Desa, serta pengembangan sarana prasarana yang mendukung kebutuhan anak secara komprehensif. Dengan strategi ini, PAUD HI dapat memberikan layanan yang lebih bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

3.1.4. Strategi Penguatan Tata Kelola

Agar kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran, aspek tata kelola perlu diperkuat. adapun strategi penguatan tata kelola mencakup:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Hal pertama yang harus disiapkan adalah sinkronisasi regulasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PAUD merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga anggaran dan kebijakan PAUD pun menjadi bagian yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) perlu memastikan bahwa kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' diakomodasi dalam peraturan daerah (Perda), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja dinas pendidikan kabupaten/kota. Pemerintah pusat perlu mengembangkan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program ini. Selain itu bimbingan dan teknis untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat pun perlu dilakukan secara terencana.

Di antara sejumlah hal mendesak yang perlu diakomodir dalam regulasi di tingkat daerah adalah hal-hal yang terkait perizinan, status tenaga pendidik, anggaran dan unit kerja yang akan mengimplementasikan program ini. Untuk perizinan, perlu dilakukan "relaksasi" perizinan terutama untuk layanan PAUD-SD Satu Atap, Pembangunan Unit Satuan Baru (USB), Perluasan Kewenangan PAUD Non-Formal, Penegerian PAUD, dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Selain itu, peraturan perlu membahas mengenai mekanisme kepemimpinan pada program PAUD-SD Satu Atap untuk memastikan tidak adanya dualisme kepemimpinan pada kedua jenjang pendidikan terkait yang mengimplementasikan program itu. Peraturan tersebut juga perlu memastikan bahwa hak guru, baik terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan, tetap dapat dipenuhi meskipun mereka mengajar dalam situasi yang berbeda.

2. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' memerlukan kerja sama lintas sektoral karena layanan pendidikan anak usia dini menyentuh berbagai aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan anak, hingga pembangunan wilayah. Kolaborasi antar sektor menjadi kunci karena satu kementerian saja tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak secara holistik. Setidaknya terdapat 6 (enam) kementerian terkait yang berperan penting dalam mendukung kebijakan ini, yaitu: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Kolaborasi antar kementerian diperlukan tidak hanya untuk menyusun kebijakan yang saling melengkapi, tetapi juga untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Integrasi antar sektor memungkinkan penyusunan perencanaan



berbasis data, pengalokasian anggaran yang efisien, serta penjaminan mutu layanan PAUD di berbagai jenis lembaga, baik formal maupun non-formal. Sinergi ini menjadi semakin penting dalam konteks daerah 3T yang membutuhkan pendekatan afirmatif agar akses terhadap layanan PAUD dapat merata. Forum koordinasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah juga diperlukan untuk menyatukan langkah dan menghindari tumpang tindih program.

Lebih jauh, kerja sama lintas sektoral memungkinkan hadirnya pendekatan holistik-integratif dalam layanan PAUD. Setiap kementerian memiliki mandat dan sumber daya yang unik, yang apabila digabungkan akan turut memperkuat keberlanjutan program serta menciptakan layanan PAUD yang responsif terhadap kebutuhan anak dan konteks lokal. Dengan sinergi yang baik antar kementerian dan lembaga, kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' tidak hanya menjadi kebijakan nasional yang simbolik, tetapi benar-benar terwujud sebagai layanan nyata yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Selain peran dari berbagai kementerian, peran Bunda PAUD dan organisasi mitra sangat vital dalam mendukung keberhasilan kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'. Keduanya menjadi ujung tombak dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kualitas layanan, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada anak usia dini di tingkat lokal.

Bunda PAUD, yang umumnya adalah istri kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau desa, memiliki peran strategis sebagai figur teladan, penggerak, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah', Bunda PAUD berperan sebagai motor penggerak sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Mereka juga menjadi advokat utama yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, memperluas layanan PAUD, dan memastikan adanya regulasi yang mendukung wajib PAUD. Di tingkat desa, Bunda PAUD dapat turut berperan langsung dalam mendampingi kader, memantau layanan posyandu-PAUD, serta menginisiasi forum komunikasi antar orang tua dan pendidik.

Sementara itu, organisasi mitra seperti HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, PKK, lembaga keagamaan, LSM, perguruan tinggi, serta sektor swasta memiliki fungsi pendukung dan kolaboratif. Mereka dapat berperan dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pengelola PAUD, penyediaan sarana belajar, pembinaan kurikulum, hingga penyelenggaraan layanan PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI).

Melalui sinergi antara peran inspiratif Bunda PAUD dan kontribusi konkret dari berbagai organisasi mitra, kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' tidak hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi juga gerakan sosial dan kultural yang kuat, merata, dan berkelanjutan demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.

3. Penguatan Kapasitas dan Dukungan Anggaran

Anggaran memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana melalui berbagai mekanisme seperti DAK Fisik dan Nonfisik, DAU, serta PAUD. Dukungan tersebut mencakup operasional PAUD melalui BOP, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur PAUD, termasuk fasilitas pendukung pembelajaran anak.

Selain pengalokasian dana, Kemenkeu juga mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijakan fiskal afirmatif yang mendorong daerah, khususnya wilayah 3T, untuk memprioritaskan anggaran PAUD dalam APBD. Melalui sinergi dengan Bappenas dan kementerian teknis lainnya, kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' seyoginya selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Secara lebih khusus, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan agar distribusi dana berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.

Namun demikian, gagasan penguatan kapasitas dan dukungan anggaran dalam praktiknya seringkali tidak mudah dilaksanakan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan ketimpangan layanan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan skema pendanaan alternatif melalui kemitraan lintas sektor. Dunia usaha, lembaga filantropi, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dapat memperkuat layanan PAUD melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), pelatihan, penyediaan fasilitas, hingga program kesehatan anak. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem PAUD yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan secara nasional.

3.2. Strategi Advokasi dan Kampanye Pentingnya PAUD

3.2.1. Strategi Advokasi

Tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan angka partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam layanan PAUD yang bermutu dan inklusif, dengan target 87,75% pada tahun 2029. Sementara, tujuan pendukung dari strategi advokasi meliputi:

1. Memastikan seluruh Provinsi mendorong perluasan akses dan partisipasi anak terhadap layanan PAUD berkualitas
2. Memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki layanan PAUD berkualitas di setiap desa
3. Meningkatkan kapasitas Dinas Pendidikan, UPT, dan pemangku kepentingan lokal dalam advokasi dan perencanaan pendidikan prasekolah
4. Mendorong satuan PAUD untuk menerapkan layanan holistik-integratif;
5. Mengedukasi masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya PAUD bermutu.





Adapun contoh penetapan target sasaran dalam pelaksanaan advokasi di tingkat pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut ini.



Gambar 3. 10. Target Sasaran Strategi Advokasi

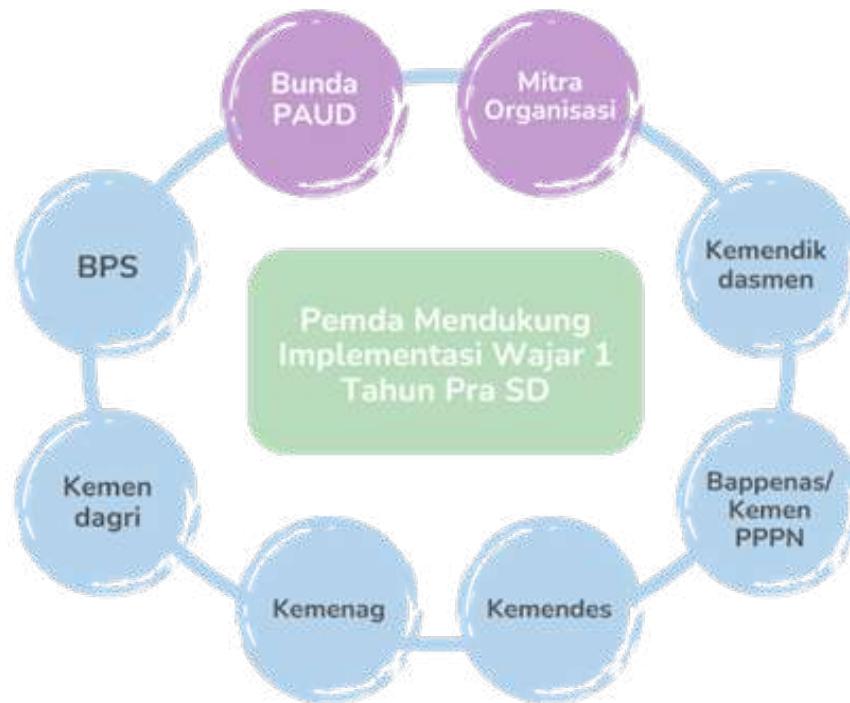
Dibawah ini merupakan beberapa bentuk strategi dalam melakukan advokasi untuk mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 1 tahun pra sekolah yang menyasar semua pihak yang relevan ditingkat pusat dan daerah. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Kebijakan: Regulasi dan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah berbasis data pusat dan daerah.
2. Penyadaran Masyarakat: Manfaat pendidikan prasekolah inklusif untuk masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan.
3. Penguatan Kapasitas: UPT, Dinas Pendidikan, Bunda PAUD, organisasi mitra dan disabilitas, perguruan tinggi.
4. Kemitraan Multi Pihak: Sinergi pusat dan daerah untuk percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.
5. Ekspansi Layanan Berkualitas: Perluasan layanan PAUD yang bermutu.
6. Kampanye Publik: Libatkan orang tua dan masyarakat mendukung PAUD inklusif.
7. Manajemen Pengetahuan: Dokumentasi dan diseminasi praktik baik setiap tahap.
8. Pelibatan Media: Komunikasi strategis dan narasi yang tepat untuk perubahan perilaku.
9. Penyusunan Materi Advokasi: Kontekstual dan sesuai kebutuhan wilayah.
10. Pendampingan Pemda: Penyusunan strategi daerah untuk percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.

Untuk memastikan keberhasilan strategi advokasi dan efektivitas peran tersebut diperlukan kerjasama di antara kementerian/lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama sinergis ini mencakup aspek perumusan kebijakan, penguatan kapasitas, hingga penyediaan data yang valid untuk perencanaan dan pemantauan kebijakan yang diterapkan.

Di samping itu, dukungan dari mitra organisasi dan peran strategis Bunda PAUD memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan advokasi, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya layanan PAUD yang holistik dan inklusif. Pelibatan multipihak ini menggambarkan pendekatan intersektoral yang sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan demikian, transformasi PAUD menuju wajib belajar yang bermutu dapat diwujudkan melalui kolaborasi menyeluruh berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah. Diagram berikut menggambarkan peran lintas sektor yang berkontribusi dalam mendorong terlaksananya layanan PAUD yang bermutu dan merata.



Gambar 3. 11. Strategi dalam penyusunan regulasi dan advokasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’

Untuk memperkuat dukungan terhadap peran lintas sektor tersebut, sebagaimana pada Gambar 3.11., maka berikut tahapan dalam penyusunan regulasi dan advokasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, di antaranya adalah:

1. Menyediakan data pendukung untuk melengkapi informasi terkait dengan pemenuhan layanan PAUD untuk anak usia 5-6 tahun;
2. Membuat regulasi yang mendorong pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ agar berjalan efektif;
3. Melakukan advokasi untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’; dan
4. Melakukan pendampingan terhadap keberlangsungan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’

Agar kebijakan ini dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara luas, perlu dilakukan aktivitas advokasi yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu strategi kuncinya adalah melalui sosialisasi, khususnya dalam hal penyampaian informasi dan edukasi, kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya pendidikan prasekolah bagi anak usia



5-6 tahun sebagai bagian dari wajib belajar. Sosialisasi dan promosi ini dapat diperkuat melalui publikasi pada berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun konvensional, antara lain melalui media sosial, laman resmi kementerian dan lembaga, webinar atau seminar daring, media massa seperti koran dan televisi, serta media audio seperti podcast. Konten yang disebarluaskan harus informatif, mudah dipahami, dan kontekstual dengan kondisi masyarakat.

Kegiatan advokasi ini menargetkan tiga kelompok sasaran utama. Pertama, dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi terhadap layanan PAUD di daerah. Kedua, satuan PAUD sebagai pelaksana teknis yang langsung berinteraksi dengan anak dan orang tua mereka. Ketiga, orang tua dan masyarakat umum, sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan pendidikan anak dan penggerak partisipasi komunitas. Pemahaman dan dukungan dari berbagai kelompok sasaran menjadi fondasi utama bagi keberhasilan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, sehingga dihasilkan layanan PAUD yang bermutu, merata, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia.

Agar pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan berdampak luas, diperlukan mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi ini dilakukan serangkaian tahapan yang mencakup penilaian terhadap proses, output, dan outcome serta dampak dari implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’. Evaluasi terhadap strategi ini difokuskan pada keterlibatan berbagai sektor terkait, kebijakan atau regulasi yang dihasilkan, intensitas dan jangkauan kegiatan sosialisasi, serta perubahan tingkat kesadaran dan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap pentingnya PAUD.

Evaluasi terhadap keberhasilan strategi ini dilakukan secara berkala pada 3 (tiga) titik waktu utama, yaitu awal tahun (*baseline*), pertengahan tahun (*midline*), dan akhir tahun (*endline*) yang ditindaklanjuti melalui evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap dua hingga tiga tahun untuk menilai keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari strategi advokasi yang dijalankan.

3.2.2. Strategi Kampanye Pentingnya PAUD

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) memiliki peran penting dalam rangka menyiapkan mereka untuk memasuki pendidikan pada jenjang sekolah dasar, sehingga masa transisi dari pendidikan prasekolah ke pendidikan formal (sekolah) tidak mengalami kendala. Di samping itu, secara jangka panjang, PAUD merupakan basis strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang berkualitas, karena walau bagaimanapun pendidikan pada level PAUD menjadi landasan untuk proses pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya. Untuk keberhasilan kedua hal tersebut, maka perlu dilakukan kampanye melalui sosialisasi dan promosi tentang pentingnya PAUD sebagai bagian dari proses pendidikan yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak pihak terkait, salah satunya adalah masyarakat.

Konsep dasar dari kampanye pentingnya PAUD adalah menyadarkan seluruh elemen masyarakat bahwa pendidikan pada usia dini merupakan tahap kritis dalam pengembangan kecerdasan dan keterampilan serta pembentukan karakter anak. Kampanye ini menekankan

pada pemahaman bahwa pendidikan pada usia dini bukan hanya tentang mengenalkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan semata, namun lebih jauh tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan.

Adapun tujuan dari kampanye pentingnya PAUD adalah untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, hingga pemerintah dalam mendukung layanan PAUD berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif semua elemen pemangku kepentingan, diharapkan terbangun kesadaran kolektif yang memicu kepedulian dalam meningkatkan akses dan mutu layanan yang ditunjang dengan kebijakan yang berpihak pada pengembangan PAUD di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran utama dari kampanye ini adalah orang tua, tokoh masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta penentu kebijakan di berbagai tingkatan, khususnya pada wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan PAUD.

Manfaat dari kampanye ini diharapkan meliputi: peningkatan pengembangan potensi anak, baik secara individual maupun kelompok; penguatan kesiapan belajar anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; dan penyiapan sumber daya manusia masa depan yang unggul dan kompetitif. Oleh karena itu, kampanye ini berfokus pada: peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya PAUD; perluasan akses layanan PAUD yang berkualitas, terjangkau, dan merata; serta penguatan kapasitas PAUD dan pengelolaannya. Terkait dengan hal tersebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan elemen pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kampanye pentingnya PAUD tersebut. Untuk mendukung efektivitas kampanye, diperlukan strategi implementasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong komitmen dan aksi nyata dalam mendukung PAUD sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Strategi kampanye Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah menekankan kepada lima pesan penting sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak

Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas layanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang bermutu sejak dini. Layanan harus aman, inklusif, ramah disabilitas, peka budaya dan bahasa ibu, serta terjangkau tanpa syarat calistung sebagai pintu masuk. Dengan pendekatan bermain belajar, pemenuhan gizi, dan dukungan kesehatan, negara dan pemerintah daerah memastikan hak anak terpenuhi secara holistik.

2. Kesiapan transisi PAUD-SD

Program ini memastikan transisi yang mulus dari PAUD ke SD melalui penyelarasan kurikulum, asesmen yang ramah anak, dan kolaborasi guru-orang tua. Fokusnya adalah kesiapan holistik, sosial-emosional, kemandirian, bahasa, dan keterampilan dasar, bukan sekadar kemampuan akademik awal. Tanpa seleksi calistung, setiap anak didampingi agar percaya diri memasuki SD.

3. PAUD sebagai periode emas

Usia dini adalah fase perkembangan otak paling pesat sehingga intervensi berkualitas berdampak besar bagi masa depan anak. Ketika layanan PAUD bermutu tersedia merata bagi keluarga kurang mampu, kesenjangan awal dapat dipersempit: anak memperoleh

stimulasi, nutrisi, dan dukungan sosial-emosional yang setara. Ini membuka peluang mobilitas sosial sejak awal dan memperkuat keadilan sosial karena titik berangkat anak menjadi lebih adil.

4. PAUD sebagai fase membentuk karakter

PAUD menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti melalui praktik keseharian: empati, gotong royong, integritas, tanggung jawab, dan disiplin positif. Anak belajar mengelola emosi, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah secara damai dalam lingkungan yang aman dan supportif. Pembiasaan yang konsisten di rumah-sekolah menjadi fondasi karakter sepanjang hayat.

5. PAUD sebagai fondasi generasi emas

Investasi satu tahun pra-sekolah menyiapkan generasi 2045 yang sehat, cerdas, berakhlak, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan menjamin akses PAUD berkualitas bagi semua terutama kelompok rentan, daerah 3T, dan anak dengan disabilitas program ini memutus rantai ketertinggalan antargenerasi, memperluas kesempatan belajar dan kerja di masa depan, serta mendorong mobilitas sosial. Inilah jalan sistemik menuju keadilan sosial dan daya saing bangsa.

Bentuk-bentuk Kegiatan Kolaborasi di tingkat Daerah

a. Kolaborasi Pokja Bunda PAUD dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Pokja Bunda PAUD dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memegang peran strategis sebagai mitra utama dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan, khususnya dalam menguatkan advokasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'. Kolaborasi antara kedua entitas ini secara khusus menyarankan anak usia 5-6 tahun (beserta keluarganya), baik yang berada dalam binaan Pokja Bunda PAUD maupun dalam lingkup masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan TP-PKK.



Gambar 3. 12. Peran dan dukungan Pokja Bunda PAUD

Selain berperan dalam pelaksanaan program, kerjasama ini memiliki kekuatan sosial yang signifikan dalam menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat serta memperkuat penyebarluasan nilai-nilai pendidikan untuk anak usia dini di lingkungan keluarga dan komunitas.

Peran dan Dukungan Pokja Bunda PAUD dalam pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah (Gambar 3.12.) adalah sebagai berikut:

- Mendorong penyediaan data pendukung
- Mendorong pembentukan kebijakan daerah
- Melakukan advokasi
- Melakukan pendampingan

Secara lebih spesifik, peran strategis Pokja Bunda PAUD dapat dilihat pada Gambar 3.15. berikut ini.



Gambar 3. 13. Peran Strategis Pokja Bunda PAUD

Cakupan dan peran Pokja Bunda PAUD dalam mendukung kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 14. Cakupan dan peran Pokja Bunda PAUD

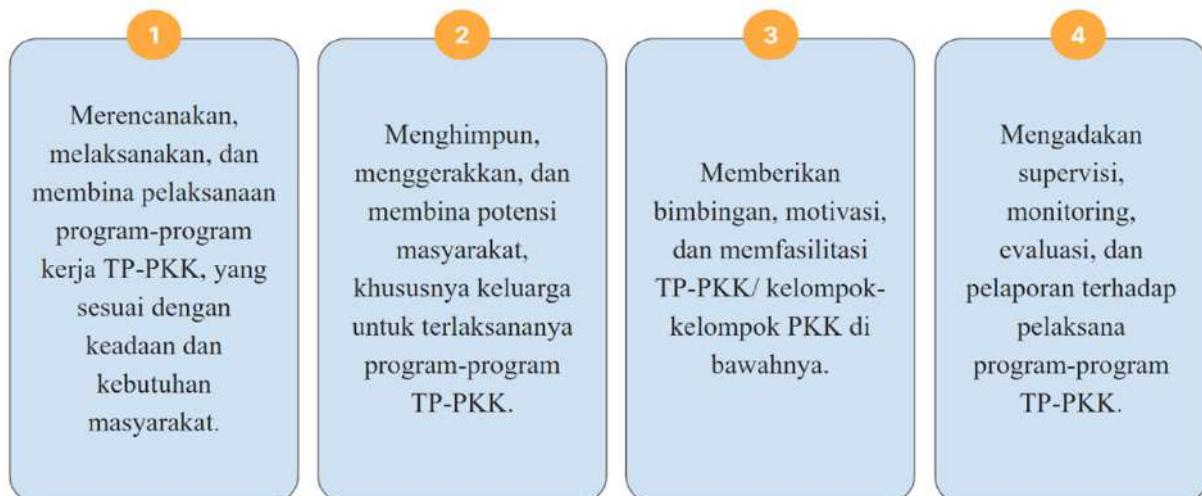
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan keluarga. Terkait dengan hal tersebut, TP-PKK memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya dengan dasar Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Permendagri No. 36 Tahun 2020, sehingga peran serta dan pelaporannya dapat dipantau secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.



Sebagai organisasi yang mengakar hingga ke lingkungan keluarga, TP-PKK dapat menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Melalui sistem manajemen informasi ‘Gerakan PKK’ yang dikelola secara terpadu oleh lembaga terkait, implementasi program dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur.

Selain itu, keterlibatan TP-PKK pada setiap jenjang (pemerintahan) yang dibentuk secara resmi oleh menteri terkait dan kepala daerah memungkinkan penyebarluasan informasi serta koordinasi program berjalan lebih efektif. Ketua TP-PKK, yang umumnya merupakan istri dari kepala daerah atau istri dari pejabat yang ditunjuk, memiliki kapasitas untuk mendorong komitmen pemangku kepentingan terhadap berbagai kebijakan. Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ tidak terkecuali.

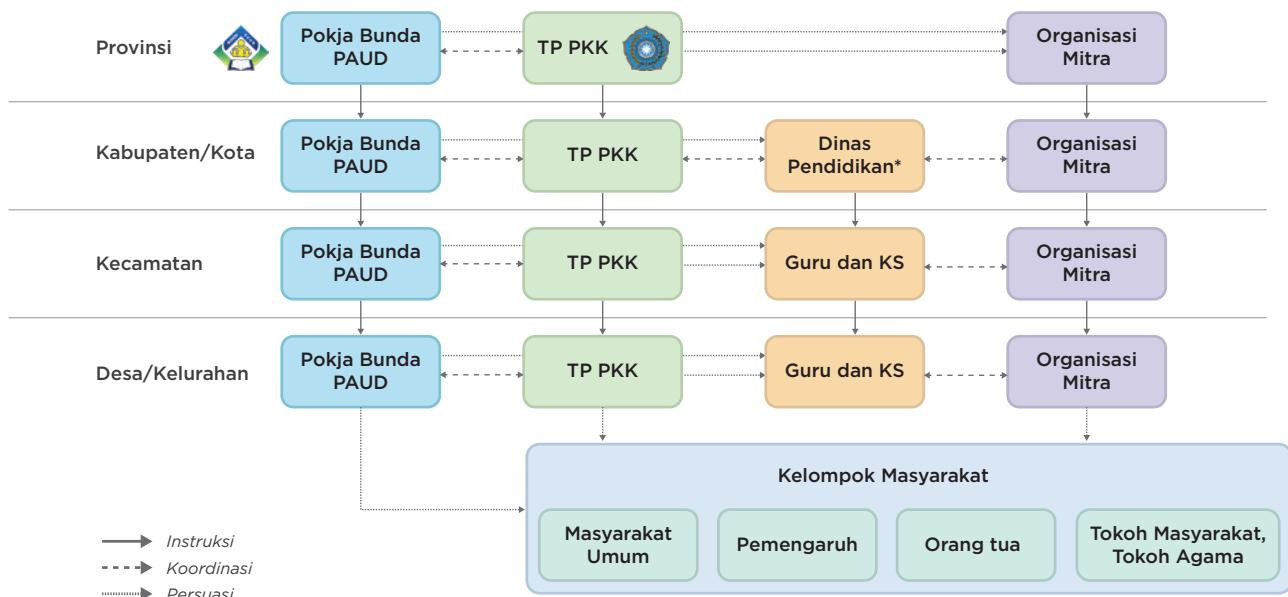
TP-PKK juga memiliki kekuatan dalam membangun kolaborasi lintas sektor, yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, terutama dalam hal sosialisasi dan promosi, identifikasi anak usia dini yang belum bersekolah, serta penguatan peran orang tua untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Dari sisi pendanaan, program yang melibatkan TP-PKK dapat dibiayai melalui berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan APBDes (sesuai Pasal 62 Permendagri No. 36 Tahun 2020), yang memberikan fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran. Lebih jelasnya peran strategis dari TP-PKK di tingkat pusat dan daerah dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15. Peran strategis dari TP-PKK di tingkat pusat dan daerah

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, diperlukan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan secara fungsional. Salah satu kunci keberhasilan advokasi dan mobilisasi masyarakat dalam program ini adalah kolaborasi antara Pokja Bunda PAUD dan TP-PKK pada setiap jenjang (pemerintahan), mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan. Masing-masing mereka memiliki peran strategis sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya serta dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, baik berupa instruksi, koordinasi, maupun persuasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun alur kolaborasi Pokja Bunda PAUD dan TP-PKK dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Pokja Bunda PAUD dan TP PKK dapat menggunakan pola komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang berbeda-beda, dengan bekal kewenangan yang diampu oleh masing-masing



Gambar 3. 16. Alur kolaborasi Pokja Bunda PAUD dan TP-PKK

Untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara Pokja Bunda PAUD dan TP-PKK dalam mendukung kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' dilakukan serangkaian tahapan evaluasi yang mencakup aspek proses, luaran, dan dampak. Evaluasi ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi, promosi, advokasi, pendampingan, serta penguatan kebijakan dan data yang dilaksanakan di berbagai jenjang (pemerintahan). Proses evaluasi dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan dinas pendidikan, Pokja Bunda PAUD, TP-PKK, dan mitra organisasi serta pihak terkait lainnya, termasuk lembaga riset. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap tahun. Melalui evaluasi mendalam setiap dua hingga tiga tahun akan terevaluasi keberlanjutan program dan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan PAUD.

b. Diseminasi di Daerah

Dalam upaya memperluas jangkauan kampanye nasional tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), strategi diseminasi informasi menjadi elemen penting untuk memastikan pesan kampanye tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Oleh karena itu, pendekatan diseminasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, khususnya antara wilayah non-3T dan wilayah 3T.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) ditetapkan berdasarkan enam kriteria utama, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Adapun indikator dan subindikator dari enam kriteria tersebut diatur dalam *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020*. Daerah 3T umumnya menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan



layanan dasar, termasuk pendidikan, sehingga metode diseminasi di wilayah ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi setempat. Strategi diseminasi pada Tabel 3.2. dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan kedua kategori wilayah tersebut dengan mempertimbangkan pelaksana, partisipan, serta alternatif teknis pelaksanaan yang sesuai dengan kapasitas dan tantangan masing-masing daerah.

Tabel 3. 2. Strategi Diseminasi di Daerah

No	Bentuk Diseminasi	Pelaksana	Partisipan	Alternatif Teknis	
				Daerah Non - 3t	Daerah 3T
1	Seminar, Lokakarya, dan Pelatihan (Luring) Webinar (Daring)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Dinas Pendidikan; Satuan PAUD; Organisasi Pendidikan; Akademisi	Pendidik PAUD; Calon Pendidik PAUD; Orang Tua	Luring: Menggunakan ruang pertemuan modern dengan fasilitas multimedia Daring: Menggunakan <i>platform</i> zoom, google meet, atau <i>Youtube</i> Live dengan sesi interaktif dan rekaman yang dapat diakses kembali	Luring: Dilakukan secara tatap muka dengan metode berbasis praktik langsung Daring: Webinar direkam dan didistribusikan melalui flashdisk/ CD dan ditayangkan melalui radio komunitas atau siaran televisi lokal
2	Pertemuan Tatap Muka	Pemerintah Daerah; Satuan PAUD	Orang Tua; Pemangku Kepentingan Lokal	Diskusi dalam forum yang sudah terjadwal dengan peserta yang lebih besar	Dilaksanakan dalam kelompok kecil dengan pendekatan informal di rumah-rumah warga atau balai desa
3	Pemanfaatan Media Massa Online	Media Nasional dan Lokal; Influencer Pendidikan, Pemerintah, Organisasi non-profit	Masyarakat umum; Orang Tua; Tenaga Pendidik PAUD	Penyebaran artikel, opini, dan berita melalui portal berita, blog, dan podcast	Penyampaian informasi melalui radio komunitas, majalah daerah, dan papan pengumuman desa
4	Berbasis Komunitas	Organisasi masyarakat; RT/RW, tokoh masyarakat	Orang Tua; Kader Posyandu; Pendidik PAUD; Masyarakat daerah setempat	Kegiatan sosialisasi berbasis komunitas dengan pendekatan modern seperti seminar dan program parenting	Menggunakan pendekatan budaya lokal, pertemuan adat, dan diskusi di posyandu atau balai desa

c. Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan

Dalam upaya memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendorong kampanye nasional mengenai pentingnya pendidikan sejak dini, kolaborasi strategis dengan mitra pembangunan merupakan pendekatan yang sangat penting dan relevan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mitra pembangunan adalah berbagai pihak, baik institusi formal maupun non-formal pada level lokal, nasional, atau internasional, yang mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga memperdalam dampak intervensi melalui pemanfaatan keahlian, sumber daya, dan jaringan mitra yang telah berpengalaman dalam sektor pembangunan, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini.

Mitra pembangunan secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut: berkomitmen yang kuat terhadap agenda pembangunan jangka panjang, mempunyai kapasitas kelembagaan

dan teknis yang memadai, serta didukung oleh jejaring kemitraan yang dapat dimobilisasi untuk mendukung implementasi program secara lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, mitra pembangunan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penyelenggaraan PAUD karena dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan PAUD.

Kolaborasi dengan mitra pembangunan dalam konteks kampanye pentingnya PAUD dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan manajerial, termasuk pelatihan berbasis teknologi dan pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan anak.

2. Pengembangan dan Penyediaan Sumber Belajar

Penyediaan materi ajar dan sumber belajar yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup dukungan terhadap digitalisasi pembelajaran dan pengembangan konten edukatif berbasis budaya dan nilai-nilai lokal.

3. Penguatan Sistem dan Kebijakan PAUD

Kolaborasi dalam proses penyusunan kebijakan, penguatan regulasi, dan peningkatan sistem tata kelola PAUD di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi layanan PAUD yang adaptif dan terukur.

4. Pendanaan Program dan Mobilisasi Sumber Daya

Dukungan finansial untuk pelaksanaan program-program prioritas, khususnya yang berorientasi pada penguatan layanan PAUD di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan dan marginal.

5. Kampanye dan Advokasi Publik

Pelaksanaan kampanye terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini. Mitra pembangunan dapat mendukung penyusunan materi kampanye, pelibatan media massa, serta pelaksanaan dialog publik di berbagai tingkatan.

6. Riset dan Inovasi

Dukungan terhadap pelaksanaan riset aksi, studi kasus, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkaya praktik baik dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan PAUD, termasuk intervensi berbasis komunitas.

Jenis mitra pembangunan yang dapat dilibatkan mencakup organisasi internasional, lembaga donor bilateral dan multilateral, organisasi masyarakat sipil, yayasan filantropi, institusi keagamaan, serta sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan anak usia dini. Pelibatan mitra dilakukan secara selektif dan strategis berdasarkan keahlian, pengalaman, serta keselarasan visi dengan program nasional PAUD.



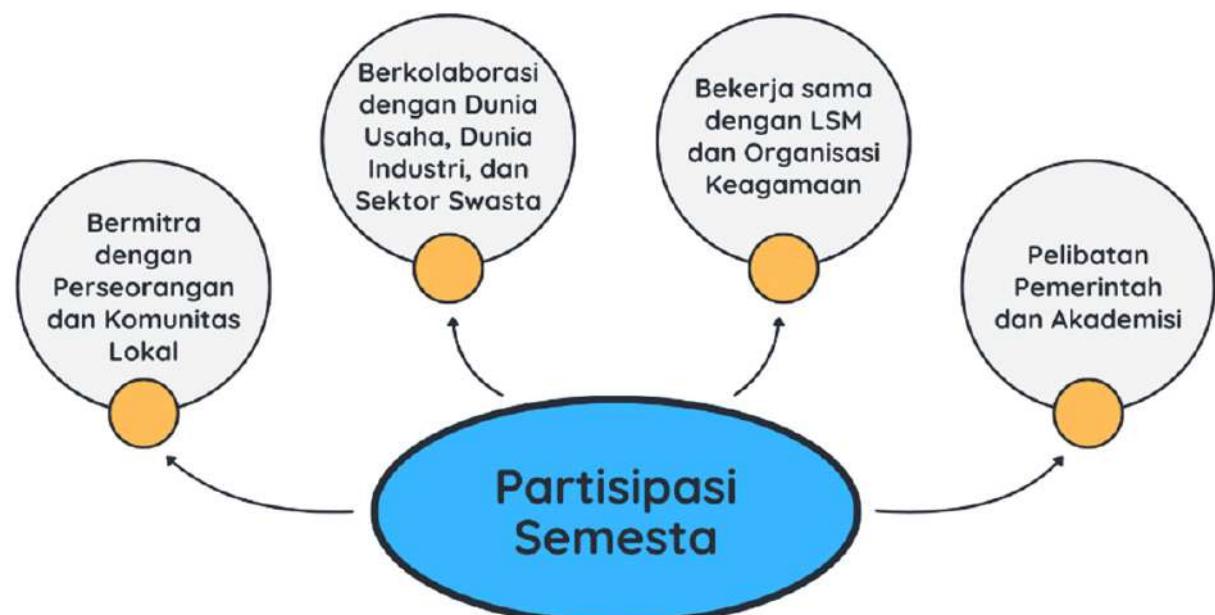
Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas kolaborasi, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah dengan mitra pembangunan. Koordinasi dapat difasilitasi melalui forum *multi-stakeholder*, *platform* koordinasi nasional, maupun tim kerja tematik di tingkat pusat dan daerah.

Evaluasi terhadap kolaborasi dilakukan secara periodik, melalui pelaporan kontribusi masing-masing mitra dalam bentuk dukungan program, capaian pelatihan, perubahan kebijakan, serta peningkatan akses dan mutu layanan PAUD. Evaluasi tahunan dan mid-term review menjadi bagian integral dari proses ini. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan strategi kolaborasi, mendokumentasikan praktik baik, serta mereplikasi model kemitraan yang efektif di wilayah lainnya.

3.3. Partisipasi Semesta

Partisipasi semesta dalam penyelenggaraan PAUD merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat berperan dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan PAUD, seperti penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, keterlibatan dalam pengelolaan satuan PAUD, serta pengawasan terhadap mutu layanan. Selain itu, orang tua, sebagai bagian dari, juga memiliki peran sentral dalam mendukung perkembangan anak melalui stimulasi pendidikan di lingkungan keluarga.

Peningkatan partisipasi semesta dalam penyelenggaraan PAUD sangat penting, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana akses terhadap ketersediaan layanan pendidikan masih terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak melalui kemitraan yang berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3. 17. Strategi partisipasi semesta penyelenggaraan PAUD

- 
- a. Bermitra dengan perseorangan dan komunitas lokal
 - Mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, dan relawan pendidikan untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan promosi PAUD;
 - Mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti kelas parenting, pelatihan, pengasuhan anak, atau program home visit bagi anak-anak yang belum bisa bersekolah; dan
 - Cara lain yang relevan.
 - b. Berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan sektor swasta
 - Mengajak dunia usaha, dunia industri, dan sektor swasta untuk mendukung penyelenggaraan PAUD melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), misalnya untuk penyediaan fasilitas belajar, pembangunan ruang kelas, atau pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu;
 - Cara lain yang relevan
 - c. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan
 - Melibatkan LSM dan organisasi keagamaan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini dalam pelatihan tenaga pendidik, penyediaan bahan ajar, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat layanan PAUD;
 - Cara lain yang relevan
 - d. Pelibatan pemerintah dan akademisi
 - Mengoptimalkan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk meningkatkan akses pendidikan usia dini, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran;
 - Melibatkan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan kurikulum PAUD yang inovatif serta pelatihan bagi tenaga pendidik;
 - Cara lain yang relevan

Melalui sejumlah strategi tersebut di atas, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD akan semakin diperkuat, sehingga akses dan mutu layanan pendidikan untuk anak usia dini terus meningkat. Kolaborasi antara berbagai pihak terkait akan menciptakan sistem PAUD yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak.

3.4. Pemanfaatan Teknologi

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan dalam bidang pendidikan. Pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) tak terkecuali.

Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan pada level PAUD menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai aspek, seperti pembelajaran interaktif, pelatihan guru berbasis daring, serta sistem manajemen sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAUD.



Penggunaan atau penerapan berbagai produk teknologi dalam pembelajaran di PAUD merupakan langkah strategis untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dalam hal ini, penggunaan produk teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pendidik yang mengelola PAUD, melainkan sebagai alat bantu yang mendukung pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sehingga lebih interaktif dan menyenangkan. Melalui pendekatan yang tepat, teknologi dapat turut mengakselerasi pengembangan berbagai potensi anak, termasuk potensi dalam ranah kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan motorik.

Salah satu bentuk pemanfaatan produk teknologi dalam pembelajaran di PAUD adalah penggunaan media digital interaktif, seperti video pembelajaran, lagu edukatif, animasi cerita, dan aplikasi edukatif. Konten-konten pada video pembelajaran dapat membantu anak dalam memahami konsep dasar seperti warna, bentuk, hingga nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan menghargai perbedaan. Dengan tampilan visual dan suara pada video yang menarik, anak-anak bisa belajar sambil tetap merasa bermain. Misalnya, guru dapat memutar video tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, kemudian mengajak anak untuk mempraktikkan cuci tangan bersama. Aktivitas ini memadukan antara unsur visual, audio, dan pengalaman langsung, sehingga membantu anak memahami konsep secara utuh.

Pemanfaatan lagu edukatif digital yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak juga sebagai contoh lain penggunaan produk teknologi. Lagu-lagu yang disajikan secara digital dapat lebih mudah membantu anak dalam mengenal konsep dasar huruf, angka, hingga nilai-nilai moral seperti menjaga kebersihan dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Biasanya lagu edukatif dilengkapi dengan animasi, gerakan, dan irama yang merangsang aspek perkembangan bahasa, motorik, serta sosio-emosional anak. Teknologi memungkinkan lagu-lagu tersebut diakses melalui berbagai perangkat seperti proyektor, televisi digital, tablet, atau gawai, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, lagu edukatif digital menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk menciptakan suasana belajar yang ceria, interaktif, dan bermakna, sekaligus mendorong keterlibatan aktif anak dan orang tua dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di PAUD lainnya dapat diwujudkan melalui penggunaan animasi cerita yang mendidik dan menarik. Animasi cerita merupakan media visual yang menggabungkan gambar bergerak, suara, dan narasi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran secara lebih hidup dan mudah dipahami oleh anak. Dalam konteks PAUD, animasi cerita sangat efektif untuk mengenalkan nilai-nilai moral, sosial, maupun konsep-konsep dasar seperti kebersihan, berteman akrab, dan menghargai perbedaan. Anak-anak lebih mudah memahami isi cerita karena disajikan secara visual dengan tokoh-tokoh yang lucu dan dekat dengan dunia mereka. Gambar 3.20. merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di PAUD yang ditunjukkan melalui animasi cerita rakyat yang disajikan secara visual dan menarik untuk menanamkan nilai-nilai moral dan budaya sejak usia dini.



Gambar 3. 18. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
Sumber: https://youtu.be/6wWLCGtaIww?si=Y0iXQ8SU_Metc7YG

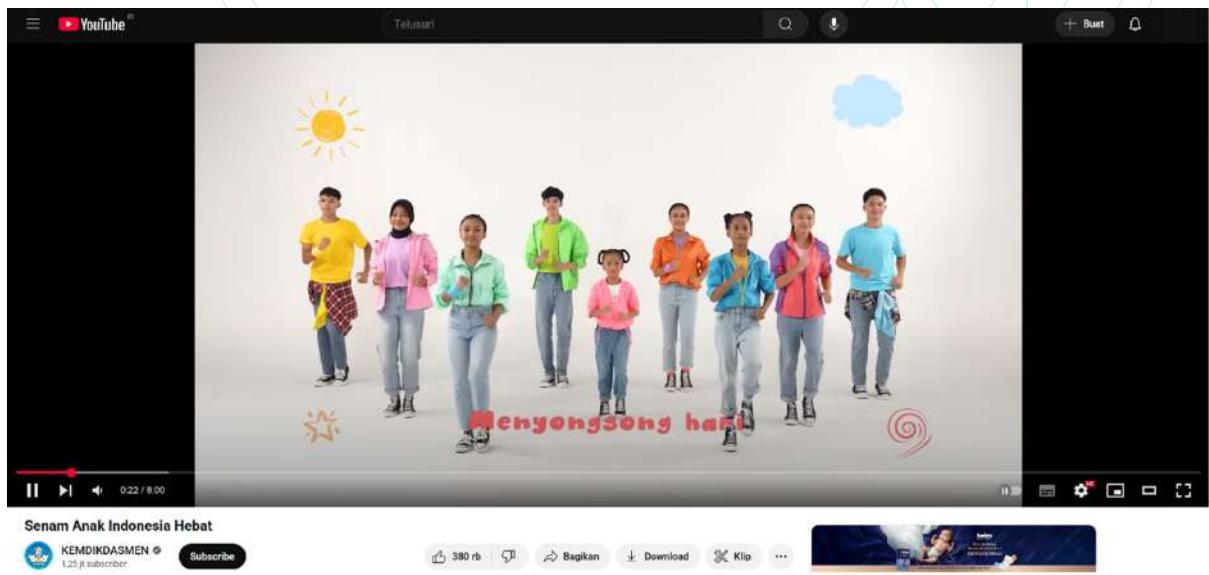
Teknologi memungkinkan cerita animasi diputar melalui berbagai perangkat seperti televisi, komputer, atau tablet, baik di ruang kelas maupun di rumah. Selain itu, animasi cerita juga dapat menjadi alat bantu bagi guru untuk membangun komunikasi dua arah, melatih kemampuan menyimak, serta mendorong anak untuk bercerita kembali dengan kata-kata mereka sendiri, sehingga dapat membantu perkembangan bahasa dan daya imajinasi anak secara optimal.



Gambar 3. 19. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Bentuk lain pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di PAUD adalah penggunaan aplikasi edukatif yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Aplikasi-aplikasi ini umumnya membantu anak mengenal warna, huruf, angka, hewan, tumbuhan, dan doa-doa harian melalui kombinasi animasi, suara, serta permainan interaktif yang menarik. Dengan pendekatan bermain sambil belajar, aplikasi ini mendukung prinsip pembelajaran untuk anak usia dini yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Penggunaannya dapat mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar anak. Hal ini sejalan dengan tujuan program 'Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah' yang menekankan pada pentingnya pengalaman belajar yang bermakna sejak dini. Berikut ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk anak usia dini melalui lagu edukatif bertema lingkungan yang diputar melalui YouTube.



Gambar 3. 20. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
Sumber: https://youtu.be/kHvPMMgx854?si=QgconYHsfbx5n3_z

Di samping untuk pembelajaran, pemanfaatan teknologi juga mendukung guru dalam merancang kegiatan belajar yang lebih bervariasi dan kontekstual. Terdapat berbagai *platform* yang menyediakan banyak referensi video, modul, dan contoh praktik baik pembelajaran untuk anak usia dini, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Para pendidik PAUD dapat memanfaatkannya sebagai inspirasi untuk mengembangkan pembelajaran berbasis bermain, sekaligus mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Pemanfaatan teknologi juga dapat digunakan dalam pelibatan orang tua dalam menunjang praktik pembelajaran untuk anak usia dini, misalnya melalui aplikasi atau grup digital yang memudahkan pendidik PAUD berbagi informasi tentang kegiatan harian anak, perkembangan belajar, atau tugas-tugas kecil yang bisa dilakukan bersama di rumah. Hal ini memperkuat kolaborasi rumah dan sekolah dalam mendampingi anak belajar.

Di sisi lain, teknologi pun turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas pendidik PAUD melalui pelatihan daring (*online training*). Berbagai *platform* pelatihan berbasis komunitas memungkinkan guru mengakses materi pelatihan tanpa harus meninggalkan tempatnya bertugas. Hal ini sangat membantu bagi pendidik yang berada di daerah terpencil, karena mereka tetap dapat mengembangkan kompetensi profesionalnya secara fleksibel dan berkelanjutan tanpa harus mengabaikan tugas kesehariannya.

Pembelajaran di lingkungan PAUD bukan berarti anak terus-menerus menatap layar, tetapi bagaimana mereka memperkaya pengalaman belajar dengan bantuan perangkat teknologi. Teknologi menjadi alat bantu yang mendukung pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga merangsang kreativitas, imajinasi, dan partisipasi aktif anak. Dalam konteks ‘Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah’, penggunaan teknologi berperan penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai tahap perkembangan anak.

Namun demikian, ada hal yang tidak boleh dilupakan, penggunaan teknologi harus selalu memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pembatasan layar (*screen time*). Anak usia dini tetap perlu lebih banyak berinteraksi langsung dengan lingkungan, teman sebaya, dan orang dewasa yang mendampingi. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pendidik dan orang tua dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Hal ini adalah bagian penting dari upaya mewujudkan akses dan mutu layanan PAUD yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Pemanfaatan perangkat teknologi tidak hanya pada aspek pembelajaran, tetapi juga untuk kepentingan pengelolaan PAUD, misalnya manajemen keuangan, perencanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola PAUD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi kunci yang didorong oleh pemerintah.

Salah satu teknologi utama yang relevan adalah ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yaitu sistem digital yang digunakan oleh satuan PAUD untuk menyusun dan mengelola rencana anggaran tahunan. ARKAS membantu memastikan bahwa penggunaan dana BOP PAUD dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui ARKAS, satuan PAUD dapat menyusun rencana kegiatan yang mendukung pencapaian aspek perkembangan anak secara transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, MARKAS (Manajemen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) berfungsi sebagai sistem monitoring dan validasi dari pemerintah daerah terhadap RKAS yang diajukan oleh satuan PAUD melalui ARKAS. Dengan MARKAS, dinas pendidikan dapat melakukan evaluasi secara digital terhadap kelayakan rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh PAUD. Sistem ini memperkuat koordinasi antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana pendidikan. Fungsi dari MARKAS dan ARKAS dapat dilihat pada Gambar 3.21.



*Gambar 3. 21 MARKAS dan ARKAS Gambar 3. 20. Contoh Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
Sumber: <https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/>*



Di sisi lain, proses pengadaan barang dan jasa di PAUD kini difasilitasi melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah). SIPLah memungkinkan satuan PAUD melakukan transaksi pembelian alat permainan edukatif, buku, dan kebutuhan operasional lainnya secara daring dari penyedia yang sudah terverifikasi. Dengan sistem ini, proses belanja menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai regulasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOP PAUD.

The screenshot shows the SIPLah platform interface. At the top, there are logos for KEMENTERIAN KEDIDIKAN DAN KULTURA and SIPLah, followed by a search bar containing 'Laptop' and a 'Cari' button. Below the search bar are sorting options: 'Urutkan' (sorted by 'Paling Sesuai'), 'Harga Tertinggi', 'Harga Terendah', a location filter for 'Pulau Jawa', and a 'Kategori' dropdown. The main content area displays search results from two sellers:

Seller	Product	Location	Price
SIPLah blibli	Charger laptop	Az-ka Kab. Sampang	Rp 149.600,00
	LCD LAPTOP	Az-ka Kab. Sampang	Rp 950.000,00
PT Global Digital Niaga	Batrei laptop	Az-ka Kab. Sampang	Rp 800.000,00
	Baterai Laptop	Andi Fotocopy Kab. Situbondo	Rp 485.000,00
PT Pesona Edukasi	Keyboard laptop	AGIL JAYA Kab. Sampang	Rp 85.000,00
	BATERAI LAPTOP ACER	Toko JAVIER PUTRA Kab. Situbondo	Rp 440.000,00
KEYBOARD LAPTOP ...	Toko JAVIER PUTRA Kab. Situbondo	Rp 300.000,00	
	ADAPTOR CHARGER ...	Toko JAVIER PUTRA Kab. Situbondo	Rp 260.000,00
MAINTENANCE HARD...	Dwi Tunggal Kab. Tuhun	Rp 245.000,00	
	SERVICE BIOS LAPTOP	Dwi Tunggal Kab. Tuhun	Rp 450.000,00

Each product listing includes a 'Kunjungi Mitra' button. A note at the bottom right of the results area says 'Kunjungi Mitra untuk melihat seluruh barang'.

Gambar 3. 22. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
Sumber: <https://pusatinformasi.siplah.kemdikbud.go.id/>

Selain ketiga sistem utama tersebut, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan PAUD juga mencakup penggunaan Sistem Informasi Manajemen PAUD (SIM PAUD) untuk pencatatan data kelembagaan dan peserta didik, serta *platform* pembelajaran digital. Berbagai *platform* ini tidak hanya membantu guru dalam mengakses pelatihan dan materi ajar, tetapi juga mempermudah dokumentasi hasil belajar anak secara digital yang dapat diakses oleh orang tua.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi di satuan PAUD merupakan bagian integral dari transformasi layanan pendidikan anak usia dini yang adaptif dan berkelanjutan. Teknologi mendukung terciptanya tata kelola yang partisipatif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, satuan PAUD dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' yang berkualitas.

Namun di sisi lain, tantangan dalam pemanfaatan teknologi di PAUD masih cukup besar, termasuk keterbatasan akses internet di daerah tertentu, kurangnya perangkat digital di satuan PAUD, serta rendahnya literasi digital tenaga pendidik dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat guna memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk usia dini di level PAUD.

BAB IV

Pendampingan dan Supervisi



4.1. Kerangka Kerja Strategi Implementasi

Kerangka kerja strategi implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ perlu dibangun berdasarkan tujuan umum, kerangka strategi implementasi serta pilar program. Adapun tujuan dari kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ adalah untuk menjamin hak setiap anak usia 5-6 tahun agar memperoleh layanan PAUD satu tahun sebelum mereka memasuki jenjang SD yang berkualitas, inklusif, dan setara, sebagai bagian dari pemenuhan wajib belajar 13 tahun. Adapun kerangka kerja strategi terdiri atas empat kerangka utama, yaitu:

4.1.1. Ekspansi Akses

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III, strategi utama untuk implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ ini terdiri atas lima skema, yaitu PAUD-SD Satu Atap, Pembangunan USB, Perluasan Kewenangan Layanan PAUD Non-Formal, Penegerian PAUD, dan Penambahan Ruang Kelas Baru. Kelima strategi ini bertujuan untuk mendorong ekspansi akses anak berusia 5-6 tahun terhadap layanan PAUD dengan cara memastikan layanan PAUD satu tahun prasekolah dapat terjangkau, baik secara geografis maupun secara ekonomis. Selain itu, terdapat juga strategi yang bersifat afirmatif untuk mendorong akses PAUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui Guru PAUD Kunjung, Alat Permainan Edukatif (APE) dan Perpustakaan Keliling, serta Program Indonesia Pintar (PIP).

Di dalam menentukan seberapa jauh ekspansi akses harus dilakukan, pemerintah menetapkan dua skenario yang dapat dipertimbangkan, yaitu skenario agresif dan skenario moderat. Kedua skenario tersebut menggunakan rujukan dan target capaian yang berbeda.

Skenario agresif mengacu pada penyesuaian target dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu dengan memastikan bahwa 100% anak usia 6 tahun satu tahun sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar, telah mengikuti layanan PAUD pada tahun 2030. Pendekatan ini menuntut capaian yang sangat tinggi dan memerlukan dukungan ekosistem yang maksimal. Proyeksi indikator yang digunakan dalam skenario ini adalah 100% anak usia 6 tahun berpartisipasi di PAUD.

Skenario moderat lebih realistik dengan menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah (APS). Skenario ini mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk kapasitas infrastruktur dan kesiapan layanan PAUD saat ini, sehingga tidak menargetkan seluruh populasi anak usia 5-6 tahun. Indikator yang digunakan merujuk pada target berdasarkan target proyeksi SPM (Standar Pelayanan Minimum) Pendidikan pada tahun 2025-2029, yaitu 87,75% anak usia 5-6 tahun berpartisipasi di PAUD.

Kedua skenario tersebut di atas tentu akan memiliki dampak terhadap perencanaan dan penganggaran. Untuk lebih jelasnya, dampak dari penganggaran yang berpotensi muncul dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4. 1. Perbandingan Skenario Agresif dan Moderat

Aspek	Skenario Agresif	Skenario Moderat
Cakupan Anak Usia 5-6 Tahun	100% anak usia 5-6 tahun	87,75% anak usia 5-6 tahun
Kebutuhan Anggaran Infrastruktur	Sangat tinggi Membangun USB, PAUD-SD satu atap, dan/atau RKB secara masif	Sedang Berfokus pada daerah padat penduduk dan berbasis data kebutuhan
Kebutuhan Biaya Operasional	Tinggi Mencakup BOP PAUD, gaji pendidik, dan/atau APE	Sedang Menyesuaikan BOP PAUD dengan jumlah anak yang terlayani
Kesetaraan Akses Nasional	Tinggi Menjangkau seluruh wilayah dan populasi anak usia 5-6 tahun	Sedang Memprioritaskan pada daerah yang belum terjangkau layanan PAUD sepenuhnya
Kesesuaian dengan SDGs	Sangat sesuai Mengoptimalkan target pendidikan inklusif SDG 4	Cukup sesuai Mengupayakan target secara realistik namun belum mencakup seluruh populasi
Tingkat Risiko Fiskal	Tinggi Membutuhkan dukungan lintas sektor dan anggaran besar	Sedang Mempertimbangkan kemampuan fiskal (alokasi dana) yang ada
Strategi Implementasi Kunci	Mewujudkan universal coverage, reformasi tata kelola, dan sinergi antar sektor	Menguatkan ekosistem layanan, berbasis prioritas wilayah dan kebutuhan secara bertahap

Sumber: Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2025

Lebih lanjut, proyeksi target capaian tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.1.

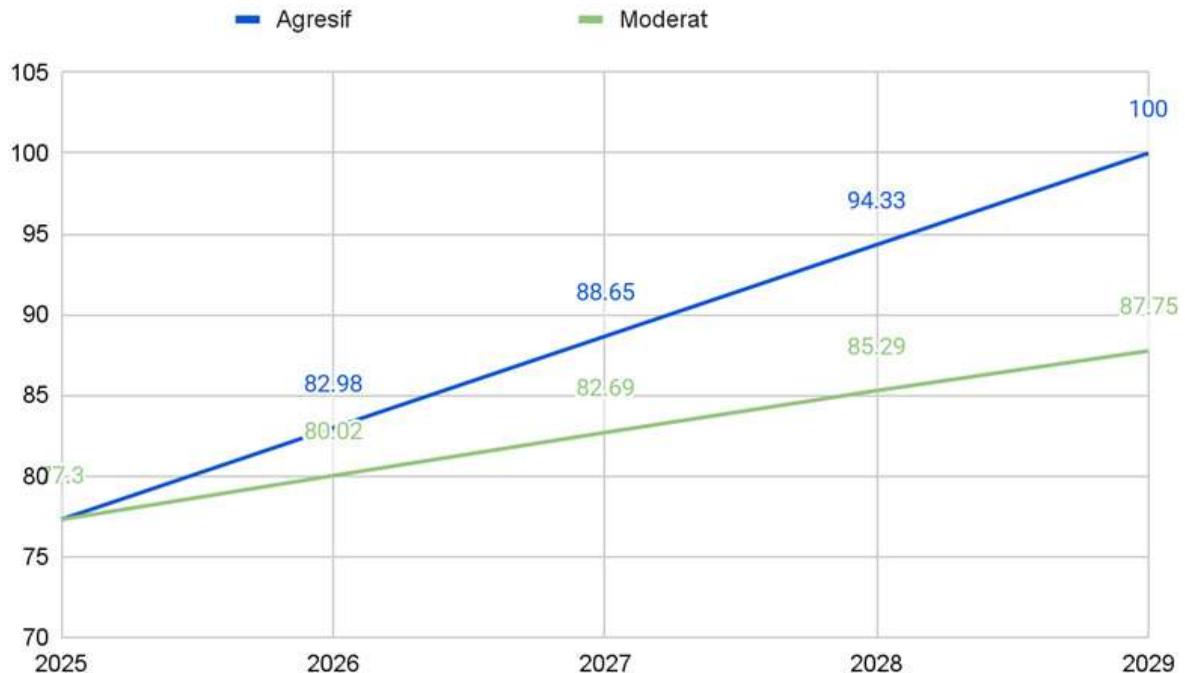
Tabel 4. 2. Perbandingan Proyeksi Target Capaian untuk Skenario Agresif dan Moderat

Tahun	Agresif (Partisipasi 100%)	Moderat (Partisipasi 87.75%)
2025	77.3	77.3
2026	82.98	80.02
2027	88.65	82.69
2028	94.33	85.29
2029	100	87.75

Sumber: Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2025

Keterangan:

- Baseline yang digunakan adalah proyeksi anak usia 5-6 tahun pada 2025, yaitu 9.090.016
- Partisipasi didasarkan pada % APS 5-6 tahun



Gambar 4. 1. Diagram Proyeksi Target Capaian Berdasarkan Skenario
Sumber: Kajian Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020-2025

Estimasi biaya yang dibutuhkan pada periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3. Estimasi Biaya yang Dibutuhkan pada tahun 2025-2029

Komponen	Estimasi biaya yang dibutuhkan pada tahun 2025 – 2029	
	Skenario 1: Agresif (100% anak usia 5-6 tahun berpartisipasi di PAUD pada	Skenario 2: Moderat (87,75% anak usia 5-6 tahun berpartisipasi di PAUD pada
Biaya investasi USB (Unit Satuan Baru)	Rp.30.956.978.106.566	Rp.21.456.850.379.080
Biaya investasi RKB (Ruang Kelas Baru)	Rp.14.645.014.986.880	Rp.10.150.728.998.520
Penyediaan BOP PAUD USB	Rp.1.367.339.877.152	Rp.1.088.736.283.200
Penyediaan BOP PAUD RKB	Rp.2.051.009.815.728	Rp.1.633.104.424.800
Pembangunan sanitasi dan air bersih	Rp.376.554.723.900	Rp.207.300.000.000
Penyediaan honorarium PTK	Rp.31.705.274.681.889	Rp.25.245.137.285.760
Peningkatan Kompetensi PTK	Rp.745.713.889.844	Rp.516.868.000.000
APE Esensial	Rp.996.943.703.000	Rp.691.000.000.000
Total biaya yang dibutuhkan	Rp82.844.829.784.958	Rp60.989.725.371.360
Total peserta didik yang berpartisipasi di PAUD	1.495.416	1.036.500
Total Unit Satuan Baru (USB)	19.939	13.820
Total Ruang Kelas Baru (RKB)	59.817	41.460
Total PTK baru*	219.328	152.020

Apabila strategi moderat ini diadopsi dan fokus program Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah dilakukan di desa, maka perbandingan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk program PAUD-SD Satu Atap, Pembangunan USB, Pembangunan RKB, Kelas Rangkap dan APE Keliling dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Estimasi Biaya yang Dibutuhkan

Komponen	USB (2.434 unit)	RKB (80.210 unit)	SATAP (627 unit)	PAUD KELILING (6.996 unit)	KELAS RANGKAP (2.238 unit)	TOTAL
Untuk Peningkatan Akses						
Investasi Lembaga	Rp 5.014.040.000.000	Rp 19.637.963.651.020	Rp 153.509.577.474	Rp -	Rp -	Rp 24.805.513.228.494
Penyediaan BOP PAUD	Rp 47.937.483.960	Rp 789.865.568.700	Rp 6.174.363.690	Rp 68.892.900.120	Rp 22.038.637.860	Rp 934.908.954.330
Untuk Peningkatan Mutu						
Pembangunan sanitasi dan air bersih (untuk 171.692 PAUD yang belum memenuhi)	Rp 2.575.380.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.575.380.000.000
Penyediaan honor PTK	Rp 550.588.646.088	Rp 6.162.006.518.200	Rp 93.663.712.824	Rp 537.456.646.320	Rp 171.930.813.960	Rp 7.515.646.337.392
Penunjang Kompetensi Guru non linear dalam jabatan melalui Diklat Berjenjang	Rp 41.378.000.000	Rp 545.428.000.000	Rp 6.395.400.000	Rp 47.572.800.000	Rp 15.218.400.000	Rp 655.992.600.000
APE Esensial	Rp -	Rp -	Rp 31.350.000.000	Rp 349.800.000.000	Rp 111.900.000.000	Rp 493.050.000.000
Total Investasi	Rp 8.229.324.130.048	Rp 27.135.263.737.920	Rp 291.093.053.988	Rp 1.003.722.346.440	Rp 321.087.851.820	Rp 36.980.491.120.216

*Untuk melihat estimasi kebutuhan biaya secara rinci, klik tautan berikut → [Tautan](#)

4.1.2. Integrasi Layanan

Meskipun kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' ini dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi mengingat anak, khususnya anak usia dini, memiliki kebutuhan esensial yang terkait dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, maka penting untuk memastikan bahwa program wajib belajar satu tahun prasekolah ini tetap mengintegrasikan berbagai layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini (5-6 tahun) secara menyeluruh, sehingga mereka mendapatkan layanan PAUD yang holistik dan integratif.

4.1.3. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu diarahkan pada kepastian bahwa satuan PAUD yang memberikan program 1 Tahun Pendidikan Prasekolah memiliki akreditasi minimal B. Selain itu, peningkatan mutu juga ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang ada di PAUD dapat menstimulasi kemampuan fondasi anak, termasuk kemampuan pra-literasi dan numerasi serta karakter anak. Peningkatan mutu juga perlu memastikan bahwa terjadi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

4.1.4. Reformasi Tata Kelola

Reformasi tata kelola merupakan salah satu pilar utama dalam strategi implementasi 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah'. Reformasi ini menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan PAUD yang terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selama ini, banyak tantangan dalam tata kelola PAUD, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi antar sektor, minimnya kapasitas pengelola di tingkat satuan pendidikan, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, reformasi tata kelola menjadi krusial untuk menjamin keberlangsungan, efisiensi, dan efektivitas program PAUD prasekolah sebagai bagian dari kebijakan 'Wajib Belajar 13 Tahun'.



Langkah pertama dalam reformasi tata kelola adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang mengikat. Pemerintah pusat diharapkan menetapkan payung hukum yang jelas, baik dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden (Perpres/Inpres), Peraturan Menteri, hingga standar operasional pelaksanaan yang menegaskan bahwa wajib belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan dasar, penetapan peraturan atau kebijakan skema peraturan kinerja guru, yaitu jam mengajar guru SD ke satuan PAUD. Di tingkat daerah, reformasi dilakukan melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Kepala Daerah, dan dokumen rencana strategis (Renstra) daerah tentang PAUD yang mengatur pembagian peran, pendanaan, dan target capaian.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi inti dalam reformasi ini. Tim Koordinasi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) yang melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, sosial, Bappeda, dan pemerintah desa perlu diaktifkan dan difungsikan secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Selain itu, pelibatan lembaga non-pemerintah, seperti LSM, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan internasional, juga penting untuk memperkuat sumber daya dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan PAUD.

Di tingkat masyarakat, reformasi dilakukan melalui penguatan kapasitas pengelola dan pendidik PAUD dalam tata kelola satuan pendidikan, perencanaan berbasis data, serta pelaporan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Peran Bunda PAUD sangat strategis dalam menjembatani antara pemangku kepentingan daerah dengan masyarakat. Digitalisasi sistem tata kelola juga menjadi bagian penting dari reformasi ini, dengan mengintegrasikan data PAUD ke dalam sistem pendataan nasional seperti Dapodik, sehingga dapat digunakan untuk pemetaan kebutuhan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Dengan reformasi tata kelola yang menyeluruh, implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' akan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Tata kelola yang kuat memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sebagai pondasi utama menuju SDM unggul Indonesia 2045. Secara lebih ringkas, kerangka kerja strategi implementasi dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut.

Kerangka Kerja Strategi Kerangka Utama

	EKSPANSI AKSES Mendorong ekspansi akses terhadap layanan PAUD 1 tahun prasekolah, termasuk 3T
	INTEGRASI LAYANAN Mengintegrasikan berbagai layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara menyeluruh
	PENINGKATAN MUTU Memastikan akreditasi serta peningkatan mutu satuan, kegiatan program, dan pendidik PAUD
	REFORMASI TATA KELOLA Memperkuat tata kelola penyelenggaraan layanan PAUD yang terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan berbasis data

Gambar 4.2. Kerangka Kerja Strategi Implementasi

4.2. Linimasa dan Luaran Strategi Implementasi

Dalam menentukan linimasa dan luaran pada strategi implementasi, pemerintah membuat proyeksi capaian berdasarkan 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang merujuk pada teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (1984).

Pada dua tahun awal (2025-2026) pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ditetapkan pada proyeksi tersebut yang melibatkan sekitar 82 kabupaten/kota untuk secara intensif dan masif bergerak melaksanakan strategi-strategi percepatan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' sesuai dengan karakteristik kondisi di wilayah mereka. Selanjutnya, capaian yang baik diharapkan akan mendorong kabupaten/kota lainnya untuk diintervensi pada tahun 2027 dan seterusnya, sehingga tertarik untuk mengadaptasi dan melakukan pendekatan serupa yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik proyeksi capaian strategi komitmen daerah untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3. Grafik proyeksi capaian strategi komitmen daerah untuk tahun 2025-2029

Secara umum, implementasi kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah' memiliki linimasa dan target luaran. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4.



Tabel 4. 4. Linimasa dan Target Luaran

Tahun	Kegiatan Kunci	Target Luaran
2025	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan regulasi nasional & daerah Pemetaan wilayah dan data anak 5-6 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Perpres PAUD 1 Tahun Prasekolah terbit Peta wilayah prioritas selesai
2026	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan advokasi ke daerah Perencanaan pembangunan/konversi lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kabupaten/kota memiliki roadmap implementasi
2027	<ul style="list-style-type: none"> PAUD-SD Satu Atap Penambahan RKB Penegerian PAUD Pelatihan guru dan kepala PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PAUD-SD Satu Atap terealisasi Jumlah penambahan RKB terealisasi Jumlah wilayah prioritas memiliki PAUD negeri Jumlah guru dan kepala PAUD bersertifikasi
2028	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan USB di 3T Penyaluran DAK fisik & non-fisik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anak 5-6 tahun mengakses PAUD
2029	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi berbasis indikator capaian dan mutu layanan. Revisi pedoman dan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Penguatan tata kelola dan mekanisme pendanaan jangka panjang. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan PAUD bermutu
2030	<ul style="list-style-type: none"> Penjaminan mutu 	Jumlah anak usia 5-6 tahun mengakses PAUD

4.3. Pembagian Peran, Tugas, dan Fungsi Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ memerlukan koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kebijakan ini merupakan program lintas kementerian, organisasi pemerintah daerah, dan sektor lainnya. Paling tidak terdapat 6 (enam) kementerian utama yang akan terlibat dalam program ini.

Pertama, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) selaku *leading sector* yang turut merencanakan perencanaan kebijakan ini pada tingkat nasional. Sebagaimana kedudukannya, BAPPENAS adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang meliputi segala usaha serta kegiatan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, BAPPENAS memiliki wewenang sebagai pengarah semua lembaga dan kementerian negara dalam melaksanakan tugas pembangunan nasional agar lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sektor. Dengan demikian, kedudukan BAPPENAS selaku *leading sector* dalam implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ menjadi tepat dan strategis.

Kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan regulator dan penyelenggara utama untuk kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ ini. Oleh karena itu, Kemendikdasmen memiliki wewenang menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan ini sebagai bagian dari kebijakan ‘Wajib Belajar 13 Tahun’, termasuk standar nasional PAUD, kurikulum, dan pelatihan pendidik. Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ perlu tetap berjalan dalam koridor Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Oleh karena itu, Kemendikdasmen pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan PAUD HI yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi.

Ketiga, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam mendukung kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, terutama dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti Raudhatul Athfal (RA). Sebagai lembaga yang membina pendidikan keagamaan. Kemenag bertanggung jawab menyusun kebijakan yang mendukung implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, khususnya untuk level Raudhatul Athfal (RA). Dalam hal ini, Kemenag diharapkan memastikan sejumlah program dalam dokumen ini agar diadaptasi untuk konteks pendidikan keagamaan. Di samping itu, Kemenag juga bertanggung jawab memastikan kurikulum yang diterapkan selaras dengan Kurikulum Nasional PAUD, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

Kemenag juga berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan RA, termasuk memberikan izin operasional, akreditasi, serta peningkatan mutu melalui pengembangan kurikulum dan penguatan manajemen kelembagaan. Salah satu fokus utama Kemenag adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru-guru RA melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan berkelanjutan. Selain itu, Kemenag turut mendukung perluasan akses RA satu tahun pra-MI dengan memanfaatkan jaringan RA yang tersebar luas, termasuk di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga berkontribusi dalam pemerataan layanan PAUD. Dalam pelaksanaannya, Kemenag dapat menjalin koordinasi dan sinergi dengan Kemendikdasmen serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di bawah lembaga pendidikan keagamaan, memperoleh haknya atas layanan PAUD yang berkualitas menjelang jenjang pendidikan dasar.

Keempat, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, khususnya dalam konteks pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD di wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Sebagai kementerian yang memiliki mandat dalam pembangunan desa, Kemendes PDTT berkontribusi melalui pemanfaatan dana desa untuk mendukung pendirian, penguatan, dan pengelolaan layanan PAUD yang berbasis komunitas, seperti PAUD desa dan Bina Keluarga Balita (BKB). Melalui kewenangannya, diharapkan Kemendes PDTT dapat mendorong pemerintah desa untuk memasukkan layanan PAUD sebagai bagian dari prioritas pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta mendukung alokasi anggaran yang memadai dalam APBDes.



Kemendes juga perlu merelaksasi aturan penggunaan dana desa untuk PAUD agar tidak hanya terbatas untuk program pendirian Unit Satuan Baru (USB) saja, tetapi juga dana desa dapat digunakan untuk program PAUD-SD Satu Atap, memfasilitasi perluasan kewenangan PAUD Non-Formal, penegerian PAUD, dan penambahan ruang kelas baru pada PAUD di desa. Selain itu, Kemendes juga berperan dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa dan aparatur desa agar mampu mengelola layanan PAUD secara berkelanjutan dan inklusif. Melalui sinergi dengan kementerian/lembaga lain, Kemendes diharapkan ikut mendorong pendekatan Holistik-Integratif (HI) dalam penyelenggaraan PAUD, yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan anak secara terpadu. Di banyak wilayah, Kemendes PDTT dapat mendukung pelatihan kader dan tenaga pendidik PAUD berbasis desa serta pengembangan model kelembagaan PAUD yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan peran tersebut, Kemendes PDTT menjadi salah satu aktor kunci dalam memastikan bahwa anak-anak usia dini di desa, terutama yang tinggal di daerah 3T, memperoleh hak atas pendidikan prasekolah yang bermutu sebagai fondasi bagi keberhasilan pendidikan dasar dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.

Kelima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’, terutama dalam mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat daerah. Sebagai instansi pembina pemerintahan daerah, Kemendagri dapat mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD. Selain itu, Kemendagri juga dapat memastikan agar program PAUD menjadi prioritas daerah dengan menetapkan regulasi atau surat edaran yang memuat kewajiban alokasi anggaran melalui APBD, baik untuk penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun operasional lembaga PAUD. Melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri juga dapat melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program PAUD oleh pemerintah daerah. Hal ini mencakup fasilitasi penguatan kelembagaan Dinas Pendidikan, pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk layanan PAUD, serta pelibatan aktif Bappeda dalam merencanakan program berbasis data.

Kemendagri mendorong pembentukan forum koordinasi lintas sektor di daerah seperti Forum PAUD Daerah atau Tim Layanan Anak Usia Dini yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TP PKK, dan mitra masyarakat. Dalam aspek pengelolaan data, Kemendagri juga berperan dalam mendorong pemanfaatan sistem informasi daerah, termasuk integrasi data anak usia dini dari Dukcapil dan Dapodik untuk perencanaan berbasis bukti dan identifikasi wilayah yang belum memiliki akses layanan PAUD. Dengan demikian, peran Kemendagri sangat penting dalam memastikan bahwa program ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ tidak hanya menjadi kebijakan nasional, tetapi benar-benar terimplementasi secara konkret dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, Badan Pusat Statistik (BPS) yang memegang peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ melalui penyediaan data yang akurat, relevan, dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis data statistik nasional, BPS menyediakan data partisipasi anak usia 5 tahun dalam layanan pendidikan anak usia dini

melalui survei rutin seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Penduduk. Data ini sangat krusial untuk mengukur capaian nasional terhadap target Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, sekaligus memetakan wilayah-wilayah yang masih memiliki tingkat partisipasi rendah. Selain itu, BPS berperan dalam memantau indikator-indikator yang terkait dengan pembangunan manusia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama indikator 4.2 yang menargetkan agar semua anak memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan, dan pendidikan prasekolah dasar.

Informasi statistik dari BPS menjadi acuan penting bagi Kementerian/Lembaga, termasuk Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenag, dan pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan, merencanakan program, dan melakukan evaluasi berbasis bukti. Lebih lanjut, BPS juga dapat berperan dalam mendukung sistem informasi pendidikan nasional dengan menyediakan data dukung untuk integrasi lintas sektor, termasuk analisis sebaran demografis anak usia dini dan ketimpangan akses layanan PAUD berdasarkan wilayah, status sosial-ekonomi, dan karakteristik rumah tangga. Dengan menyediakan data yang valid dan terukur, BPS memungkinkan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan berkeadilan dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan PAUD satu tahun prasekolah di seluruh Indonesia.

Kementerian lain yang memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, Kemenkeu berperan dalam pengalokasian anggaran melalui mekanisme APBN, baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Transfer ke Daerah (PAUDD). Salah satu komponen penting yang didukung Kemenkeu adalah DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, yang diberikan kepada satuan PAUD untuk membantu operasionalisasi layanan pendidikan. Selain itu, DAK Fisik digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur lembaga PAUD, termasuk fasilitas sanitasi dan alat permainan edukatif yang dibutuhkan. Kemenkeu juga berperan dalam menyusun kebijakan fiskal afirmatif untuk mendorong daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar memprioritaskan anggaran PAUD dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD). Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif fiskal, pengaturan formula penghitungan transfer daerah, dan mekanisme penguatan sinergi pusat-daerah dalam pemanfaatan dana desentralisasi untuk pendidikan anak usia dini.

Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dapat melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah, termasuk dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk PAUD. Di sisi lain, Kemenkeu juga terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional bersama Bappenas dan kementerian teknis lain, agar kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ tercermin dalam dokumen kebijakan fiskal nasional seperti Nota Keuangan dan RAPBN. Dengan demikian, peran Kementerian Keuangan sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ memiliki dukungan anggaran yang cukup, adil, dan tepat sasaran, sehingga dapat diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi program nasional lintas kementerian yang terintegrasi secara fiskal.

Secara keseluruhan, peran dari kementerian/lembaga yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Peran Kementerian/Lembaga (Pendidikan Anak Usia Dini)



Gambar 4. 4. Peran Kementerian/Lembaga dalam PAUD

4.4. Pembimbingan dan Pendampingan

Kegiatan pembimbingan dan pendampingan perlu dilakukan pada tiga tingkatan. Pertama, di tingkat satuan pendidikan. Kedua, di tingkat pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota).

4.4.1 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pembimbingan dan pendampingan di tingkat satuan bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar setiap anak usia 5-6 tahun mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai perkembangan. Anak diharapkan berkembang optimal pada aspek bahasa, kognitif, sosial-emosional, fisik motorik, moral, dan kemandirian sebagai persiapan masuk SD. Pendampingan juga bertujuan memastikan guru dan pengelola PAUD memahami kurikulum serta pendekatan yang tepat, sehingga anak lebih siap secara akademik maupun psikososial saat melanjutkan ke jenjang SD.

Kegiatan Inti pembimbingan dan pendampingan dapat difokuskan pada beberapa kegiatan inti:

1. Bimbingan Teknis Pendidik

Bimbingan teknis pendidik meliputi pelatihan dan workshop bagi guru PAUD tentang metode pembelajaran bermain sambil belajar dan strategi transisi PAUD ke SD yang mulus. Misalnya, pelatihan penggunaan kurikulum *deep learning*, pembelajaran sains, literasi dan numerasi, pembuatan alat permainan edukatif (APE), serta teknik observasi perkembangan anak.

2. Pendampingan Pembelajaran

Pendampingan pembelajaran dapat berupa kunjungan pendamping (pengawas/fasilitator) ke kelas untuk membina guru dalam menata lingkungan belajar yang stimulatif, menerapkan disiplin positif, dan mengelola kelas multi-usia. Pendamping membantu guru mempraktikkan pembelajaran yang aktif, kreatif, eksploratif, serta memberikan umpan balik konstruktif.

3. Penguatan Kemitraan Orang Tua

Penguatan kemitraan orang tua dapat dilakukan dengan mengadakan kelas parenting, pertemuan komite, atau kegiatan keterlibatan orang tua di sekolah. Intinya agar orang tua memahami pentingnya PAUD dan meneruskan stimulasi di rumah. Kegiatan seperti kelas orang tua atau sesi sosialisasi tumbuh kembang membantu menyamakan persepsi guru-orang tua.

4. Monitoring Perkembangan Anak

Monitoring perkembangan anak dilakukan dengan cara melakukan pembimbingan guru dalam melakukan penilaian perkembangan yang bersifat authentic assessment secara periodik. Guru dibimbing mengenai cara mengidentifikasi anak yang membutuhkan intervensi khusus sedini mungkin, sehingga dapat dirujuk ke layanan yang tepat (misal: layanan kesehatan atau psikolog jika ada indikasi kebutuhan khusus).



5. Penguatan Administrasi dan Manajemen

Penguatan administrasi dan manajemen ditujukan untuk membantu satuan PAUD dalam aspek manajemen, seperti pendaftaran dapodik, penyusunan rencana kerja dan kalender pendidikan, hingga persiapan akreditasi. Ini penting agar PAUD terdata resmi dan bisa mendapat bantuan operasional. Pendampingan diberikan dalam penyusunan dokumen kurikulum, rencana pembelajaran dan pelaporan sesuai standar.

4.4.2 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan

Pada level pemerintah desa/kelurahan, tujuan pembimbingan dan pendampingan adalah memberdayakan aparat desa dan masyarakat agar aktif mendukung penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di wilayahnya. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan menjadi penggerak utama di komunitas untuk menjamin semua anak usia 5-6 tahun di desa mendapatkan layanan PAUD yang layak. Tujuan khususnya antara lain:

- **Integrasi PAUD dalam Pembangunan Desa**

Tujuan ini memastikan program wajib belajar 1 tahun prasekolah tercantum dalam perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDDes, APBDes), sejalan dengan prioritas pembangunan SDM desa.

- **Penyediaan Layanan PAUD di Setiap Desa**

Tujuan ini mendorong terbentuknya minimal 1 satuan PAUD di setiap desa yang belum punya, sesuai amanat Permendikbud No. 18 Tahun 2018 yang wajibkan setiap desa/kelurahan memiliki setidaknya 1 PAUD. Dengan kata lain, tidak boleh ada desa tanpa PAUD. Sebagaimana disampaikan di BAB III, diharapkan pada akhir tahun 2030, jumlah desa yang memiliki PAUD sudah mencapai 100%.

- **Peningkatan Akses dan Partisipasi**

Pemerintah desa/kelurahan mendata dan menjangkau seluruh anak usia 5-6 tahun, termasuk yang rentan (dari keluarga miskin, difabel, dll.), agar terdaftar dan berpartisipasi di PAUD. Ini turut mendukung capaian SPM pendidikan di tingkat kabupaten.

- **Sinergi dengan Program Nasional**

Melalui PAUD, desa juga berkontribusi pada target nasional seperti penurunan stunting dan penguatan layanan holistik integratif. Tujuannya agar PAUD desa menjadi pusat layanan anak usia dini terpadu (pendidikan, gizi, kesehatan, perlindungan) di komunitas.

Kegiatan inti pembimbingan dan pendampingan di tingkat desa/kelurahan melibatkan berbagai aktivitas kunci:

1. **Sosialisasi dan Advokasi**

Fasilitator pendamping bersama dengan kecamatan dan kabupaten melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa tentang pentingnya PAUD prasekolah. Kegiatan seperti lokakarya desa atau pertemuan kepala desa se-kecamatan dilakukan untuk membangun komitmen bersama. Contohnya, di beberapa daerah camat mengumpulkan seluruh kepala desa guna menandatangani komitmen pelaksanaan PAUD satu tahun prasekolah, disaksikan dinas dan Bunda PAUD.

2. Pendataan Anak Usia Dini

Pendampingan membantu aparat desa melakukan pendataan komprehensif anak usia 5-6 tahun di wilayahnya. Data meliputi: jumlah anak, lokasi/dukuh tempat tinggal, status sekolah (sudah PAUD/belum), hingga kondisi keluarga (indikator kemiskinan). Pendataan ini krusial untuk mengetahui gap layanan dan menjadi dasar intervensi. Misalnya, desa didampingi untuk membuat daftar anak yang belum terlayani PAUD agar dapat ditindaklanjuti secara khusus.

3. Pemetaan Sumber Daya Desa

Selain data anak, desa juga dibimbing memetakan sumber daya yang tersedia: adakah PAUD/TK di desa (jumlah, status), ketersediaan gedung atau ruang yang bisa dipakai, jumlah pendidik PAUD asal desa, kader posyandu, PKK, dan potensi mitra (Ormas, NGO) yang bisa dilibatkan. Pemetaan ini membantu desa merencanakan solusi sesuai kondisi lokal.

4. Penganggaran Dana Desa untuk PAUD

Pendampingan menitikberatkan alokasi APBDes yang memadai bagi PAUD. Kepala desa diarahkan menyisihkan Dana Desa untuk mendukung operasional PAUD, insentif guru, penyediaan sarana prasarana, hingga program peningkatan kapasitas pendidik. Hal ini sejalan dengan regulasi Kementerian Desa (Permendesa PDTT No. 13/2020) yang memprioritaskan Dana Desa untuk pencapaian SDGs desa, termasuk program pengentasan stunting melalui layanan PAUD. Pendamping membantu desa menyusun usulan anggaran konkret (misal: Rp X per tahun untuk honor kader PAUD, pembangunan ruang kelas, pengadaan mainan edukatif, dll.).

5. Perencanaan Program di RKPDes

Desa didampingi untuk memasukkan program PAUD 1 Tahun Pendidikan Prasekolah dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan. RKPDes memuat kegiatan seperti pendirian/ peningkatan PAUD, pelatihan guru desa, sosialisasi ke orang tua, serta belanja kebutuhan anak kurang mampu. Semua program dirancang terukur (misal target 100% anak usia 5-6 tahun masuk PAUD tahun itu). Pendamping memastikan dokumen perencanaan ini sinkron dengan rencana di tingkat kabupaten (RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan).

6. Pembentukan dan Penguatan Lembaga PAUD Desa

Jika desa belum punya layanan PAUD, pendampingan membantu proses pendiriannya. Ini bisa berupa fasilitasi musyawarah desa untuk mendukung pembentukan PAUD, penyusunan Peraturan Desa tentang PAUD, hingga pendampingan teknis pembuatan izin operasional dan NPSN. Jika sudah ada PAUD (misal PAUD swasta/komunitas), desa didorong memfasilitasi peningkatan status (seperti membantu lahan atau bangunan agar bisa jadi PAUD negeri dengan dukungan pemda).

7. Pemberdayaan Kader dan Bunda PAUD

Di banyak desa terdapat Bunda PAUD Desa (biasanya istri kepala desa atau tokoh perempuan setempat) serta kader-kader posyandu/PKK. Pendampingan melibatkan mereka sebagai ujung tombak lapangan. Pokja Bunda PAUD di tingkat kabupaten juga memberikan bimbingan teknis khusus kepada para Bunda PAUD Desa agar mereka mampu mensosialisasikan program dan menggerakkan partisipasi warga.



8. Sosialisasi ke Masyarakat

Pemerintah desa, dengan dukungan pendamping, melaksanakan sosialisasi langsung ke warga. Misalnya melalui forum Musyawarah Desa, pengajian, posyandu, atau kunjungan rumah bagi keluarga sasaran. Materi sosialisasi menekankan manfaat PAUD bagi anak (agar siap sekolah, mencegah stunting, dsb.), dan memberi tahu adanya peraturan bahwa anak usia 5–6 tahun sebaiknya mengikuti PAUD. Melalui pendekatan budaya lokal (tokoh agama, adat) pesan ini disebarluaskan luas. Kegiatan sosialisasi massif ini penting supaya orang tua memahami dan antusias menyekolahkan anaknya.

9. Monitoring dan Pelaporan di Desa

Pendampingan juga membantu desa menyiapkan mekanisme pemantauan. Contohnya, kader desa rutin melacak anak yang belum masuk PAUD dan melaporkannya ke kepala desa/Bunda PAUD. Setiap akhir tahun, desa melaporkan ke kecamatan/pendamping jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah PAUD dan yang belum, beserta kendalanya. Data ini kemudian digunakan pemda untuk intervensi lebih lanjut. Melalui sistem pelaporan berjenjang, kemajuan program di desa dapat terukur jelas.

Dalam pendampingan pemerintah desa/kelurahan, beberapa prinsip utama dipegang:

- **Partisipatif dan Gotong Royong**

Prinsip ini mengedepankan partisipasi masyarakat desa. Seluruh proses (dari perencanaan hingga pelaksanaan PAUD) melibatkan warga, tokoh masyarakat, dan orang tua secara gotong royong. Semangat kebersamaan ini sejalan dengan kultur desa dan memastikan program diterima luas.

- **Pemberdayaan Lokal**

Alih-alih semua dilaksanakan oleh pihak luar, prinsipnya memberdayakan kapasitas lokal. Kader dan perangkat desa didorong menjadi pelaku aktif (perencana, pelaksana, pengawas) program PAUD. Pendamping hanya memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas, sehingga keberlanjutan terjaga.

- **Kontekstual dan Fleksibel**

Setiap desa punya karakteristik unik (geografis, sosial, budaya). Pendampingan berprinsip tidak satu resep untuk semua. Solusi disesuaikan konteks: desa terpencil mungkin perlu PAUD keliling atau kerjasama antar-desa; desa adat mungkin mengintegrasikan muatan budaya lokal. Fleksibilitas ini penting agar program efektif di setiap kondisi.

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Karena menggunakan dana publik (Dana Desa), pendampingan menekankan prinsip keterbukaan. Perencanaan dan penggunaan anggaran untuk PAUD diinformasikan ke warga (misal dipasang di papan informasi). Pertanggungjawaban keuangan dibimbing sesuai aturan, sehingga menumbuhkan kepercayaan warga bahwa dana pendidikan dipakai semestinya.

- Kolaborasi Lintas Sektor di Desa

Prinsip integratif dijalankan dengan kolaborasi sektor kesehatan (posyandu, bidan desa) dan kesejahteraan (program PKH, perlindungan anak) di tingkat desa. PAUD dijadikan simpul berbagai layanan, sehingga intervensi anak usia dini berjalan komprehensif. Contoh, dalam kegiatan PAUD diselipkan pemeriksaan kesehatan rutin atau penyuluhan gizi bekerja sama dengan puskesmas.

- Keberlanjutan Program

Desa perlu memastikan program PAUD berkelanjutan melewati periode pemerintahan. Prinsipnya adalah kelembagaan yang kuat (misal adanya kelembagaan PAUD desa yang diatur perdes) dan kaderisasi. Pendamping menekankan pentingnya regenerasi kader PAUD dan dukungan politis jangka panjang agar program ini tidak terhenti jika kepala desa berganti.

4.4.3 Pembimbingan dan Pendampingan di Tingkat Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

Tujuan pembimbingan dan pendampingan di level kabupaten/kota berorientasi pada penguatan tata kelola dan kebijakan supaya kebijakan 'Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah' berjalan optimal. Pemerintah daerah berperan sebagai *orchestrator* yang mengatur strategi makro, menjamin ketersediaan layanan, sekaligus menjaga mutu. Tujuan utama antara lain:

- Memenuhi Target Wajib PAUD

Pemerintah daerah berperan dalam memastikan seluruh anak usia 5-6 tahun di wilayahnya mendapatkan layanan PAUD minimal setahun. Ini bagian dari pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun dan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Cakupan layanan menjadi indikator kinerja pemda (APK PAUD usia 5-6 tahun ditingkatkan hingga mendekati 100%).

- Meningkatkan Kualitas PAUD

Selain akses, tujuan penting adalah peningkatan kualitas. Pemda mengarahkan agar satuan PAUD menerapkan standar nasional PAUD (terkait kurikulum, pendidik, sarana, dan aspek PAUD HI Ramah Anak). Anak tidak hanya masuk PAUD, tapi mendapatkan pendidikan yang bermutu dan holistik, sehingga benar-benar siap masuk SD dengan fondasi yang kokoh.

- Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah kabupaten/kota bertujuan menyelaraskan program PAUD dengan sektor lain (kesehatan, perlindungan anak, dll.). Misinya antara lain menurunkan angka stunting, meningkatkan kesiapan belajar, dan mengurangi anak putus pendidikan di jenjang awal. PAUD satu tahun prasekolah menjadi strategi intervensi dini untuk tujuan-tujuan tersebut, sehingga perlu diintegrasikan dalam perencanaan daerah secara menyeluruh.

- Penguatan Kelembagaan & Sumber Daya

Tujuan pendampingan di pemda juga meliputi memperkuat kelembagaan pengelola program (misal: Gugus Tugas PAUD atau Pokja Bunda PAUD daerah) dan memastikan sumber daya (anggaran, SDM pengawas) tersedia dan terlatih. Dengan kata lain, membangun kapasitas institusional daerah agar mampu mengawal implementasi hingga level terbawah secara berkelanjutan.



Pada tingkat kabupaten/kota, kegiatan pembimbingan dan pendampingan mencakup hal-hal strategis berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah

Pemda disarankan menyusun regulasi khusus sebagai landasan program. Banyak daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyelenggaraan PAUD satu tahun prasekolah. Regulasi ini mengatur peran tiap pihak (dinas, camat, desa, sekolah) dan mekanisme pelaksanaannya. Pendampingan dapat membantu perumusan naskah kebijakan atau panduan teknis pelaksanaannya. Selain itu, memasukkan target PAUD 1 tahun ke dalam dokumen perencanaan resmi (RPJMD, Renstra Dinas) termasuk kegiatan inti yang didampingi.

2. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Pemerintah daerah perlu membentuk atau mengaktifkan tim koordinasi PAUD lintas OPD. Biasanya melibatkan Dinas Pendidikan (leading sector), Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial/PPPA, Kantor Kemenag (untuk RA), dan dinas terkait lainnya. Selain itu, ada Pokja Bunda PAUD yang diketuai Bunda PAUD kabupaten. Kegiatan inti di sini adalah rapat koordinasi rutin, pembagian peran jelas, dan penyusunan rencana kerja terpadu. Misalnya, rapat lintas OPD untuk sinkronkan data dan program SPM. Pendampingan memastikan koordinasi ini berjalan, mengurai hambatan birokrasi, serta membangun visi bersama.

3. Sosialisasi Massal dan Advokasi Publik

Di tingkat kabupaten, perlu kampanye luas. Kegiatan seperti seminar, dialog publik, media massa digunakan untuk menyosialisasikan pentingnya PAUD prasekolah. Kepala daerah (bupati/walikota) sering turun langsung menyuarakan program ini, seperti yang dilakukan Walikota Subulussalam yang mensosialisasikan kebijakan wajib PAUD dan mengingatkan seluruh stakeholder untuk gencar mengedukasi masyarakat. Pendampingan membantu menyiapkan materi sosialisasi, melatih juru bicara (termasuk Bunda PAUD), dan menggandeng media lokal. Tujuannya agar terbentuk dukungan politik dan sosial yang kuat terhadap program.

4. Pendanaan dan Bantuan Fasilitas

Kegiatan konkret dari pemerintah daerah adalah mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung PAUD. Pendampingan membantu Dinas Pendidikan mengidentifikasi kebutuhan anggaran: misal dana untuk BOP daerah (pelengkap BOP pusat), honorarium guru PAUD non-PNS, pembangunan unit satuan baru negeri di area blankspot, pengadaan APE dan buku bacaan, dsb. Selain APBD, diarahkan juga mengoptimalkan DAK dari pusat dan mendorong penggunaan dana desa sesuai prioritas. Satu contoh, pemda memfasilitasi desa dengan memberikan *matching fund* atau bantuan stimulan jika desa mendirikan PAUD. Dengan dukungan anggaran yang cukup, program dapat berjalan nyata, tidak hanya himbauan.

5. Bimbingan Teknis dan Diklat

Pemerintah daerah melalui dinas menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk berbagai sasaran: kepala PAUD, para guru, pengawas, serta aparat kecamatan/desa. Bimtek ini bagian dari pendampingan makro untuk meningkatkan kapasitas pelaksana di lapangan. Contoh kegiatan: Bimtek pengelolaan PAUD berkualitas, pelatihan transisi PAUD ke SD bagi guru TK dan guru kelas 1 SD, dan lainnya.

6. Pendampingan Supervisi Lapangan

Pemerintah daerah menggerakkan pengawas sekolah atau pemilik PNF untuk turun ke lapangan mendampingi satuan PAUD dan desa. Seperti dijelaskan pada tingkat sebelumnya, pengawas melakukan monitoring ke PAUD, memverifikasi data anak usia 5–6 tahun yang belum terlayani, dan melaporkan hasil ke dinas. Pemda dapat membentuk tim khusus atau Satgas yang melakukan supervisi intensif ke kecamatan-kecamatan tertinggal. Kegiatan ini menjamin program di atas kertas benar-benar diimplementasikan di akar rumput, karena ada pengawasan melekat.

7. Pendekatan Kolaboratif dengan Kemenag

Di banyak daerah, RA (Raudhatul Athfal) di bawah Kemenag juga melayani anak prasekolah. Pemda perlu mengakui RA setara PAUD lain dalam perencanaan. Kegiatan koordinasi dengan Kantor Kemenag, misalnya: sinkronisasi data murid RA, pelibatan guru RA dalam pelatihan bersama, atau bantuan sarana ke RA jika memungkinkan. Pendampingan mengupayakan agar tidak ada sekat koordinasi antar lembaga pemerintah, sehingga semua layanan PAUD (TK, KB, SPS, RA) terangkai dalam satu sistem.

8. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Secara periodik, pemda melakukan evaluasi capaian kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’. Kegiatan seperti pengumpulan data APK tiap semester, evaluasi SPM PAUD, hingga tinjauan mutu layanan (jika memungkinkan melalui instrument penilaian mutu PAUD). Pendampingan membantu daerah dalam analisis data dan pemanfaatannya. Misal, diketahui desa X masih 50% anak belum PAUD, maka dirumuskan langkah khusus untuk desa tersebut. Evaluasi juga mencakup kualitas: pemda bisa melakukan sampling sekolah untuk melihat apakah prinsip belajar melalui bermain sudah diterapkan. Hasil evaluasi dilaporkan ke pimpinan daerah dan dipakai untuk keputusan anggaran tahun berikutnya. Dengan siklus monev yang baik, program dapat terus diperbaiki.

9. Apresiasi dan Afirmasi

Kegiatan tambahan yang tak kalah penting adalah memberikan apresiasi. Pemda bisa mengadakan penghargaan bagi kecamatan atau desa terbaik dalam mendukung PAUD. Sebaliknya, memberikan afirmasi (dukungan ekstra) bagi wilayah yang masih tertinggal. Misal: kecamatan terpencil mendapat tambahan kuota guru kontrak PAUD atau bantuan bis sekolah. Pendampingan di sini berupa saran kebijakan agar pemda menerapkan pendekatan reward and support yang mendorong percepatan pencapaian target.

10. Evaluasi dan Replikasi Praktik Baik

Pemda harus secara terbuka mengevaluasi apa yang berhasil dan tidak. Pendamping membantu mendokumentasikan praktik baik dari kecamatan/desa yang sukses. Lalu fasilitasi penyebarluasannya: bisa lewat studi tiru (kunjungan belajar antar daerah), atau menerbitkan buku saku kisah sukses. Demikian pula, kendala yang muncul diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama, mungkin dengan meminta masukan ahli atau belajar dari daerah lain. Siklus evaluasi ini menjamin program terus adaptif dan meningkat dari tahun ke tahun.

“Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah’ memerlukan koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kebijakan ini merupakan program lintas kementerian, organisasi pemerintah daerah, dan sektor lainnya. Paling tidak terdapat 6 (enam) kementerian utama yang akan terlibat dalam program ini. “



BAB V

Penutup





Penutup

Desain Besar Kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan layanan pendidikan dasar sejak usia dini, sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Dokumen ini memuat landasan konseptual, analisis situasi, strategi implementasi, serta pengorganisasian yang dirancang secara sistematis untuk menjamin keterlaksanaan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ secara efektif. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengacu pada dokumen ini dalam merumuskan kebijakan turunan, merancang program, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan sinergi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebagai dokumen strategis jangka menengah-panjang, Desain Besar ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, perubahan sosial, serta hasil evaluasi implementasi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ‘Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah’ dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia.



REFERENSI

- Barnett, W. S. (2013). Benefits of early childhood education and care. OECD.
- Barnett, W. S. (2013). Expanding access to quality pre-K is sound public policy. National Institute for Early Education Research (NIEER).
- Budiharjo. (2017). The importance of early childhood education in developing countries: Evidence from Indonesia. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 12(7), 141-148.
- Center on the Developing Child. (2007). The science of early childhood development. Harvard University.
- Center on the Developing Child. (2007). The science of early childhood development: Closing the gap between what we know and what we do. Harvard University.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society*. W. W. Norton & Company.
- Gonzalez-Mena, J. (2010). Foundations of early childhood education: Teaching in a diverse society (5th ed.). McGraw-Hill.
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900-1902.
- Heckman, J. J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood education. *American Educator*, 35(1), 31-35.
- Heckman, J. J. (2012). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. *The Heckman Equation*.
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development, Volume II: The psychology of moral development*. Harper & Row.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Mischel, W., & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. *Journal of Personality and Social Psychology*, 16(2), 329-337.
- National Association for the Education of Young Children (NAEYC). (2009). Where we stand on school readiness.
- OECD. (2017). *Starting strong V: Transitions from early childhood education and care to primary education*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). *Starting strong 2017: Key OECD indicators on early childhood education and care*. OECD Publishing.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. W. W. Norton & Company.
- Piaget, J. (1964). Development and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), 176-186.
- Pianta, R. C., & Cox, M. J. (2016). *The transition to kindergarten*. Paul H. Brookes Publishing Co.
- Pranyoto, S. (2017). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan implementasinya dalam pendidikan karakter*. Prenadamedia Group.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Dampak program PAUD terhadap hasil belajar siswa di tingkat SD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santrock, J. W. (2018). *Child development* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). *From neurons to neighborhoods: The science*



- of early childhood development. National Academy Press.
- UNESCO. (2006). Strong foundations: Early childhood care and education. UNESCO Education for All Global Monitoring Report.
- UNESCO. (2013). Early childhood care and education: Regional report Asia and the Pacific.
- UNESCO. (2019). Ensuring quality early childhood education for all: Sustaining the benefits of early learning.
- UNICEF. (2011). The right to early childhood development.
- UNICEF. (2019). A world ready to learn: Prioritizing quality early childhood education.
- UNICEF. (2020). A world ready to learn: Prioritizing quality early childhood education. United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2021). Early childhood education and development in Indonesia.
- UNICEF Indonesia & BAPPENAS. (2020). Investing in early childhood education in Indonesia.
- UNICEF. (2019). Early childhood development: The foundation of sustainable development.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds. & Trans.). Harvard University Press.
- World Bank. (2013). Early childhood education and development in Indonesia: An assessment of policies using SABER.
- World Bank. (2013). Indonesia early childhood education and development (ECED) project: Implementation status & results report.
- World Bank. (2019). Ending learning poverty: What will it take? World Bank Group.

REGULASI

1. Bappenas. (2019). Proyeksi penduduk dan bonus demografi Indonesia.
2. Kemendikbud RI. (2021). Laporan pemantauan kesiapan berasekolah anak usia dini di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1654.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1241.
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159.
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 253.
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini.

10. Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 136.
11. Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195.
12. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.



LAMPIRAN

Berikut adalah beberapa strategi implementasi kampanye pentingnya PAUD.

a. Rumah Pesan

Kampanye mengenai pentingnya pendidikan pada anak usia dini (PAUD) tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pembelajaran dan perkembangan anak, tetapi juga bagaimana membangun kepedulian dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas, unggul dan kompetitif. Harus diyakini bersama bahwa PAUD merupakan landasan bagi pengembangan kecerdasan dan keterampilan serta pembentukan karakter anak, termasuk di dalamnya bagaimana menumbuhkan sikap disiplin, kreatif, mandiri, percaya diri, berempati, dan beragam karakter baik lainnya sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan pada lingkungan yang lebih luas dan lebih kompleks.

Dalam konteks tersebut, Rumah Pesan merupakan salah satu strategi alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan kunci kepada seluruh pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas. Walau bagaimanapun penyelenggaraan pendidikan anak pada usia dini tidak dapat berdiri sendiri, karena keberhasilannya ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi berbagai pihak, mulai dari satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Untuk mendukung efektivitas kampanye tentang pentingnya PAUD dan memperkuat ekosistem PAUD yang holistik, Rumah Pesan memetakan peran dan arah yang terstruktur bagi setiap elemen pemangku kepentingan. Pesan-pesan yang ada di Rumah Pesan tersusun sebagai bentuk panduan komunikasi dan advokasi yang diharapkan dapat menginspirasi komitmen, memperjelas tanggung jawab, dan mendorong aksi nyata dari masing-masing pihak terkait.

Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interaksi positif antara orang tua dan anak pada usia dini berperan penting dalam membentuk perkembangan bahasa, sosial-emosional, dan kognitif anak sebagai bagian dari stimulasi holistik integratif. 2. Anak yang mendapatkan layanan PAUD memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, termasuk keterampilan literasi, numerasi, dan regulasi diri yang mendukung kelancaran transisi ke sekolah dasar. 3. PAUD berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial, disiplin, dan kemandirian yang menjadi dasar bagi karakter anak di masa depan. 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orang tua menyadari bahwa pendidikan dimulai sejak usia dini dengan memberikan stimulasi yang sesuai di lingkungan rumah dan dalam layanan PAUD yang berkualitas. ▪ Orang tua mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan bermain-belajar di PAUD guna mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak belajar melalui interaksi dan pengalaman sejak usia dini, sehingga lingkungan keluarga dan PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta kesiapan belajar anak. 2. PAUD mendukung orang tua dalam memberikan stimulasi perkembangan sosial-emosional anak secara konsisten, dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati, disiplin, dan kemandirian. 3. Pembelajaran berbasis bermain di PAUD membantu anak mengembangkan keterampilan dasar, kesiapan akademik, serta kecintaan terhadap belajar yang berkelanjutan. 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orang tua berperan aktif dalam memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak di rumah, seperti membiasakan komunikasi yang positif, mengenalkan kebiasaan baik, dan memberi contoh perilaku yang mendukung nilai-nilai sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD menjadi perpanjangan tangan dalam menumbuhkan potensi anak sejak dini 2. PAUD membantu anak mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. 3. Orang tua yang aktif dalam pendidikan anak dapat membantu mempercepat proses adaptasi anak di lingkungan sekitar dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan. 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami bahwa PAUD bukan sekadar tempat penitipan anak, tetapi bagian penting dalam mempersiapkan anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. ▪ Orang tua melibatkan diri dalam kegiatan PAUD dan mendukung anak dalam membangun kebiasaan belajar yang menyenangkan di rumah.



Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk orang tua	<ul style="list-style-type: none">Orang tua mendukung program PAUD dengan aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pendidik guna menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif.Orang tua membangun budaya belajar di rumah dengan aktivitas yang memperkaya pengalaman anak, seperti membacakan buku bersama, bermain kreatif, dan melakukan eksplorasi edukatif.	<ul style="list-style-type: none">Mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas PAUD untuk meningkatkan keterampilan motorik, kognitif, serta interaksi sosial.Berkolaborasi dengan pendidik PAUD dalam menciptakan kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di satuan PAUD untuk mendukung pertumbuhan optimal anak.	<ul style="list-style-type: none">Orang tua memberikan stimulasi sederhana seperti membaca buku bersama, bermain angka, dan mengenalkan konsep dasar akademik secara alami.Orang tua mempersiapkan anak secara emosional dan sosial.
Data Pendukung	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Studi World Bank (2019); UNICEF (2021); Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Santrock (2018); Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pianta & Cox (2016); Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD

Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dalam mendukung peran orang tua pada pendidikan anak usia dini, dapat dimulai dari aspek kesadaran akan pentingnya “PAUD sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas”. Hal yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya interaksi positif dan stimulasi sejak dini, serta peran aktif mereka dalam kegiatan belajar anak. Evaluasi dilakukan melalui penyuluhan parenting, pelatihan orang tua, forum komunitas, dan pendampingan oleh satuan PAUD. Kegiatan ini difasilitasi oleh dinas pendidikan, pendidik PAUD, kader posyandu, serta tokoh masyarakat, dan idealnya dilaksanakan secara berkala, khususnya pada awal tahun ajaran dan dalam kegiatan parenting rutin.

Selanjutnya, keberhasilan strategi dalam membentuk “PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini” dievaluasi dengan melihat keterlibatan orang tua dalam membangun kebiasaan baik di rumah. Orang tua didorong untuk aktif membangun komunikasi positif, menjadi teladan, dan membiasakan anak pada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sosial.

Evaluasi dilakukan melalui kegiatan seperti parenting class, kunjungan rumah, dan program pembiasaan rumah yang terintegrasi dengan kegiatan di PAUD. Kegiatan ini difasilitasi oleh guru dan kepala PAUD, fasilitator parenting, dan organisasi masyarakat, yang dilaksanakan rutin setiap bulan atau sesuai tema pembelajaran tertentu.

Terakhir, strategi dalam "PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul" dievaluasi dengan mengukur peran orang tua dalam menstimulasi kesiapan anak secara sosial, emosional, dan akademik. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan pengasuhan, penyediaan materi edukatif, dan pelibatan keluarga dalam aktivitas belajar yang menyenangkan dan kontekstual. Evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan dan kesehatan, satuan PAUD, serta komunitas literasi, dan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang tahun, terutama menjelang transisi ke jenjang pendidikan dasar. Evaluasi keberhasilan strategi ini dapat ditandai dengan meningkatnya partisipasi orang tua dan berkembangnya kesiapan anak dalam berbagai aspek perkembangan.

Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan anak usia dini berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan Lingkungan yang mendukung PAUD akan mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak sejak dini Kampanye kesadaran tentang PAUD sangat penting terutama di daerah dengan partisipasi pendidikan rendah Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Menginternalisasi budaya belajar sejak dini dalam lingkungan keluarga dan komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini dan melibatkan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial anak Lingkungan yang positif membantu membangun kebiasaan serta nilai-nilai moral yang kuat pada anak sejak usia dini Masyarakat yang berperan aktif dalam pendidikan karakter akan melahirkan generasi yang memiliki integritas, etika, serta rasa tanggung jawab yang tinggi Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap positif dan berbudi pekerti luhur 	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak usia dini akan berkontribusi pada meningkatnya mutu pendidikan secara keseluruhan Kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil Dukungan komunitas terhadap PAUD akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong budaya literasi sejak dini dalam lingkungan keluarga dan komunitas



Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Memberikan dukungan konkret kepada satuan PAUD dalam bentuk donasi, tenaga sukarela, atau penyediaan sarana dan prasarana pendidikanMeningkatkan literasi masyarakat mengenai PAUD melalui kampanye media sosial, media cetak, serta forum komunitas lokalBerkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemimpin daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat komitmen terhadap pengembangan PAUD	<ul style="list-style-type: none">mendukung program-program PAUD yang berfokus pada pendidikan karaktermenciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh nilai-nilai positif bagi pertumbuhan anakBerkontribusi dalam kegiatan komunitas yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai sosial dan moral anak	<ul style="list-style-type: none">Mendukung PAUD dalam bentuk penyediaan fasilitas, tenaga sukarela, atau donasi untuk pengembangan program pendidikanMenyebarluaskan informasi tentang pentingnya PAUD dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul melalui media sosial dan komunitas lokal
Data Pendukung	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Heckman (2011); Barnett (2013); Pranyoto (2017);	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;	UNICEF (2011); World Bank (2013); Kemendikbud (2019); Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Strategi pada poin “PAUD sebagai Periode Emas untuk Mengoptimalkan Potensi Anak” dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan anak usia dini serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Upaya dilakukan melalui kampanye kesadaran publik, peningkatan literasi masyarakat tentang PAUD, dukungan konkret seperti donasi atau penyediaan sarana, dan penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah, satuan PAUD, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat menjadi pelaksana utama. Evaluasi keberhasilan dapat dilakukan setiap tahun dengan memantau angka partisipasi PAUD, angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas layanan PAUD di berbagai wilayah, khususnya daerah dengan partisipasi pendidikan rendah.

Kemudian, pada pesan “PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini”, upaya yang dapat dilakukan yaitu berfokus pada pendidikan karakter sejak dini melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Strategi dilaksanakan dengan menjadi

teladan dalam kehidupan sehari-hari, mendukung program PAUD berorientasi karakter, serta menciptakan lingkungan positif yang mendukung nilai-nilai moral. Libatkan aktif masyarakat, lembaga PAUD, dan instansi pendidikan karakter menjadi aktor penting dalam implementasi strategi ini. Evaluasi dilakukan secara berkala (misalnya per semester) melalui observasi sikap anak, pelaporan sekolah, dan asesmen perkembangan karakter yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan.

Pada pesan “PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul”, strategi difokuskan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD dalam mempersiapkan generasi unggul. Pelaksanaan mencakup kampanye literasi PAUD, dukungan terhadap satuan PAUD dalam bentuk fasilitas, tenaga, dan dana, serta penyebaran informasi melalui media massa dan komunitas lokal. Pelaksana strategi mencakup dinas pendidikan, satuan PAUD, tokoh masyarakat, dan media. Keberhasilan strategi ini dapat dievaluasi secara tahunan melalui peningkatan kualitas layanan PAUD, kesiapan anak masuk jenjang pendidikan dasar, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan sejak dini.

Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Data Pendukung	Vygotsky (1978); Piaget (1964); UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD	Kohlberg (1984); Lickona (1991); Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD; Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD	Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD; Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD; National Association for the Education of Young Children (NAEYC) tentang School Readiness



Pesan Utama	PAUD Sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk satuan PAUD	<ol style="list-style-type: none">1. Anak yang mendapatkan layanan PAUD memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.2. PAUD memberikan stimulasi holistik yang mencakup aspek kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan fisik anak.3. Pendidik PAUD berperan sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan anak melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya.4. Aksi yang dapat dilakukan:<ul style="list-style-type: none">▪ Pendidik PAUD menerapkan metode pembelajaran berbasis bermain yang aktif, interaktif, dan menyenangkan.▪ Satuan PAUD meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi guna menjamin kualitas layanan PAUD.▪ Satuan PAUD menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.▪ Satuan PAUD menyediakan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan sesuai dengan Standar Nasional PAUD.	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan PAUD merupakan lingkungan pertama di luar rumah yang mendukung pembentukan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya pada anak.2. PAUD yang berkualitas harus memberikan teladan karakter baik melalui interaksi antara pendidik PAUD dan anak dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan.3. Metode pembelajaran berbasis bermain merupakan salah satu metode yang efektif dalam menanamkan karakter positif seperti kesabaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.4. Aksi yang dapat dilakukan:<ul style="list-style-type: none">▪ Pendidik PAUD menerapkan metode pembelajaran yang menumbuhkan karakter positif, seperti berbagi, gotong royong, dan menghormati orang lain.▪ Pendidik PAUD memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kebiasaan baik pada anak.▪ Satuan PAUD melibatkan orang tua dalam proses pembentukan karakter anak agar nilai-nilai yang diajarkan juga diterapkan di rumah.	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan PAUD memberikan stimulasi holistik yang membantu anak dalam mengembangkan karakter anak.2. Anak perlu dibekali dengan keterampilan sosial, motorik, kemandirian, dan emosional untuk mendukung kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.3. Pendidik PAUD merupakan garda terdepan dalam menanamkan keterampilan dasar4. Aksi yang dapat dilakukan:<ul style="list-style-type: none">▪ Pendidik PAUD mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis bermain yang mengembangkan keterampilan akademik, sosial, dan emosional anak secara seimbang.▪ Satuan PAUD menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik untuk mendukung persiapan anak secara mental dan emosional.▪ Satuan PAUD bekerja sama dengan sekolah dasar dalam menyusun program transisi yang membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.

Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dalam mewujudkan “PAUD sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas”, satuan PAUD melakukan pendekatan pembelajaran yang berbasis bermain aktif, interaktif, dan menyenangkan. Strategi ini dilakukan melalui penyusunan RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian) yang mengintegrasikan stimulasi kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan fisik anak secara holistik. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, penilaian portofolio anak, serta supervisi internal oleh kepala PAUD. Pendidik PAUD dan kepala satuan pendidikan menjadi pelaksana utama kegiatan ini, yang berlangsung secara rutin setiap minggu dan dievaluasi secara berkala setiap bulan.

Dalam rangka membangun “PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini”, satuan PAUD menerapkan metode pembelajaran yang menekankan nilai-nilai sosial dan budaya, seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan memberi teladan positif dalam kehidupan sehari-hari serta mengintegrasikan nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran tematik. Evaluasi keberhasilan strategi ini dilakukan dengan asesmen perkembangan sosial-emosional anak, refleksi kegiatan pendidik PAUD, dan umpan balik dari orang tua. Proses ini dilaksanakan oleh pendidik dan dibantu oleh pengawas PAUD, serta dilakukan secara berkala selama semester berjalan.

Pesan “PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul” difokuskan pada penguatan keterampilan dasar dan kesiapan sekolah anak. PAUD mengadakan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan adaptasi dan literasi awal anak. Selain itu, satuan PAUD juga menjalin kerja sama dengan SD atau lembaga terkait untuk memfasilitasi transisi anak ke jenjang berikutnya. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui asesmen kesiapan sekolah anak, monitoring transisi PAUD ke SD, dan evaluasi pelatihan guru. Pihak yang terlibat meliputi kepala PAUD, guru, dinas pendidikan, dan mitra sekolah dasar, dengan pelaksanaan rutin tahunan menjelang akhir tahun ajaran.

Pesan Utama	PAUD sebagai Periode Emas untuk Mengoptimalkan Potensi Anak	PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak	PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul
Pesan untuk Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat ketimpangan akses PAUD terutama di daerah terpencil 2. Investasi dalam PAUD membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah 3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan PAUD yang berkualitas dan terjangkau bagi semua anak 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan PAUD - Membangun dan memperbaiki infrastruktur PAUD yang sesuai standar, terutama di daerah 3T 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan karakter yang kuat sejak dini akan membantu mengurangi angka kenakalan remaja dan meningkatkan kualitas SDM di daerah 2. PAUD yang bermutu akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik 3. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah diperlukan agar semua anak memiliki akses ke PAUD yang mendukung pembentukan karakter positif 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan standar pendidikan karakter dalam kurikulum PAUD di tingkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap PAUD masih belum merata di seluruh daerah, terutama di wilayah pedesaan terpencil 2. Kebijakan yang mendukung PAUD akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) 3. Pemerintah daerah memiliki peran strategi dalam menyediakan PAUD bermutu dan terjangkau bagi semua anak 4. Aksi yang dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan PAUD, termasuk pelatihan tenaga pendidik dan penyediaan fasilitas



Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pada pesan “PAUD sebagai Periode Emas untuk Mengoptimalkan Potensi Anak”, langkah pertama yang dilakukan adalah memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Evaluasi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur PAUD yang sesuai standar, penyediaan beasiswa, bantuan operasional, serta kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam pelaksanaan strategi ini, dibantu oleh lembaga masyarakat dan mitra swasta. Waktu pelaksanaan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun dengan melihat indikator seperti peningkatan partisipasi anak di PAUD dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Pada pesan “PAUD sebagai Upaya untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini”, evaluasi difokuskan pada penguatan kurikulum karakter di PAUD dan peningkatan kapasitas pendidik. Strategi dilaksanakan melalui penyusunan kurikulum lokal yang mendorong nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama, serta pelatihan rutin bagi pendidik PAUD. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan lembaga pelatihan guru, bertanggung jawab dalam implementasinya. Evaluasi dilakukan minimal dua kali dalam setahun dengan pendekatan observasi langsung di satuan PAUD, asesmen perkembangan karakter anak, serta keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi pembentukan karakter.

Sementara itu, dalam pesan “PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul”, strategi difokuskan pada peningkatan mutu layanan, penyediaan fasilitas memadai, serta penguatan transisi dari PAUD ke SD. Hal ini dilakukan melalui pembangunan satuan PAUD yang sesuai standar, pelatihan tenaga pendidik, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan usia dini. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan sekolah dasar dan media lokal dalam menyampaikan pesan-pesan kunci. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun ajaran melalui pelacakan data kesiapan anak saat masuk SD, angka putus sekolah usia dini, dan analisis capaian IPM di wilayah tersebut.

Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi “PAUD sebagai Periode Emas untuk Masa Depan Anak yang Berkualitas”, langkah yang dilakukan adalah mendorong berbagai pihak untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam penguatan layanan PAUD. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran dampak jangka panjang terhadap kesiapan anak memasuki pendidikan dasar, produktivitas sumber daya manusia, serta penurunan angka putus sekolah. Evaluasi ini dilakukan dengan metode longitudinal, observasi perkembangan anak, dan studi dampak sosial-ekonomi oleh lembaga penelitian, Dinas Pendidikan, dan institusi independen. Kegiatan ini berlangsung secara berkala, minimal setiap akhir tahun ajaran dan dirangkum dalam laporan evaluasi kebijakan PAUD.

Kemudian, strategi “PAUD sebagai Fase untuk Membentuk Karakter Anak Sejak Dini” dilakukan penerapan nilai-nilai moral dan sosial melalui pengalaman belajar yang positif di lingkungan PAUD yang aman, nyaman, dan stimulatif. Strategi ini dievaluasi melalui asesmen perkembangan karakter anak oleh guru dengan menggunakan instrumen observasi perilaku, lembar kerja aktivitas, dan dokumentasi portofolio anak. Pendidik PAUD bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan pencatatan, didampingi oleh kepala PAUD dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Proses evaluasi ini dilakukan secara harian (formatif), dan dirangkum dalam evaluasi tengah dan akhir semester (sumatif).



Sementara itu, untuk memastikan “PAUD sebagai Fondasi untuk Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul”, dilakukan program yang menstimulasi perkembangan keterampilan dasar anak, seperti mengenal huruf, angka, dan membiasakan rutinitas sekolah. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui asesmen kesiapan masuk SD, keterampilan literasi awal, dan pengamatan terhadap adaptasi anak terhadap aturan belajar. Evaluasi dilaksanakan oleh guru kelas PAUD bersama tenaga ahli psikolog anak atau konselor pendidikan, dan hasilnya digunakan untuk menyusun laporan perkembangan anak yang dibagikan kepada orang tua setiap akhir semester serta saat transisi ke jenjang SD.

